

KEKERASAN SIMBOLIK DI MADRASAH

Hj. Siti Muri'ah
Gianto

Kekerasan merupakan istilah yang tidak asing di telinga kita dan ketika kita mendengar kata “kekerasan” sebagian besar dari kita akan mengarahkan asosiasinya pada sebuah peristiwa yang mengerikan, menakutkan, menyakitkan, menyedihkan bahkan mematikan. Kekerasan juga dinilai sebagai sebuah tindakan yang melanggar HAM (Hak Asasi Manusia). Fenomena kekerasan saat ini telah mewarnai hampir semua aspek kehidupan sosial manusia baik politik, budaya, agama hingga aspek pendidikan. Kekerasan banyak dilakukan sebagai jalan pintas dalam upaya menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi; konflik Pilkada, sidang di DPR/DPD/DPRD, kegiatan orientasi siswa/mahasiswa baru, sampai menegakkan disiplin di sekolah (atau institusi lain), banyak menggunakan kekerasan.

Kasus kekerasan yang cukup marak adalah kasus kekerasan di dalam dunia pendidikan. Pendidikan merupakan proses untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh manusia agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Guna mencapai tujuan tersebut, diperlukan kondisi belajar yang kondusif dan jauh dari kekerasan. Namun dewasa ini kita sering dikejutkan dengan berbagai macam kasus mengenai kekerasan yang terjadi dalam dunia pendidikan (*school bullying*). Kasus ini seakan seperti fenomena gunung es yang terlihat sedikit di permukaan, namun akan terlihat lebih besar jika kita teliti lebih dalam.



KEKERASAN SIMBOLIK DI MADRASAH

Hj. Siti Muri'ah, Gianto



KEKERASAN SIMBOLIK DI MADRASAH

Hj. Siti Muri'ah
Gianto

Editor : Sunanik



KEKERASAN SIMBOLIK DI MADRASAH

Hj. Siti Muri'ah

Gianto

Myria Publisher

Kekerasan Simbolik di Madrasah

ISBN: 978-623-7199-55-7

Penulis: Hj. Siti Muri'ah & Gianto

Editor: Sunanik

Tata Letak: Tama

Design Cover: Ahmad

15 cm x 23 cm

vi + 162 halaman

Cetakan Pertama, Januari 2020

Diterbitkan Oleh:

Myria Publisher

Redaksi:

Ds. Pulung, Kec. Pulung, Kab. Ponorogo

Email: Myriapublisher@gmail.com

Website: www.myriabook.com

Telp: 0352-571 892

WA: 0812-3004-1340/0823-3033-5859

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh, Alhamdulillahirabbil'amin, segala puji bagi Sang Pemilik hatiku, Allah Subhaanahu wa Ta'ala, Rabb yang memiliki seluruh sifat-sifat Maha Sempurna, atas berkat rahmat dan ridhoNya maka selesailah proses penulisan buku ini. Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada semua pihak yang telah berjasa dalam membantu proses penulisan buku ini hingga dipublikasikan.

Akhir kata, sesungguhnya hanya Allah yang Maha Pandai (Ar-Rasyid). Buku ini sangat jauh dari sempurna, oleh sebab itu kritik dan saran sangat berarti bagi upaya peningkatan mutu buku ini secara berkelanjutan.

Wabillahi Taufik Walhidayah Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Jenis Penelitian.....	7
BAB II SOSIOLOGI PENDIDIKAN	9
A. Pengertian Sosiologi Pendidikan	9
B. Tujuan Sosiologi Pendidikan	11
C. Objek Sosiologi Pendidikan	12
1. Objek Material.....	12
2. Objek Formal	12
D. Ruang Lingkup Sosiologi Pendidikan.....	13
E. Pentingnya Mempelajari Sosiologi Pendidikan	15
F. Pendidikan Dan Masyarakat	18
1. Individu Dan Masyarakat.....	19
2. Pendidikan Dan Lingkungan Sosial.....	21
3. Fungsi Sekolah Bagi Masyarakat	23
4. Pendidikan Dan Perubahan Masyarakat.....	26
BAB III MODAL SOSIAL-BUDAYA DALAM	
MASYARAKAT	35
A. Konsep dan Makna Modal Sosial	35
B. Unsur Modal Sosial	47
C. Konsep Modal Budaya	50
BAB IV KEKERASAN SIMBOLIK DAN MADRASAH	59
A. Kekerasan Simbolik.....	59
1. Modal	59

2. Kelas	60
3. Habitus	61
4. Kekerasan dan Kekuasaan.....	63
5. Modal Simbolik dan Kekerasan Simbolik	65
6. Modal Simbolik Yang Menjadi Modal Terjadinya Kekerasan Simbolik.....	67
7. Sekolah Sebagai Arena Terjadinya Kekerasan Simbolik	68
B. Madrasah	73
1. Pengertian Madrasah.....	73
2. Sejarah dan Perkembangan Madrasah Di Indonesia....	74
3. Sistem Pendidikan Dan Pengajaran Di Madrasah	80
BAB V KEKERASAN SIMBOLIK DI MADRASAH	83
A. Deskripsi Hasil Penelitian	83
1. Kekerasan Simbolik di MIN Balikpapan.....	83
a. Tata Tertib Siswa, Kekerasan Simbolik Dan Normalisasi Habitus	83
b. Hukuman Sebagai Bentuk Kekerasan Simbolik.....	93
c. Majalah Dinding, Modal, Kekerasan Simbolik Dan Normalisasi Habitus	99
d. Kotak P3K, Kekerasan Simbolik Dan Normalisasi Habitus.....	125
e. Kode Etik Siswa, Kekerasan Simbolik Dan Normalisasi Habitus	127
f. Lukisan, Kekerasan Simbolik Dan Normalisasi Habitus.....	129
g. Lomba Dan Kekerasan Simbolik	131
2. Kekerasan Simbolik di MIN 2 Nganjuk	133
a. Tata Tertib Madrasah, Kekerasan Simbolik Dan Normalisasi Habitus	133

b. Seragam Madrasah, Modal Simbolik Dan Kekerasan Simbolik	140
c. Majalah Dinding, Modal, Kekerasan Simbolik Dan Normalisasi Habitus	142
d. Etika Dan Kekerasan Simbolik	147
e. Rekreasi, Habitus Dan Kekerasan Simbolik	148
f. Lomba Dan Kekerasan Simbolik	151
B. Analisa Hasil Penelitian	152
BAB VI PENUTUP	155
A. Kesimpulan	155
B. Saran	157
Daftar Pustaka	158

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan merupakan istilah yang tidak asing di telinga kita dan ketika kita mendengar kata “kekerasan” sebagian besar dari kita akan mengarahkan asosiasinya pada sebuah peristiwa yang mengerikan, menakutkan, menyakitkan, menyedihkan bahkan mematikan. Kekerasan juga dinilai sebagai sebuah tindakan yang melanggar HAM (Hak Asasi Manusia). Fenomena kekerasan saat ini telah mewarnai hampir semua aspek kehidupan sosial manusia baik politik, budaya, agama hingga aspek pendidikan. Kekerasan banyak dilakukan sebagai jalan pintas dalam upaya menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi; konflik Pilkada, sidang di DPR/DPD/DPRD, kegiatan orientasi siswa/mahasiswa baru, sampai menegakkan disiplin di sekolah (atau institusi lain), banyak menggunakan kekerasan.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), bahkan telah diatur dalam sebuah undang-undang. Perilaku atau tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai fakta sosial bukanlah perkara baru dari perspektif sosiologis masyarakat Indonesia. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fakta sosial yang bersifat universal karena dapat terjadi dalam sebuah rumah tangga tanpa pembedaan budaya, agama, suku bangsa, dan umur pelaku maupun korbannya, karena dapat terjadi dalam rumah tangga keluarga sederhana, miskin dan terbelakang maupun rumah tangga keluarga kaya, terdidik, terkenal, dan terpandang. Tindak kekerasan dapat dilakukan oleh suami atau istri

terhadap pasangan masing-masing, atau terhadap anak-anak, anggota keluarga yang lain, dan terhadap pembantu mereka secara berlainan maupun bersamaan. Ini menunjukkan bahwa masalah kekerasan yang terjadi disekitar kita merupakan sebuah masalah yang sangat serius.

Kasus kekerasan berikutnya yang cukup marak adalah kasus kekerasan di dalam dunia pendidikan. Pendidikan merupakan proses untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh manusia agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Guna mencapai tujuan tersebut, diperlukan kondisi belajar yang kondusif dan jauh dari kekerasan. Namun dewasa ini kita sering dikejutkan dengan berbagai macam kasus mengenai kekerasan yang terjadi dalam dunia pendidikan (*school bullying*). Kasus ini seakan seperti fenomena gunung es yang terlihat sedikit di permukaan, namun akan terlihat lebih besar jika kita teliti lebih dalam.

Kurniasih Awaliyah (35) alias Asih, guru Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al Karim Noer yang berada di Jalan Kolonel Wahid Udi, Kelurahan Soak Baru, Kecamatan Sekayu Kab. Musi Banyu Asin Prov. Sumatera Selatan ditikam pisau sebanyak 13 kali oleh muridnya (Selasa 8 November 2016). Empat siswi sebuah SMP Negeri di Jeneponto, Sulawesi Selatan, diduga dianiaya guru mereka. Dugaan penganiayaan terjadi saat keempat siswi itu mengikuti mata pelajaran Bahasa Inggris. Dalam laporannya kepada polisi, (Sabtu 10 September 2016), keempat siswi yang duduk di kelas 3 itu mengaku bagian leher mereka dipukul menggunakan tangan dan batang sapu. Dugaan penganiayaan terjadi saat Sang Guru akan mengajar

pelajaran Bahasa Inggris. Menurut salah satu murid saat itu Sang Guru kesal karena ada seorang siswa yang bermain dan membuat gaduh dalam kelas. Sang guru langsung memukul hampir seluruh siswa siswi di dalam ruang kelas menggunakan tangan dan batang sapu.

Kekerasan di dunia pendidikan kembali terjadi, kali ini, seorang guru SMK Negeri 2 Makassar, Drs. Dasrul (45), dihajar orang tua salah satu siswa. Orang tua bernama Adnan Achmad (38) itu tak terima anaknya ditampar si pendidik, (Rabu 10 Agustus 2016). Peristiwa itu bermula saat Dasrul membawakan mata pelajaran arsitek dan memberi tugas menggambar bagi muridnya di Kelas Dua, Jurusan Arsitek Dua. Namun, salah satu siswa, berinisial MAS (15), malah keluar masuk kelas dan tidak membawa kertas gambar. JE murid kelas 6 Sekolah Dasar Inpres Cambaya, melaporkan oknum guru di sekolahnya ke Unit Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Gowa. Kepada polisi JE melaporkan SB seorang oknum guru pegawai negeri sipil (PNS) di sekolahnya yang diduga tega memukulinya hingga mengalami luka lebam di wajahnya (Sabtu 7 Mei 2016). Perbuatan tidak terpuji oknum guru tersebut terjadi di ruang kelas SD Inpres Cambaya setelah JE terlibat pertengkaran dengan anak pelaku NW yang juga satu sekolah dengan korban. Saat anak pelaku memukuli korban, SB yang merupakan oknum guru tersebut bukannya memisahkan keduanya namun SB justru memukuli wajah korban dengan kepalan tangan hingga mengalami luka memar. Seorang guru berinisial FM di salah satu SD di Kota Medan dilaporkan ke Polresta Medan oleh Fatimah ibu dari salah satu pelajar di sekolah tersebut. Fatimah menuturkan; "Anak saya dipukul kepalanya, dan tangan ditusuk pulpen oleh gurunya (FM)". Lebih lanjut Fatimah menjelaskan,

kekerasan yang dialami anaknya ini hanya dikarenakan sang buah hati terlambat masuk kelas (Sabtu 9 April 2016).

Ulasan tersebut merupakan sebuah uraian mengenai fenomena kekerasan yang telah banyak dikenal masyarakat dan telah sering menjadi pusat perhatian sebagian besar masyarakat. Kekerasan fisik dan kekerasan psikologis hanyalah bentuk kekerasan yang wujudnya mudah “dikenali” dan dampaknya juga mudah diamati. Namun banyak pihak yang tidak menyadari akan adanya bentuk kekerasan lain yang hampir selalu terjadi di sekolah setiap hari. Bentuk kekerasan tersebut adalah “kekerasan simbolik”. Bentuk kekerasan ini hampir tidak pernah menjadi pokok perhatian berbagai pihak, padahal jika diamati dan dikaji secara cermat dan mendalam, bentuk kekerasan inilah yang memberikan pengaruh/dampak yang cukup besar (untuk tidak mengatakan paling besar), terutama pengaruh/dampak bagi masyarakat secara makro.

Kekerasan simbolik memang bukanlah kekerasan yang mudah dilihat wujudnya secara kasat mata, namun sebenarnya bentuk kekerasan ini sangat mudah diamati dari struktur sosial masyarakat. Ia sebenarnya berada di mana-mana, (terutama di sekolah/madrasah), dengan berbagai wujud dan strateginya. Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh Bourdieu, seorang sosiolog dari perancis. Konsep ini menjelaskan mekanisme yang digunakan kelompok elit atau kelompok atas yang mendominasi struktur sosial masyarakat untuk “memaksakan” ideologi, budaya, kebiasaan atau gaya hidupnya kepada kelompok kelas bawah yang didominasinya. Rangkaian budaya ini diistilahkan sebagai habitus. Akibatnya masyarakat kelas bawah, dipaksa untuk menerima, menjalani, mempraktikkan dan mengakui (mengamini) bahwa habitus kelas atas merupakan habitus yang pantas bagi mereka (kelas bawah),

sedangkan habitus kelas bawah merupakan habitus yang sudah selayaknya “dilenyapkan dan dibuang jauh-jauh”. Kekerasan simbolik sebenarnya jauh lebih kuat dan dahsyat dampaknya daripada kekerasan fisik karena kekerasan simbolik melekat dalam setiap bentuk tindakan, struktur pengetahuan, struktur kesadaran individu, serta memaksakan kekuasaan pada tatanan sosial dengan cara yang lemah lembut dan halus.

Banyak mekanisme atau cara yang bisa digunakan kelompok kelas elit/atas untuk memaksakan habitusnya, salah satunya melalui lembaga pendidikan (sekolah/madrasah). Mekanisme sosialisasi habitus kelas atas ini pun sering dijumpai dalam berbagai bentuk. Kita dapat melihat bagaimana anak-anak di sekolah/madrasah diwajibkan memakai sepatu, seragam, serta berbagai atribut atau cara berpakaian kelompok kelas atas yang juga harus dilakukan kelompok kelas bawah. Dengan kata lain, siswa dari kelompok kelas bawah dipaksa untuk berbusana “layaknya” kelas atas, mereka dipaksa menerima habitus kelas atas.

Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Balikpapan merupakan salah satu lembaga pendidikan setingkat Sekolah Dasar (SD) yang ada di Balikpapan dibawah naungan Kementerian Agama. Lembaga ini didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 1993 tanggal 25 Oktober 1993, dimana pada pendirian pertama MIN 1 Balikpapan berlokasi di Kelurahan Pandan Sari Kecamatan Balikpapan Barat dan bergabung dengan Yayasan Manuntung sampai dengan Tahun 1998. Kemudian MIN 1 Balikpapan pindah ke lokasi yang baru tepatnya di Tanjung Kelor Kelurahan Manggar Baru, Jalan Mulawarman RT. 06 Nomor 10 Balikpapan Timur. Lokasi MIN 1 Balikpapan saat ini adalah merupakan

tanah hasil dari hibah Yayasan Syamsul Ma'arif kepada Pemerintah Kota Balikpapan dengan luas tanah 3640 M², kemudian Permerintah kota Balikpapan berdasarkan SK Walikota No. 591/452/167.T.Pem.I/1999 menyerahkan kepada Departemen Agama untuk digunakan sebagai lokasi pendidikan MTsN 2 dan di dalamnya juga termasuk MIN 1 Balikpapan. Akhir Tahun Pelajaran 2015/2016 MTsN 2 Balikpapan menempati lokasi baru di kawasan TPA Manggar dan lokasi lama (tanah dan gedung) menjadi hak milik MIN 1 Balikpapan. Sejak berdiri hingga saat ini, Madrasah Ibtidaiyah Negeri Balikpapan telah dipimpin oleh lima orang kepala Madrasah yaitu Drs. H. Abd. Halim, Rusliansyah, S.Ag, Drs. H. Syamsul Huda, Drs. H. Sartono, MM dan saat ini dipimpin oleh Zainuddin, S.Ag. Pada Tahun 2013 MIN 1 Balikpapan terakreditasi dengan hasil A.

MIN 2 Nganjuk adalah Sekolah Dasar yang bernafaskan Islam yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Visi MIN 2 Nganjuk adalah terwujudnya Madrasah yang kompetitif, kualitatif dan inspiratif. MIN 2 Nganjuk terletak di Jl. Raya Nanggungan Desa Watudandang Kec. Prambon Kab. Nganjuk Provinsi Jawa Timur. Sebagai salah satu sekolah unggulan dan favorit di Kabupaten Nganjuk dan Jawa Timur, MIN 2 Nganjuk telah banyak meraih prestasi baik akademik maupun non akademik. Diantaranya: 1) juara lomba try out MIPA se-Kabupaten Nganjuk di SMPN 1 Ngronggot tahun 2018, 2) Juara 1 KSM Bahasa Indonesia se-Kabupaten Nganjuk tahun 2018, 3) Juara 1 Olimpiade bahasa Inggris bintang pelajar (*Asty Star Management*) Kabupaten Nganjuk tahun 2017, 4) juara 2 LBB Kejurkab Drum Band Kabupaten nganjuk tahun 2017. Proses belajar-mengajar di MIN 2 nganjuk sama dengan MIN yang ada di seluruh Indonesia yaitu dimulai pada pukul 07.00 – 13.00 WIB. Kegiatan ekstra-

kurikuler yang disediakan di MIN 2 Nganjuk antara lain: Pramuka, MTQ, Drumband, PMR, Seni Tari, Pembinaan Tim Olimpiade Bola Voli dll.

Bila dilihat sekilas, tidak ada yang aneh dan ganjil dengan fenomena yang terjadi di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Balikpapan dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 2 Nganjuk. Seperti yang diungkapkan diatas bahwa kekerasan simbolik memang bukanlah kekerasan yang mudah dilihat wujudnya secara kasat mata, namun sebenarnya bentuk kekerasan ini sangat mudah diamati dari struktur sosial masyarakat. Permasalahan ini merupakan sebuah permasalahan yang hampir tidak banyak mendapat perhatian serius dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah pendidikan. Meskipun sistem pendidikan nasional selalu berupaya menjadi sistem pendidikan yang mengembangkan prinsip *meritokrasi*, namun dalam kenyataannya, keberadaan masyarakat atau siswa yang berasal dari kelas bawah, hampir tidak diakui dalam budaya madrasah yang diberlakukan di madrasah. Berangkat dari latar belakang tersebut peneliti merasa tertarik untuk meneliti bagaimana kekerasan simbolik terjadi di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Balikpapan dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 2 Nganjuk.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹ Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif

¹ Lexy Moleong, *Metode penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 103

partisipan.²Partisipan adalah orang-orang yang diajak berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran persepsinya. Sedangkan dilihat dari sumber datanya penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan ini adalah deskriptif analisis dari habitus kelas atas dan habitus kelas bawah di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Balikpapan dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 2 Nganjuk.

² Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 94

BAB II

SOSIOLOGI PENDIDIKAN

A. Pengertian Sosiologi Pendidikan

Secara etimologis, sosiologi pendidikan terbentuk dari dua kalimat yaitu sosiologi dan pendidikan. Sosiologi berasal dari bahasa Latin *Socius* yang berarti teman, kawan, sahabat dan *Logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi istilah sosiologi mengarah kepada ilmu tentang cara berteman, berkawan, bersahabat yang baik, atau cara bergaul yang baik dan produktif pada masyarakat modern. Beberapa pengertian sosiologi menurut para pakar, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menurut Alvin Bertrand, sosiologi merupakan studi tentang hubungan antar manusia (*human relationship*).
2. Menurut Mayor Polak, sosiologi merupakan suatu disiplin ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat sebagai keseluruhan, yaitu hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, manusia dengan kelompok, kelompok dengan kelompok baik formal maupun material, baik statis maupun dinamis.
3. Menurut P.J. Bouwman, sosiologi merupakan ilmu mengenai masyarakat secara umum.
4. Sementara itu menurut Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi, sosiologi itu merupakan ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial.

Sementara itu istilah pendidikan merupakan terjemahan dari bahasa Yunani yaitu *paedagogie*. Istilah *paedagogie* berasal dari kata PAIS yang berarti Anak dan

AGAIN yang berarti membimbing. Jadi istilah paedagogie mempunyai arti bimbingan yang diberikan kepada anak. Sementara itu, orang yang memberikan bimbingan disebut PAEDAOG. Dalam perkembangan berikutnya istilah pendidikan/paedagogie diberi makna bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa kepada anak supaya bisa jadi dewasa. Berbeda dengan pengertian diatas, berikut ini akan penulis paparkan beberapa definisi sosiologi pendidikan yang diberikan oleh pakar sosiologi pendidikan, antara lain:

1. Menurut H.P. Fairchild, sosiologi pendidikan merupakan sosiologi yang diterapkan pada bidang pendidikan, untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan secara fundamental.
2. Menurut S. Nasution, sosiologi pendidikan merupakan ilmu yang berusaha untuk mengetahui cara-cara mengendalikan proses pendidikan untuk mengembangkan kepribadian individu agar lebih baik.
3. Menurut F. G. Robbins dan Brown, sosiologi pendidikan merupakan ilmu yang membahas dan menjelaskan hubungan-hubungan sosial yang mempengaruhi individu untuk mendapatkan dan mengorganisasikan pengalaman. Sosiologi pendidikan mempelajari kelakuan sosial serta prinsip-prinsip untuk mengontrolnya.
4. Menurut E.G. Payne, sosiologi pendidikan merupakan studi yang kemprehensif tentang segala aspek pendidikan.

B. Tujuan Sosiologi Pendidikan

Beberapa tujuan sosiologi pendidikan menurut para ahli dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu:

1. Sosiologi pendidikan bermaksud untuk menganalisa proses sosialisasi anak, baik pada lingkup keluarga, sekolah maupun pada lingkup masyarakat.
2. Sosiologi pendidikan bermaksud untuk menganalisa perkembangan dan kemajuan sosial
3. Sosiologi pendidikan bermaksud untuk menganalisa status pendidikan anggota masyarakat
4. Sosiologi pendidikan bermaksud menganalisa partisipasi orang-orang terpelajar dalam kegiatan sosial
5. Sosiologi pendidikan bermaksud membantu menentukan tujuan pendidikan
6. Untuk mengadakan integrasi kurikulum pendidikan dengan masyarakat sekitarnya agar supaya pendidikan mempunyai kegunaan praktis dalam masyarakat, bangsa dan negara.
7. Memberikan sumbangan yang positif atau bersifat membangun terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Sementara itu, tujuan sosiologi pendidikan menurut Nasution yang dikutip oleh Purnama Syaepurohman adalah: 1) analisis proses sosialisasi, 2) analisis pendidikan dalam masyarakat. 3) analisis interaksi sosial di sekolah dan analisis interaksi antara sekolah dengan masyarakat, 4) alat kemajuan dan perkembangan sosial, 5) dasar untuk menentukan tujuan pendidikan, 6) sosiologi terapan, 7) latihan bagi petugas pendidikan.³

³ Purnama Syaepurohman dkk, *Sosiologi Pendidikan* (Jakarta: Direktorat Ketenagaan Departemen Pendidikan Nasional, -), hlm. 11

C. Objek Sosiologi Pendidikan

Secara umum objek sosiologi pendidikan dapat dibagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal.

1. **Objek Material.** Objek material sosiologi pendidikan adalah segala sesuatu yang menjadi masalah, segala sesuatu yang dipersoalkan sosiologi pendidikan. Segala sesuatu yang dipersoalkan oleh sosiologi pendidikan antara lain; masyarakat, tingkah laku manusia dan institusi pendidikan. Dari ketiga persoalan sosiologi pendidikan tersebut, jika diuraikan lebih mendetail lagi menyangkut persoalan seputar kelompok sosial, struktur sosial, kelas, sekolah, guru, anak didik, keluarga, stratifikasi sosial, perubahan sosial dan sebagainya. Setiap sistem sosial merupakan kesatuan integral yang mendapat pengaruh dari: 1) sistem sosial yang lain, 2) lingkungan alam, 3) sifat-sifat fisik manusia, 4) karakter mental penghuninya.
2. **Objek Formal.** Objek formal sosiologi pendidikan merupakan sudut pandang untuk mendapatkan penjelasan dari perspektif sosiologi dan ilmu pendidikan tentang segala sesuatu yang dipersoalkan objek material, antara lain masyarakat, tingkah laku manusia dan institusi pendidikan. Sehingga objek formal sosiologi pendidikan adalah bagaimana hubungan perilaku manusia dan institusi pendidikan serta proses yang timbul dari hubungan antara kedua masalah tersebut dalam membentuk perilaku manusia di dalam masyarakat.

Sudut pandang sosiologi pendidikan mempermasahkan pertemuan dan percampuran antara lingkungan sekitar kebudayaan secara totalitas sedemikian rupa sehingga terbentuklah tingkah laku tertentu dan

sekolah atau lingkungan pendidikan dianggap sebagai bagian dari *total cultural milliu*. Oleh karena itu, sudut pandang sosiologi pendidikan memberikan penekanan bahwa dalam lembaga-lembaga, kelompok-kelompok sosial dan proses sosial terdapat hubungan yang saling terjalin, di mana dalam interaksi sosial itu individu memperoleh dan mengorganisasikan pengalamannya. Sementara dari segi pedagogisnya, seluruh individu dan masyarakat dari anak-anak sampai orang dewasa, kelompok-kelompok sosial dan proses-proses sosialnya, berlangsung di seputar sistem pendidikan yang selalu bergerak dinamis.⁴

D. Ruang Lingkup Sosiologi Pendidikan

Sebagai sebuah disiplin ilmu, upaya untuk mengkaji sosiologi pendidikan secara mendalam dan sungguh-sungguh dilakukan dengan cara bervariasi. Antara satu ahli dengan ahli yang lain berbeda. Pokok bahasan utama dalam sosiologi pendidikan adalah institusi pendidikan formal (sekolah). Selain itu, institusi pendidikan non formal dan informal juga merupakan fokus perhatian ahli sosiologi.

Menurut Katamto Sunarto yang dikutip oleh Ali Maksum, para ahli sosiologi pendidikan membagi pokok bahasan sosiologi pendidikan menjadi tiga bagian, antara lain sosiologi pendidikan makro, sosiologi pendidikan meso dan sosiologi pendidikan mikro.

1. **Sosiologi Pendidikan Makro.** Sosiologi pendidikan makro mempelajari hubungan antara pendidikan dengan institusi lain dalam suatu masyarakat. Misalnya: hubungan pendidikan dengan agama, sampai sejauh mana agama memberikan pengaruh terhadap institusi pendidikan

⁴ Ali Maksum, *Sosiologi Pendidikan* (Surabaya: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013), hlm. 10

(kurikulum pendidikan agama). Hubungan pendidikan dengan demokrasi, sejauh mana sekolah menjalankan perannya dalam proses demokratisasi masyarakat di sekolah. Hubungan pendidikan dengan ekonomi, sejauh mana pendidikan bisa memberikan kontribusi terhadap kebutuhan pasar tenaga kerja pada sebuah negara.

2. **Sosiologi Pendidikan Meso.** Sosiologi pendidikan yang memperelajari hubungan-hubungan dalam suatu organisasi pendidikan. Pada sosiologi pendidikan meso ini sekolah dilihat sebagai sebuah organisasi yang melaksanakan aturan tertentu sehingga bisa mencapai suatu tujuan. Diantaranya membahas tentang struktur sekolah, peranan dan fungsi organisasi sekolah serta hubungan organisasi sekolah dengan organisasi masyarakat.
3. **Sosiologi Pendidikan Mikro.** Sosiologi pendidikan mikro ini membahas mengenai interaksi sosial yang berlangsung dalam institusi pendidikan, misalnya pengelompokan yang terbentuk di kalangan mereka, sistem status, interaksi di dalam kelas, baik sesama siswa maupun siswa dengan guru.⁵

Berikut ini akan disajikan tabel ruang lingkup sosiologi pendidikan oleh beberapa tokoh, diharapkan pembaca lebih mudah untuk memahami dan membandingkan konsep satu tokoh dengan tokoh yang lainnya.

⁵ Ali Maksum, *Sosiologi...*, hlm. 11

Tokoh	Pendapat
Brookover	<ol style="list-style-type: none"> 1) Hubungan sistem pendidikan dengan sistem sosial lain 2) Buhungan sekolah dengan komunitas sekitar 3) Hubungan antar manusia dalam sistem pendidikan 4) Pengaruh sekolah terhadap perilaku anak didik
Vembriarto	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pendidikan ditinjau dari sudut orientasi sosial yang bersifat umum 2) Masalah proses sosialisasi anak 3) Kehidupan dan kebudayaan sekolah 4) Pendidikan ditinjau dari sudut hubungan antar probadi
Abu Ahmadi	Sosiologi pendidikan merupakan analisis ilmiah tentang proses-proses sosial dan pola-pola sosial yang berlangsung dalam sistem pendidikan

E. Pentingnya Mempelajari Sosiologi Pendidikan

Kegiatan pendidikan terkait erat dengan kehidupan masyarakat. Pendidikan diselenggarakan di tengah-tengah masyarakat. Sementara yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan adalah masyarakat. Untuk itu bisa dikatakan bahwa hubungan pendidikan dengan masyarakat itu seperti sebuah koin mata uang, di mana satu unsur tidak dapat menafikan unsur yang lain. Dalam kehidupan masyarakat modern, pendidikan merupakan kebutuhan pokok yang tidak bisa ditinggalkan atau ditunda. Tidak ada satupun manusia modern yang tidak membutuhkan pendidikan. Jika ada manusia yang tidak mengenyam pendidikan, bisa dipastikan kehidupannya akan ketinggalan zaman karena dampak perubahan sosial.

Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat bisa disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Supaya pendidikan tidak sampai kehilangan arah dan tujuan dalam menghadapi dampak perubahan sosial maka, dunia pendidikan diwajibkan untuk selalu mengkaji dan menganalisis faktor-faktor penyebab perubahan tersebut. Setelah itu pendidikan perlu mengembangkan dampak positifnya dan meminimalisir dampak negatifnya.

Berangkat dari alasan tersebut diatas, bagi calon guru, guru, dosen bahkan presiden, menteri, gubernur, wali kota/bupati dan segenap anggota masyarakat yang terkait dengan dunia pendidikan, perlu mengerti dan mempelajari sosiologi pendidikan. Menurut Ali Maksum, alasan mempelajari sosiologi pendidikan diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, pendidikan siap tidak siap harus mempersiapkan generasi yang sanggup untuk memasuki masyarakat berbasis pengetahuan. Jika pendidikan tidak mampu menghasilkan manusia yang sanggup memasuki masyarakat dengan berbagai karakternya maka, pendidikan dikatakan telah gagal dalam memberikan bekal kepada peserta didiknya. Untuk itulah seorang guru, dosen dan semua orang yang terlibat dalam dunia pendidikan harus bisa memberikan atau membekali siswa dengan pengetahuan yang memadai, kreatifitas dan pengalaman empiris sebagai bekal hidup secara profesional di tengah masyarakat pengetahuan. Di sinilah nilai signifikansi dunia pendidikan menggandeng jasa disiplin ilmu sosiologi.

Kedua, para praktisi pendidikan dapat merumuskan orientasi yang relevan dengan perubahan masyarakat pada satu sisi, pada sisi yang lain pendidikan tidak mengalami distorsi atau disorientasi masa depan. Praktik pendidikan bagaimanapun merupakan wadah untuk menumbuhkan tata

nilai kemanusiaan, tata nilai kehidupan masyarakat yang didorong prinsip keadilan dan kesejahteraan bersama. Masyarakat modern bagaimanapun sangat mungkin terdistorsi, termasuk institusi pendidikan menjadi institusi yang hanya mengabdikan kepada kepentingan kapitalis. Meminjam istilah Lyotard, pendidikan (pengetahuan) diproduksi untuk bisa dijual.⁶ Pendidikan bagaimanapun harus tetap menjaga nilai-nilai idealismenya, menjadi penyembuh masyarakat yang sakit, masyarakat yang terbelah, masyarakat yang tidak otentik.

Ketiga, pendidikan memerlukan disiplin ilmu sosiologi sebagai pisau analisis. Pendidikan tidak bisa dimaknai sebagai sebatas ritual untuk mempertinggi kapabilitas masyarakat dalam menghadapi *test score* ujian akhir nasional. Pendidikan harus menanggalkan kaca mata kuda yang masih dikenakannya. Pendidikan harus berinteraksi, berkomunikasi dan menyapa perkembangan dan dinamika lingkungan masyarakat tempatnya berada. Pendidikan harus memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa dunia selalu berubah dengan cepat.

Keempat, fungsi pendidikan sebagai "*agent of social change*", pada satu sisi, diharuskan memiliki fungsi transformasi, yaitu pendidikan menjadi jembatan emas untuk memajukan masyarakat supaya sejajar dengan dinamika perubahan. Institusi pendidikan diharuskan untuk dapat memberikan berbagai pengalaman kepada masyarakat baik ilmu, teknologi maupun keterampilan guna mengantisipasi masa depan. Pada sisi yang lain, pendidikan juga dituntut untuk mentransmisikan nilai-nilai luhur budaya bangsa terdahulu kepada generasi muda. Nilai-nilai

⁶ Jean-Francois Lyotard, *Kondisi (Era) Modern*, terj. Novella Parchiano (Jogjakarta: Panta Rhei Books, 2003), hlm.

luhur budaya tersebut misalnya struktur keluarga, agama, norma sosial dan falsafah hidup bangsa harus dipertahankan dan dilestarikan demi keutuhan dan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

F. Pendidikan dan Masyarakat

Pelaksanaan proses pendidikan dalam kenyataannya tidak dapat berdiri sendiri. Aktivitas pendidikan sangat terkait dengan pihak-pihak yang lain. Jika di dalam proses berbegara kita mengenal istilah trias politika, di dalam pendidikan kita mengenal istilah trilogi pendidikan, yaitu sekolah, keluarga dan masyarakat. Demi mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, ketiga unsur pendidikan tersebut harus saling bekerjasama, saling mendukung, dan saling melengkapi bukan justru sebaliknya malah saling menafikan.

Bisa dikatakan, pendidikan merupakan sebuah proses memanusiakan manusia secara sengaja dan berkesinambungan dalam mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi kehidupannya. Ketika pendidikan formal dilaksanakan di sekolah dengan guru sebagai fasilitator utama, masyarakat senantiasa mengalami perubahan mengikuti perkembangan zaman. Supaya pendidikan tidak hanyut/larut dalam perubahan masyarakat maka, pendidikan harus kritis dalam menanggapi setiap perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Kritis seperti dalam pengertian Habermas yang dikutip oleh Franz Magnis-Suseno bahwa kita harus ingat masa lampau, untuk hati-hati dalam menjalani kehidupan sekarang ini dan bijaksana dalam menentukan pilihan di masa yang akan datang.⁷

⁷ Farnz Magnis-Suseno, *Pijar-Pijar Filsafat: dari Gatholoco ke Filsafat Perempuan, dari Adam Muller ke Postmodernisme* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm. 175

1. Individu dan Masyarakat

Dalam teori disiplin ilmu sosiologi, individu merupakan unsur terkecil dari masyarakat yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Misalnya dalam sebuah keluarga yang merupakan kelompok terkecil dari masyarakat terdiri dari ayah, ibu dan anak. Ayah merupakan unsur terkecil yang tidak dapat dibagi lagi, demikian juga seorang ibu.

Banyak pakar telah memberikan definisi mengenai masyarakat. Misalnya, menurut R.M. MacIver dan Charles H. Page, masyarakat merupakan suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerjasama antar berbagai kelompok dan penggolongan, dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Sementara menurut Soejono, ciri-ciri masyarakat antara lain; a) manusia yang hidup secara bersama-sama di dalam satu lingkungan yang tidak ada ukuran mutlak maupun angka pasti untuk menentukan jumlah penduduk yang wajib ada, tetapi secara historis angka terkecilnya adalah minimal 2 orang yang hidup bersama; b) berbaur dalam waktu yang cukup lama; c) saling menyadari bahwa mereka merupakan satu-kesatuan; d) mereka adalah sebuah sistem hidup bersama. Dari sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan, disebabkan karena setiap individu merupakan anggota kelompok yang merasa dirinya terkait dengan yang lain.⁸

Dalam interaksi antara individu dengan masyarakat, terdapat beberapa pandangan yang menyatakan bahwa: a) masyarakat yang menentukan individu; b) individu yang menentukan masyarakat dan c) individu dan masyarakat saling menentukan.

⁸ Abdulsyani, *Sosiologi: Kelompok dan Masalah Sosial*, cet. 1 (Jakarta: Fajar Agung, 1987), hlm. 7

- a) Masyarakat yang menentukan individu. Pandangan seperti ini didasarkan kenyataan bahwa masyarakat memiliki realitasnya sendiri. Dalam pandangan yang pertama ini, yang utama adalah masyarakat sementara individu itu hidup untuk masyarakat. Masyarakat memiliki realitas tersendiri dan tidak terikat oleh unsur lain dan yang berlaku umum. Masyarakat yang difikirkan oleh seseorang itu berada di luar orang yang berfikir itu sendiri. Sebelum individu yang berfikir itu eksis, masyarakat telah ada sebelumnya. Oleh sebab itu masyarakat tidak terikat pada individu yang memikirkannya.
- b) Individu yang menentukan masyarakat. Pandangan ini terinspirasi dari paham individualisme. Dalam paham individualisme, kehidupan individu, kepentingan, kebutuhan dan tujuan individu lebih utama daripada kebutuhan dan kepentingan masyarakat/umum. Individu merupakan penentu corak/warna masyarakat. Keberadaan masyarakat bertujuan melayani kepentingan individu. Individu memiliki hak istimewa yang tidak boleh dilanggar oleh masyarakat atas nama apapun termasuk kepentingan umum.
- c) Individu dan masyarakat saling menentukan. Pandangan ini meyakini bahwa individu dan masyarakat itu simbiosis mutualisme. Paham ketiga ini melihat masyarakat sebagai proses, di mana manusia mengusahakan kehidupan bersama menurut pemahamannya dan bertanggung-jawab atas apa yang dihasilkan. Individu berada pada masyarakat bukan seperti burung dalam sangkar, melainkan ia berproses/bermasyarakat. Masyarakat bukan merupakan wadah, tetapi sebuah aksi, yaitu *social action*. Masyarakat terdiri dari sejumlah pengertian, perasaan, sikap dan tindakan yang tidak terhingga

jumlahnya. Orang saling berhubungan dengan satu dan yang lain menurut pola sikap dan perilaku tertentu, yang suka maupun tidak suka telah diterima oleh mereka. Pada umumnya, setiap individu akan menyesuaikan tindakan mereka dengan pola-pola tersebut. Jika tidak, hidup individu sebagai manusia menjadi tidak mungkin.

Hubungan individu-masyarakat merupakan ciptaan dan usaha manusia sendiri. Tanpa ada individu mustahil ada masyarakat, sebaliknya tidak mungkin ada individu tanpa ada masyarakat. Dalam relasi yang saling mempengaruhi dan menentukan tersebut, persoalan utamanya adalah bagaimana individu dalam masyarakat mengarahkan hidupnya menjadi lebih manusiawi? Di sinilah letak pentingnya peran pendidikan. Pendidikan sebagai wahana transmisi nilai-nilai budaya harus bisa memilah dan memilih yang terbaik untuk peserta didik. Sehingga diharapkan peserta didik setelah selesai mendapatkan pendidikan akan memberi dampak positif bagi masyarakat.

2. Pendidikan dan Lingkungan Sosial

Praktik pendidikan berkaitan dengan pengembangan pengetahuan, perilaku dan sikap peserta didik. Pendidikan terkait erat dengan transmisi pengetahuan, sikap, kepercayaan, keterampilan dan unsur-unsur psikologis lainnya kepada generasi muda. Pendidikan merupakan proses belajar-mengajar pola perilaku manusia menurut apa yang diharapkan oleh masyarakat.⁹

Menurut Nasution, hampir semua tindakan manusia bersifat sosial, artinya seluruh tingkah-laku yang dilakukan oleh manusia setiap hari dipelajari dalam relasi-interaksi

⁹ S. Nasution, *Sosiologi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 10

dengan manusia lainnya. Tidak ada tindakan manusia yang dilakukan tanpa meniru atau mengikuti tindakan manusia lainnya baik itu di rumah, sekolah, tempat umum, tempat kerja, di jalan raya dan sebagainya. Bahkan kurikulum atau materi pendidikan yang diberikan kepada peserta didik juga ditentukan oleh kelompok atau masyarakat tempat peserta didik tersebut menuntut ilmu.

Bagi masyarakat, keberadaan institusi pendidikan sangat penting artinya untuk kelangsungan dan proses kemajuan hidupnya. Supaya masyarakat dapat selalu eksis maka, kepada anggota yang masih muda harus ditanamkan nilai-nilai, pengetahuan, keterampilan dan norma perilaku lainnya. Dengan demikian, pelaksanaan proses pendidikan dapat dimaknai sebagai proses sosialisasi.¹⁰

Dalam praktiknya, pendidikan seperti yang diterangkan di atas sudah dimulai semenjak individu berinteraksi dengan lingkungan eksternal yang berada di luar dirinya. Seorang bayi yang baru lahir dengan tiada daya sangat membutuhkan belaian kasih sayang dari ibunya. Untuk bisa bertahan hidup ia membutuhkan air susu ibunya. Dalam proses selanjutnya, dikarenakan belum bisa berinteraksi dengan kompleks, seorang bayi jika merasa lapar, haus, basah (ngompol) dan sebagainya akan menangis. Dengan suara tangisan bayi, sang ibu menafsirkannya sebagai kebutuhan untuk mendapatkan air susu atau minta ganti popok maka, disusuilah atau diganti popoknya oleh sang ibu. Begitulah proses tersebut berlangsung selama bayi masih membutuhkan pertolongan intensif dari orang lain. Sampai pada saatnya, bayi tersebut mulai belajar untuk tengkurap, belajar untuk merangkak, belajar berdiri, belajar berjalan dan seterusnya. Ketika

¹⁰ S. Nasution, *Sosiologi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 10

menginjak usia anak-anak, bayi tersebut mulai belajar untuk mencoret-coret, belajar menggambar, belajar menulis, belajar membaca dsb.

Ilustrasi tersebut merupakan gambaran kecil dari siklus belajar individu di dalam masyarakat. Proses tersebut terus berlangsung sampai seorang individu menjadi dewasa dan meninggal dunia. Dengan demikian, ketika kita menjalankan hal-hal yang terdapat dalam benak kita, itu artinya kita melaksanakan kewajiban yang sudah ditentukan secara eksternal oleh hukum kodrat sosial. Sehingga pada akhirnya masyarakat telah menghasilkan ribuan bahkan jutaan manusia yang patuh dengan ketentuan-ketentuan kolektif masyarakat.

3. Fungsi Sekolah bagi Masyarakat

Secara mendasar sekolah bertugas untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang diperlukan seseorang agar ia dapat menapaki perjalanan kedewasaannya secara utuh dan tersalurkannya bakat-bakat potensial yang ia miliki. Dalam konteks sosial, Nasution memerinci fungsi sekolah bagi masyarakat, yakni:

a) Sekolah Mempersiapkan Seseorang Untuk Mendapat Suatu Pekerjaan

Anak yang menamatkan sekolah diharapkan sanggup melakukan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan dunia pekerjaan atau setidaknya mempunyai dasar untuk mencari nafkah. Makin tinggi pendidikan makin besar harapannya memperoleh pekerjaan yang layak dan memiliki prestise tinggi. Dengan ijazah yang tinggi seseorang dapat memahami dan menguasai pekerjaan, bekal kepemimpinan atau tugas lain yang dipercayakan kepadanya.

b) Sekolah Memberikan Keterampilan Dasar

Orang yang sudah bersekolah setidaknya-tidaknya pandai membaca, menulis, dan berhitung yang diperlukan dalam masyarakat modern. Selain itu diperoleh sejumlah pengetahuan lain seperti sejarah, geografi, kesehatan, kewarganegaraan, agama, bahasa, biologi, keterampilan teknis, dan lain-lain yang membekali anak untuk melanjutkan jenjang pendidikannya, atau sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja.

c) Sekolah Membuka Kesempatan Memperbaiki Nasib

Semenjak diterapkannya sistem persekolahan yang bisa dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat di seluruh penjuru tanah air maka secara otomatis telah mendobrak tembok ketimpangan sosial masyarakat feodal dan menggantinya dengan bentuk mobilitas terbuka. Sekolah menjadi tempat yang paling strategis untuk menyalurkan kebutuhan mobilitas vertikal dalam kerangka stratifikasi sosial masyarakat. Melalui pendidikan orang dari golongan rendah dapat meningkat ke golongan yang lebih tinggi. Banyak pemuda-pemuda yang berhasil menapaki jenjang karir hidupnya melalui sekolah meskipun memiliki latar belakang status yang tergolong rendah. Oleh karena itu orang tua berusaha menyekolahkan anaknya dengan harapan akan dapat memperoleh hasil yang memuaskan bagi peningkatan derajat dan status keluarga di kemudian hari.

d) Sekolah Menyediakan Tenaga Pembangunan

Bagi negara-negara berkembang, pendidikan dipandang menjadi alat yang paling ampuh untuk menyiapkan tenaga produktif guna menopang proses pembangunan. Kekayaan alam hanya mengandung arti bila

didukung oleh keahlian. Maka karena itu manusia merupakan sumber utama bagi negara. Masyarakat memiliki keyakinan kuat bahwa orang-orang terdidik begitu produktif dalam melaksanakan tugas pekerjaan, tanggap terhadap tuntutan keterampilan baru, serta mampu menunjukkan loyalitas yang lebih tinggi terhadap dunia pekerjaannya. Inilah salah satu bukti dari kiprah pendidikan di Indonesia pada waktu segenap rakyat dan lapisan masyarakat memiliki hajat besar untuk membangun negaranya.

e) Sekolah Mengajarkan Peran Sosial

Pendidikan diharapkan membentuk manusia sosial yang dapat bergaul dengansesama manusia sekalipun berbeda agama, suku bangsa, pendirian dan sebagainya. Ia juga harus dapat menyesuaikan diri dalam situasi sosial yang berbeda-beda. Kalau diselidiki, tentu akan ditemukan bermacam-macam alasan lain mengapa orang tua menyekolahkan anaknya. Misalkan menyekolahkan anak gadis sampai ada yang meminangnya, atau menyerahkan anaknya ke dalam pengawasan guru karena lebih sulit mengurusinya sendiri di rumah dan sebagainya.

f) Sebagai Alat Transmisi Kebudayaan

Fungsi transmisi kebudayaan masyarakat kepada anak menurut Vembriarto (1990) dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu (1) transmisi pengetahuan & keterampilan, dan (2) transmisi sikap, nilai-nilai dan norma-norma. Transmisi pengetahuan ini mencakup pengetahuan tentang bahasa, sistem matematika, pengetahuan alam dan sosial serta penemuan-penemuan teknologi. Dalam masyarakat industri yang kompleks, fungsi transmisi pengetahuan tersebut sangat penting sehingga proses

belajar di sekolah memakan waktu lebih lama, membutuhkan guru-guru dan lembaga yang khusus. Dalam arti sempit transmisi pengetahuan dan keterampilan itu berbentuk *vocational training*. Demi kelangsungan hidup bangsa dan negara, ditransmisikan nilai-nilai budaya luhur bangsa yang dijunjung tinggi penduduknya. Kepada generasi muda diwariskan pola perilaku, budaya, norma, dan nilai-nilai luhur, cinta tanah air, menghormati pahlawannya, setia kepada wilayah kedaulatan negara, dan menjaga rasa kesatuan dan persatuan bangsa.

g) Menciptakan Integrasi Sosial

Dalam masyarakat yang bersifat heterogen dan pluralistik, terjaminnya integrasi sosial merupakan fungsi pendidikan sekolah yang cukup penting. Masyarakat Indonesia mengenal bermacam-macam suku bangsa masing-masing dengan adat istiadatnya sendiri, bermacam-macam bahasa daerah, agama, pandangan politik dan lain sebagainya. Dalam keadaan demikian bahaya disintegrasi sosial sangat besar. Sebab itu tugas pendidikan sekolah yang terpenting adalah menjamin integrasi sosial.¹¹

4. Pendidikan dan Pembaharuan Masyarakat

Sebagian besar masyarakat modern memandang lembaga-lembaga pendidikan sebagai peranan kunci dalam mencapai tujuan sosial pemerintah bersama orang tua telah menyediakan anggaran pendidikan yang diperlukan secara besar-besaran untuk kemajuan sosial dan pembangunan bangsa, untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional yang berupa nilai-nilai luhur yang harus dilestarikan seperti rasa hormat kepada orang tua, kepada pemimpin kewajiban

¹¹ S. Nasution, *Sosiologi...*, hlm. 14-17

untuk mematuhi hukum-hukum dan norma-norma yang berlaku, jiwa patriotisme dan sebagainya.

Pendidikan juga diharapkan untuk memupuk rasa taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan kemajuan-kemajuan dan pembangunan politik, ekonomi, sosial dan pertahanan keamanan. Pendek kata pendidikan dapat diharapkan untuk mengembangkan wawasan anak terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan secara tepat dan benar, sehingga membawa kemajuan pada individu masyarakat dan negara untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Dalam kaitannya dengan peran pendidikan dalam masyarakat, di bawah ini disarikan dari buku Abdullah Idi, tentang fungsi pendidikan dalam masyarakat, yang mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut: (a) Fungsi sosialisasi, (b) Fungsi kontrol sosial, (c) Fungsi pelestarian budaya Masyarakat, (d) Fungsi latihan dan pengembangan tenaga kerja, (e) Fungsi seleksi dan alokasi, (f) Fungsi pendidikan dan perubahan sosial, (g) Fungsi reproduksi budaya, (h) Fungsi difusi kultural, (i) Fungsi peningkatan sosial, dan (j) Fungsi modifikasi sosial.

a) Fungsi Sosialisasi

Di dalam masyarakat pra industri, generasi baru belajar mengikuti pola perilaku generasi sebelumnya tidak melalui lembaga-lembaga sekolah seperti sekarang ini. Pada masyarakat pra industri tersebut anak belajar dengan jalan mengikuti atau melibatkan diri dalam aktivitas orang-orang yang telah lebih dewasa. Anak-anak mengamati apa yang mereka lakukan, kemudian menirunya dan anak-anak belajar dengan berbuat atau melakukan sesuatu sebagaimana dilakukan oleh orang-orang yang telah dewasa. Untuk keperluan tersebut anak-anak belajar bahasa atau

simbol-simbol yang berlaku pada generasi tua, menyesuaikan diri dengan nilai-nilai yang berlaku, mengikuti pandangannya dan memperoleh keterampilan-keterampilan tertentu yang semuanya diperoleh lewat budaya masyarakatnya. Di dalam situasi seperti itu semua orang dewasa adalah guru, tempat di mana anak-anak meniru, mengikuti dan berbuat seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang lebih dewasa. Mulai dari permulaan, anak-anak telah dibiasakan berbuat sebagaimana dilakukan oleh generasi yang lebih tua. Hal itu merupakan bagian dari perjuangan hidupnya. Segala sesuatu yang dipelajari adalah berguna dan berefek langsung bagi kehidupannya sehari-hari. Hal ini semua bisa terjadi oleh karena budaya yang berlaku di dalam masyarakat, di mana anak menjadi anggotanya, adalah bersifat stabil, tidak berubah dan waktu ke waktu, dan statis.

Dengan semakin majunya masyarakat, pola budaya menjadi lebih kompleks dan memiliki diferensiasi antara kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain, antara yang dianut oleh individu yang satu dengan individu yang lain. Dengan perkataan lain masyarakat tersebut telah mengalami perubahan-perubahan sosial. Ketentuan-ketentuan untuk berubah ini sebagaimana telah disinggung sebelumnya, mengakibatkan terjadinya setiap transmisi budaya dan satu generasi ke generasi berikutnya selalu menjumpai permasalahan-permasalahan. Di dalam suatu masyarakat sekolah telah melembaga demikian kuat, maka sekolah menjadi sangat diperlukan bagi upaya menciptakan/melahirkan nilai-nilai budaya baru (*cultural reproduction*).

Dengan berdasarkan pada proses reproduksi budaya tersebut, upaya mendidik anak-anak untuk mencintai dan menghormati tatanan lembaga sosial dan tradisi yang sudah

mapan adalah menjadi tugas dari sekolah. Termasuk di dalam lembaga-lembaga sosial tersebut di antaranya adalah keluarga, lembaga keagamaan, lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga ekonomi. Di dalam permulaan masa-masa pendidikannya, merupakan masa yang sangat penting bagi pembentukan dan pengembangan pengadopsian nilai-nilai ini. Masa-masa pembentukan dan pembangunan upaya pengadopsian ini dilakukan sebelum anak-anak mampu memiliki kemampuan kritik dan evaluasi secara rasional.

Sekolah-sekolah menjanjikan kepada anak-anak gambaran tentang apa yang dicita-citakan oleh lembaga-lembaga sosialnya. Anak-anak didorong, dibimbing dan diarahkan untuk mengikuti pola-pola perilaku orang-orang dewasa melalui cara-cara ritual tertentu, melalui drama, tarian, nyanyian dan sebagainya, yang semuanya itu merupakan wujud nyata dari budaya masyarakat yang berlaku. Melalui cara-cara seperti itu anak. Anak dibiasakan untuk berlaku sopan terhadap orang tua, hormat dan patuh terhadap norma-norma yang berlaku. Lembaga-lembaga agama mengajarkan bagaimana penganutnya berbakti kepada Tuhannya berdasarkan tata cara tertentu.

b) Fungsi kontrol sosial

Sekolah dalam menanamkan nilai-nilai dan loyalitas terhadap tatanan tradisional masyarakat harus juga berfungsi sebagai lembaga pelayanan sekolah untuk melakukan mekanisme kontrol sosial. Durheim menjelaskan bahwa pendidikan moral dapat dipergunakan untuk menahan atau mengurangi sifat-sifat egoisme pada anak-anak menjadi pribadi yang merupakan bagian masyarakat yang integral di mana anak harus memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial. Melalui pendidikan semacam ini individu mengadopsi nilai-nilai sosial dan melakukan

interaksi nilai-nilai tersebut dalam kehidupannya sehari-hari.

Selanjutnya sebagai individu sebagai anggota masyarakat ia juga dituntut untuk memberi dukungan dan berusaha untuk mempertahankan tatanan sosial yang berlaku. Sekolah sebagai lembaga yang berfungsi untuk mempertahankan dan mengembangkan tatanan-tatanan sosial serta kontrol sosial mempergunakan program-program asimilasi dan nilai-nilai subgrup beraneka ragam, ke dalam nilai-nilai yang dominan yang memiliki dan menjadi pola anutan bagi sebagian masyarakat.

Sekolah berfungsi untuk mempersatukan nilai-nilai dan pandangan hidup etnik yang beraneka ragam menjadi satu pandangan yang dapat diterima seluruh etnik. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa sekolah berfungsi sebagai alat pemersatu dan segala aliran dan pandangan hidup yang dianut oleh para siswa. Sebagai contoh sekolah di Indonesia, sekolah harus menanamkan nilai-nilai Pancasila yang dianut oleh bangsa dan negara Indonesia kepada anak-anak di sekolah.

c) Fungsi pelestarian budaya masyarakat

Sekolah di samping mempunyai tugas untuk mempersatu budaya-budaya etnik yang beraneka ragam juga harus melestarikan nilai-nilai budaya daerah yang masih layak dipertahankan seperti bahasa daerah, kesenian daerah, budi pekerti dan suatu upaya mendayagunakan sumber daya lokal bagi kepentingan sekolah dan sebagainya.

Fungsi sekolah berkaitan dengan konservasi nilai-nilai budaya daerah ini ada dua fungsi sekolah yaitu pertama sekolah digunakan sebagai salah satu lembaga masyarakat untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional masyarakat dari suatu masyarakat pada suatu daerah tertentu umpama

sekolah di Jawa Tengah, digunakan untuk mempertahankan nilai-nilai budaya Jawa Tengah, sekolah di Jawa Barat untuk mempertahankan nilai-nilai budaya Sunda, sekolah di Sumatera Barat untuk mempertahankan nilai-nilai budaya Minangkabau dan sebagainya dan kedua sekolah mempunyai tugas untuk mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa dengan mempersatukan nilai-nilai yang ada yang beragam demi kepentingan nasional.

Untuk memenuhi dua tuntutan itu maka perlu disusun kurikulum yang baku yang berlaku untuk semua daerah dan kurikulum yang disesuaikan dengan kondisi dan nilai-nilai daerah tertentu. Oleh karena itu sekolah harus menanamkan nilai-nilai yang dapat menjadikan anak itu menjadi yang mencintai daerahnya dan mencintai bangsa dan tanah airnya.

d) Fungsi seleksi, latihan dan pengembangan tenaga kerja

Jika kita amati apa yang terjadi dalam masyarakat dalam rangka menyiapkan tenaga kerja untuk suatu jabatan tertentu, maka di sana akan terjadi tiga kegiatan yaitu kegiatan, latihan untuk suatu jabatan, dan pengembangan tenaga kerja tertentu. Proses seleksi ini terjadi di segala bidang baik mau masuk sekolah maupun mau masuk pada jabatan tertentu. Untuk masuk sekolah tertentu harus mengikuti ujian tertentu, untuk masuk suatu jabatan tertentu harus mengikuti testing kecakapan tertentu. Sebagai contoh untuk dapat masuk pada suatu sekolah menengah tertentu harus menyerahkan nilai EBTA Murni (NEM). Nilai NEM yang masuk dipilih nilai NEM yang tinggi dari nilai tertentu sampai nilai yang terendah. Jika bukan nilai yang menjadi persyaratan yang ketat tetapi biaya sekolah yang tak terjangkau untuk masuk sekolah tertentu. Oleh karena itu anak yang nilainya rendah dan ekonominya

lemah tidak kebagian sekolah yang mutunya tinggi. Demikian pula untuk memangku jabatan pada pekerjaan tertentu, mereka yang diharuskan mengikuti seleksi dengan berbagai cara yang tujuannya untuk memperoleh tenaga kerja yang cakap dan terampil sesuai dengan jabatan yang akan dipangkunya.

Sekolah sebagai lembaga yang berfungsi untuk latihan dan pengembangan tenaga kerja mempunyai dua hal. Pertama sekolah digunakan untuk menyiapkan tenaga kerja profesional dalam bidang spesialisasi tertentu. Untuk memenuhi ini berbagai bidang studi dibuka untuk menyiapkan tenaga ahli dan terampil dan berkemampuan yang tinggi dalam bidangnya. Kedua dapat digunakan untuk memotivasi para pekerja agar memiliki tanggung jawab terhadap karir dan pekerjaan yang dipangkunya.

Sekolah mempunyai fungsi pengajaran, latihan dan pendidikan. Fungsi pengajaran untuk menyiapkan tenaga yang cakap dalam bidang keahlian yang ditekuninya. Fungsi latihan untuk mendapatkan tenaga yang terampil sesuai dengan bidangnya, sedang fungsi pendidikan untuk menyiapkan seorang pribadi yang baik untuk menjadi seorang pekerja sesuai dengan bidangnya. Jadi fungsi pendidikan ini merupakan pengembangan pribadi sosial.

e) Fungsi pendidikan dan perubahan sosial

Pendidikan mempunyai fungsi untuk mengadakan perubahan sosial mempunyai fungsi (1) melakukan reproduksi budaya, (2) difusi budaya, (3) mengembangkan analisis kultural terhadap kelembagaan-kelembagaan tradisional, (4) melakukan perubahan-perubahan atau modifikasi tingkat ekonomi sosial tradisional, dan (5) melakukan perubahan-perubahan yang lebih mendasar

terhadap institusi-institusi tradisional yang telah ketinggalan.

Sekolah berfungsi sebagai reproduksi budaya menempatkan sekolah sebagai pusat penelitian dan pengembangan. Fungsi semacam ini merupakan fungsi pada perguruan tinggi. Pada sekolah-sekolah yang lebih rendah, fungsi ini tidak setinggi pada tingkat pendidikan tinggi.

Pada masa-masa proses industrialisasi dan modernisasi pendidikan telah mengajarkan nilai-nilai serta kebiasaan-kebiasaan baru, seperti orientasi ekonomi, orientasi kemandirian, mekanisme kompetisi sehat, sikap kerja keras, kesadaran akan kehidupan keluarga kecil, di mana nilai-nilai tersebut semuanya sangat diperlukan bagi pembangunan ekonomi sosial suatu bangsa. Usaha-usaha sekolah untuk mengajarkan sistem nilai dan perspektif ilmiah dan rasional sebagai lawan dan nilai-nilai dan pandangan hidup lama, pasrah dan menyerah pada nasib, ketiadaan keberanian menanggung resiko, semua itu telah diajarkan oleh sekolah-sekolah sejak proses modernisasi dari perubahan sosial dengan menggunakan cara-cara berpikir ilmiah, cara-cara analisis dan pertimbangan-pertimbangan rasional serta kemampuan evaluasi yang kritis orang akan cenderung berpikir objektif dan lebih berhasil dalam menguasai alam sekitarnya.

Lembaga-lembaga pendidikan disamping berfungsi sebagai penghasil nilai-nilai budaya baru juga berfungsi sebagai penghasil nilai-nilai budaya baru juga berfungsi sebagai difusi budaya (*cultural diffusion*). Kebijakan-kebijaksanaan sosial yang kemudian diambil tentu berdasarkan pada hasil budaya dan difusi budaya. Sekolah-sekolah tersebut bukan hanya menyebarkan penemuan-penemuan dan informasi-informasi baru tetapi juga menanamkan sikap-sikap, nilai-nilai dan pandangan hidup

baru yang semuanya itu dapat memberikan kemudahan-kemudahan serta memberikan dorongan bagi terjadinya perubahan sosial yang berkelanjutan.

BAB III

MODAL SOSIAL-BUDAYA DALAM PENDIDIKAN

Modal sosial bersifat produktif, yang memungkinkan pencapaian beberapa tujuan yang tidak dapat dicapai tanpa keberadaannya. Seperti modal fisik dan modal manusia, modal sosial tidak sepenuhnya dapat ditukar, tetapi dapat ditukar terkait dengan aktivitas-aktivitas tertentu. Bentuk modal sosial tertentu yang bernilai untuk memudahkan beberapa tindakan bisa jadi tidak berguna atau merugikan orang lain. Tidak seperti bentuk modal lainnya, modal sosial melekat pada struktur relasi di antara orang dan di kalangan orang.

Modal sosial dan modal budaya mempunyai peran penting dalam proses pembangunan di Indonesia. Permasalahan pendidikan di Indonesia dapat dianalisis dalam dimensi struktur dan kultur. Dinamika dalam memahami kesenjangan relasi aktor dan struktur dapat dikaitkan dengan bagaimana eksistensi modal sosial, sedangkan dalam dimensi kultur dan reproduksi budaya dapat dikaitkan dengan kekuatan modal budaya yang dimiliki oleh masyarakat.

A. Konsep dan Makna Modal Sosial

Konsep modal sosial dibahas secara kritis dalam buku *“Social Capital of Theory”* yang ditulis oleh Yulia Hauberer. Secara konseptual modal sosial telah banyak dikaji oleh para ilmuwan sosial. Beberapa buku yang

mengkaji modal sosial sudah banyak dibaca dan dikritisi oleh berbagai disiplin ilmu, seperti ekonomi, manajemen, politik, pendidikan, dan pekerjaan sosial. Beberapa buku yang cukup dikenal dengan karyanya tentang modal sosial antara lain adalah: Pierre Bourdiue (1989) dengan karyanya "*Le capital social: Note provisoire*"; "*The Field of Cultural Production*" (2000),¹² "Robert D. Putnam (1993) "*The prosperous community: Social capital and public life*", Woolcock (1998), "*Social capital and economic development: Toward a theoretical synthesis and policy framework*", Nan Lin (2004) menulis "*Social capital: A Theory of social structure and action*", dan John Field (2005) dengan karyanya berjudul "*Social capital and life long learning*", "Modal Sosial".¹³ Hal ini membuktikan bahwa modal sosial merupakan kajian yang dinamis baik secara teoritis maupun aplikatif. Untuk memahami konsep-konsep pokok yang sudah dikembangkan oleh para ahli, maka bab ini akan memaparkan konsep pokok tentang modal sosial agar dapat dipahami adanya persamaan dan perbedaan para ahli dalam mengkaji modal sosial.

Dalam berbagai penelitian tentang prestasi pendidikan di lingkungan kumuh Amerika, Coleman menunjukkan bahwa modal sosial tidak terbatas pada mereka yang kuat, namun juga mempunyai manfaat riil bagi orang miskin dan komunitas yang terpinggirkan. Menurut Coleman, modal sosial mempresentasikan sumber daya karena hal ini melibatkan harapan akan resiprositas, dan melalui individu dimanapun sehingga jaringan yang lebih

¹² Pierre Bourdieu, *The Field of Cultural Production* (Cambridge: Polity Press, 2000), hlm. 15

¹³ John Field, *Modal Sosial* (Yogyakarta: Kreasi Wacan Offset, 2010), hlm. 30

luas yang hubungan-hubungannya diatur oleh tingginya tingkat kepercayaan dan nilai-nilai bersama.¹⁴

James Coleman memberikan batasan modal sosial sebagai seperangkat sumber daya yang menjadi sifat dalam hubungan keluarga dan organisasi sosial komunitas yang berguna bagi perkembangan kognitif atau sosial seorang anak dan remaja. Coleman mendeskripsikan bahwa modal sosial merupakan aspek dari struktur sosial serta memfasilitasi tindakan individu dalam struktur sosial. Coleman mengemukakan konsep modal sosial dalam konteks teori pilihan rasional. Ketergantungan sosial ada di antara para pelaku, karena mereka tertarik dalam suatu peristiwa dan sumber-sumber yang dikontrol oleh para pelaku lainnya untuk memaksimalkan manfaat melalui pilihan solusi rasional terbaik bagi mereka. Jika hubungan permanen seperti hubungan kekuasaan atau hubungan kepercayaan dibangun, menghasilkan tindakan pertukaran dan transfer kontrol.

Coleman memaknai modal sosial dari aspek fungsinya, bahwa modal sosial merupakan entitas tunggal, tetapi dari beberapa macam entitas yang mempunyai dua karakteristik umum: modal sosial itu terdiri atas beberapa struktur sosial dan memfasilitasi tindakan tertentu dari seseorang yang ada dalam struktur itu. Coleman mengemukakan konsep modal sosial dalam konteks teori pilihan rasional (*the rational choice theory*). Ketergantungan sosial ada di antara para pelaku, karena mereka tertarik dalam suatu peristiwa dan sumber-sumber yang dikontrol oleh para pelaku lainnya untuk memaksimalkan manfaat melalui pilihan solusi rasional terbaik bagi mereka. Jika hubungan permanen seperti hubungan kekuasaan atau

¹⁴ John Field, *Modal...*, hlm. 32

hubungan kepercayaan dibangun, menghasilkan tindakan pertukaran dan transfer kontrol.

Modal sosial itu bukan merupakan entitas tunggal, tetapi dari beberapa macam entitas yang mempunyai dua karakteristik umum: modal sosial itu terdiri atas beberapa aspek struktur sosial, dan memfasilitasi tindakan tertentu dari seseorang yang ada dalam struktur itu". Berdasarkan pandangan Coleman tersebut, menunjukkan bahwa modal sosial merupakan bagian dari struktur sosial yang mendukung tindakan-tindakan para aktor yang merupakan anggota dari struktur masyarakat.

Definisi modal sosial menjembatani individu dan kolektif. Coleman menjelaskan bahwa modal sosial sebagai 'aset modal individu', namun melihatnya terbangun dari 'sumber-sumber daya struktural sosial', yang terkait dengan dua elemen pokok yakni 'batas-batas aktual kewajiban yang harus dijalankan' dan 'level kejujuran lingkungan sosial'. Pada gilirannya bersifat spesifik menurut konteksnya, dan dibangun oleh struktur sosial termasuk faktor-faktor yang berpihak pada perkembangan modal sosial, seperti kedekatan jaringan atau kecenderungan budaya untuk meminta dan menawarkan bantuan dan faktor-faktor yang cenderung melemahkannya, seperti kemakmuran dan sistem kesejahteraan. Dalam konteks inilah, perspektif pilihan rasional aktor harus memilih menciptakan modal sosial ketika seharusnya mereka mengejar kepentingan pribadi mereka. Menurut Coleman, modal sosial tidak lahir karena aktor mengalkulasikan pilihan untuk berinvestasi di dalamnya, namun sebagai 'produk sampingan dari aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan lain'. Dengan

demikian, modal sosial harus diberlakukan sebagai barang umum dari pada barang pribadi.¹⁵

Modal sosial, sebagaimana bentuk modal lainnya, adalah produktif dan memfasilitasi pencapaian tujuan tertentu. Modal sosial itu dapat saling dipertukarkan (*fungible*) dengan kegiatankegiatan tertentu. Hal ini berarti bahwa bentuk modal sosial tertentu adalah sangat berguna dalam memfasilitasi tindakan tertentu, tetapi dapat juga membahayakan orang lain. Modal sosial itu tidak seperti modal yang lain, modal sosial itu inheren di dalam struktur hubungan-hubungan di antara orang-orang dan di antara individu-individu yang mempunyai karakteristik tidak dapat dipisahkan dari individu. Modal sosial itu diperoleh melalui perubahan-perubahan di dalam hubungan di antara orang-orang yang memfasilitasi tindakan. Modal sosial selalu ada unsur dalam struktur sosial yang mendukung tindakan aktor yang menjadi anggota dalam struktur. Modal sosial terjadi melalui perubahan dalam hubungan antara orang-orang yang memfasilitasi tindakan. Modal sosial tidak nyata sebagaimana modal fisik atau manusia. Modal sosial dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kesejahteraan. Dalam masyarakat dengan tingkat kesejahteraan cukup tinggi memberikan bantuan sosial, yang menurunkan ketergantungan pada orang lain, sehingga modal sosial tidak berkembang, sebagai contoh dampak negatif pada modal sosial.

Coleman membedakan jenis modal sosial dari aspek hubungan yang didasarkan pada rasa saling percaya dan otoritas. Kedua aspek menjadi dasar dalam membentuk jaringan keluarga dan organisasi sosial. Hubungan saling percaya merupakan aspek penting dalam membangun

¹⁵ John Field, *Modal...*, hlm. 41

kerjasama dengan lingkungan sosial dan jumlah kewajiban. Jumlah kewajiban ditentukan oleh faktor-faktor yang berbeda, misalnya kebutuhan, keberadaan sumber bantuan, dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Hubungan otoritas terkait dengan peran aktor yang harus melakukan hak kontrol dalam hubungan kerja. Dalam menjalin hubungan sosial membutuhkan informasi yang potensial. Dalam konteks inilah hubungan sosial mengandung potensi informasi atau kemampuan untuk menyediakan anggotanya dengan informasi yang berguna dalam proses maksimalisasi utilitas. Potensi informasi merupakan salah satu jenis modal sosial. Informasi memberikan dasar untuk tindakan, tetapi prolehan informasi membutuhkan biaya. Informasi dapat dikumpulkan dengan mudah melalui hubungan yang dipelihara.

Bourdieu menunjukkan bahwa modal sosial, jika diperlukan, dapat memberikan dukungan dan dapat digunakan untuk memproduksi dan mempertahankan kepercayaan. Menurut Coleman, modal sosial adalah beberapa aspek dari struktur sosial yang mendukung tindakan pelaku yang menyoroti bahwa tingkat tinggi modal sosial terutama manfaat perkembangan anak. Kedua konsep Bourdieu dan Coleman menjelajahi mikro fokus yang berbeda. Konsep Bourdieu bertujuan individu memperoleh manfaat melalui hubungan. Itu berarti modal sosial dipandang sebagai sumber daya individu. Analisis hubungan yang tidak dilembagakan bukan menjadi fokus kajian Bourdieu dan Coleman, akan tetapi tetap dimasukkan sebagai modal sosial, karena sebagian besar lembaga (misalnya: keluarga, pernikahan), diganti oleh berbagai aktivitas kehidupan seperti misalnya pasangan yang belum menikah; demikian halnya hubungan non-dilembagakan cenderung

dalam ikatan lemah yang juga memiliki sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu.

Robert D. Putnam terkenal sebagai pendukung modal sosial yang paling di kenal khalayak, karena kontribusi Putnam melampaui batas-batas bidang profesionalnya, yaitu ilmu politik dan menjangkau publik yang lebih luas. Putnam mengembangkan konsep modal sosial dari Coleman dengan mengembangkan ide pokoknya tentang jaringan sosial yang memiliki nilai penting bagi individu. Dalam hal ini modal fisik tetap ada dalam objek fisik, sedangkan modal manusia adalah milik individu dan melekat pada hubungan antarindividu yang membentuk jaringan sosial, norma timbal-balik dan kepercayaan. Putnam memberikan definisi ringkas modal social: *“by ‘Social capital’ I mean features of social life – networks, norms, and trust – that enable participants to act together more effectively to pursue shared objectives”*. Ketiga elemen tersebut-jaringan (*networks*), norma (*norms*), dan kepercayaan (*trust*) –adalah tri-tunggal yang mendominasi diskusi konseptual Putnam yang menekankan perbedaan modal social dengan modal-modal lainnya. Modal sosial merupakan bagian dari kehidupan sosial jaringan, norma, dan kepercayaan.¹⁶

Modal fisik mengacu kepada objek-objek fisik, dan model manusia mengacu kepada hak milik individu-individu. Sedangkan modal sosial mengacu kepada hubungan-hubungan di antara individu-individu – jaringan sosial dan norma-norma timbal balik serta kepercayaan yang timbul darinya. Dalam pengertian ini modal sosial juga berhubungan dengan apa yang disebut dengan kebijakan warga negara (*civic virtue*). Perbedaanya adalah bahwa modal sosial itu lebih menekankan kepada fakta bahwa

¹⁶ John Field, *Modal...*, hlm. 5

kebijakan warga negara itu lebih kuat ketika diikat oleh sebuah perasaan adanya jaringan hubungan sosial timbal balik. Masyarakat berbudi luhur tetapi individu-individunya terisolasi tidak memerlukan kekayaan modal social.

Ciri kehidupan sosial adalah modal sosial. Modal sosial memungkinkan masyarakat untuk bertindak bersama-sama lebih efektif untuk mencapai tujuan kolektif. Modal sosial seperti halnya dengan kebaikan umum dan memiliki hubungan dekat dengan partisipasi politik yang tergantung pada hubungan dengan lembaga-lembaga politik dan modal sosial tergantung pada hubungan antar manusia. Dengan kata lain, interaksi itu memungkinkan orang-orang membangun komunitas, mempunyai komitmen kepada mereka satu dengan lainnya, dan merajut struktur sosial. Rasa memiliki dan pengalaman nyata dalam jaringan sosial dapat memberikan keuntungan besar bagi masyarakat. Dalam karyanya yang terakhir, Putnam menekankan kepercayaan timbal balik (*trust of reciprocity*). Dalam hal ini Putnam mengemukakan bahwa orang-orang mempunyai tingkat kepercayaan tinggi, namun secara sosial tidak aktif atau bahkan antisosial. Akibatnya orang-orang dapat mempunyai alasan yang kuat untuk tidak percaya, tetapi ada juga yang membuat kontribusi besar untuk membangun modal sosial.

Kualitas sosial terkait dengan jaringan sosial yang bersifat timbal-balik. Modal sosial mengandung aspek individual dan kolektif. Individu menghasilkan hubungan yang mendukung kepentingan mereka sendiri, sedangkan aspek kolektif modal sosial akan menguntungkan pekerjaan dan negara. Hasil penelitian Putnam, membuktikan bahwa modal sosial dinilai penting bagi stabilitas, efektivitas pemerintahan dan pembangunan ekonomi daripada modal fisik dan manusia. Putnam menjelaskan adanya beberapa

elemen modal sosial antara lain: kepercayaan, jaringan dari ikatan umum, norma. Modal sosial tetap berlaku jika ada kepercayaan dalam hubungan. Kepercayaan adalah pelumas kehidupan. Semakin tinggi tingkat saling percaya dalam suatu komunitas, semakin tinggi kemungkinan terjalinnya kerjasama. Kepercayaan sosial dalam lingkungan modern dapat tumbuh dari dua sumber yang saling mengikat erat yaitu norma timbal-balik dan jaringan yang mengikat secara umum. Elemen kedua, jaringan dari ikatan umum, yang dikenalkan oleh Alexis de Tacqueville sebagai asosiasi yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat madani, yang di dalamnya mengembangkan hal-hal yang positif seperti solidaritas dan partisipasi antara warga dan bersosialisasi individu menjadi aktif sebagai anggota komunitas.

Jaringan sosial dibedakan jaringan formal dan informal, yang diawali dari keanggotaan resmi (misalnya dalam asosiasi), dan yang terakhir adalah membangun saling simpati (misalnya: persahabatan). Disamping itu, jaringan dapat disusun secara horisontal dan vertikal. Jaringan horisontal mempertemukan orang dari status dan kekuasaan yang sama, dan jaringan vertikal merupakan gabungan dari individu yang berbeda dan berada dalam hubungan yang tidak simetris dalam hirarkhi dan ketergantungan. Jaringan horisontal memfasilitasi komunikasi dan meningkatkan distribusi informasi tentang kepercayaan individu. Mereka memungkinkan melakukan meditasi dan peningkatan reputasi. Reputasi adalah esensi untuk kepercayaan dalam masyarakat yang kompleks. Jaringan vertikal tidak mampu mempertahankan kepercayaan sosial dan kerjasama, karena arus informasi vertikal umumnya kurang dapat diandalkan dibandingkan yang horisontal. Jaringan horisontal dan vertikal merupakan tipe ideal dari jaringan dan konsepsi jaringan riil dari kedua

jenis jaringan tersebut. Jaringan dari ikatan umum, seperti asosiasi lingkungan atau klub olahraga sebagai contohnya jaringan horisontal.

Norma sosial menciptakan kepercayaan sosial yang akan mengurangi biaya transaksi dan kemudahan dalam bekerja sama. Karakteristik yang paling penting dari norma-norma adalah adanya timbal-balik yang dapat terjadi secara seimbang/spesifik yang dapat terjadi dalam hubungan pertukaran yang berkelanjutan. Karakteristik modal sosial memiliki manfaat eksternal bagi seluruh masyarakat. Eksternalitas positif muncul, karena kewajiban bersama berlaku di jaringan sosial yang membantu untuk menghasilkan norma-norma sosial timbali-balik yang ketat, sebagai contohnya: tingkat kejahatan masyarakat lebih rendah, jika semakin tinggi hubungan sosial mendominasi. Dalam struktur ini, perilaku kriminal dapat dikarenakan sanksi secara efektif, karena semua orang tahu orang secara pribadi. Dalam hal inilah, eksternalitas harus mempertimbangkan fakta bahwa modal sosial tidak selalu positif.

Menurut Putnam, modal sosial terbentuk dari kepercayaan. Kepercayaan itu sendiri membangun sebuah perjanjian masyarakat melalui "*norma of reciprocity*" dan "*norma of civic engagement*". Modal sosial dibutuhkan dalam kegiatan sosial untuk tujuan individu. Artinya, aktor menyadari bahwa untuk mencapai tujuan, diperlukan pelestarian modal sosial yang didalamnya ada hubungan, norma dan kepercayaan yang terjadi pada situasi sosial tertentu. Sebagian besar modal sosial, seperti halnya kepercayaan adalah entitas moral yang mengikat. Semakin banyak orang percaya satu sama lain, saling percaya akan lebih mengikat satu sama lain. Dalam konteks inilah, dapat dipahami bahwa modal sosial dapat ditingkatkan dan

bersifat akumulatif. Putnam memberi tiga alasan tentang pentingnya modal sosial dalam kehidupan masyarakat: (1) Jaringan sosial memungkinkan adanya koordinasi dan komunikasi yang menumbuhkan saling percaya sesama anggota; (2) Kepercayaan berimplikasi positif dalam kehidupan masyarakat, yang dibuktikan melalui bagaimana orang-orang yang memiliki rasa saling percaya (*mutual trust*) dalam suatu jaringan sosial akan memperkuat norma dengan keharusan saling membantu; (3) Keberhasilan yang dicapai oleh jaringan sosial dalam waktu sebelumnya akan mendorong keberhasilan pada waktu-waktu yang akan datang.

Putnam membedakan dua jenis modal sosial. *Pertama*, modal *social bridging*. Modal *social bridging* membawa bersama-sama orang-orang yang sangat berbeda-beda. Modal sosial ini ditunjukkan pada orang-orang dari kelas sosial yang berbeda-beda. Modal *social bridging* dapat digunakan untuk menghubungkan sumber daya eksternal dan menjamin kelancaran arus informasi, dapat menciptakan identitas dan hubungan timbal balik yang bermacam-macam.. *Kedua*, modal *social bonding*. Modal *social bonding* menghubungkan orang-orang sedemikian rupa. Kelompok ini diarahkan ke dalam kelompok dan menuju kepada identitas eksklusif dan cenderung menguatkan homogenitas kelompok. Modal *social bonding* dapat membantu memobilisasi hubungan timbal balik dan solidaritas, dan dapat memperkuat identitas dan hubungan timbal balik. Mengenai kedua jenis modal tersebut itu, Aldridge, Halpern *et.al* (2002) menyatakan bahwa *bonding* adalah hubungan horisontal di antara orang-orang yang sama dalam masyarakat.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa modal sosial terjalin dalam setiap hubungan sosial,

baik yang bersifat vertikal maupun horisontal. Perbedaan hubungan sosial lebih pada kekuatan modal sosial, yang biasanya terkait dengan unsur-unsur modal sosial maupun nilai-nilai sosial yang masih melekat dalam kehidupan sosial. Kajian tentang cara mengukur keberadaan dan ketergantungan modal sosial telah ditentukan.

Nan Lin mengonseptualisasikan modal sosial sebagai entitas struktural. Nan Lin membedakan modal sosial dengan “ikatan kuat” dan “ikatan lemah”, secara sederhana perbedaan tersebut dideskripsikan sebagai berikut.¹⁷

Modal Sosial Dengan Ikatan Kuat	Modal Sosial Dengan Ikatan Lemah
<p data-bbox="150 843 544 1029">Ikatan kuat sebagai ikatan yang mengikuti prinsip “<i>homofili</i>”, mengikat orang yang mirip dengan dirinya sendiri.</p> <p data-bbox="150 1072 544 1298">Ikatan kuat menyatukan individu dan kelompok dengan sumber daya yang relative serupa, untuk menyatukan normatif dengan tujuan yang berbasis identitas (ekspresif)</p>	<p data-bbox="572 843 989 951">Ikatan yang lemah menyatukan orang-orang dari latar belakang sosial dan budaya berbeda.</p> <p data-bbox="572 1072 989 1420">Ikatan lemah mungkin lebih baik dalam melayani tujuan-tujuan instrumental karena dapat menyediakan akses bagi ragam baru sumber daya yang lebih sedikit mengandalkan nilai-nilai yang dipegang teguh secara bersama-sama (instrumental)</p>

¹⁷ Nan Lin, *Social Capital* (Australia: Cambridge University, 20014), hlm. 34

Menurut Lin yang dikutip oleh Hauberer, modal sosial merupakan modal diambil oleh hubungan sosial. Modal sosial merupakan semua 'sumber daya tertanam dalam struktur sosial yang diakses dan/atau dimobilisasi dalam tindakan purposive'.¹⁸ Definisi ini mencakup tiga aspek modal sosial yakni ; sumber daya yang tertanam dalam struktur sosial (melekatnya), mereka diakses oleh individu (aksesibilitas) dan individu menggunakan atau memobilisasi mereka dalam tindakan secara purposif (penggunaan). Lin mengasumsikan bahwa modal sosial memfasilitasi tindakan purposif individu. Modal sosial sebagai sumber daya yang tertanam dalam hubungan sosial. Modal sosial memberikan pemasukan dengan menciptakan prasyarat bagi kerjasama dan resiprositas. Lin menyatakan bahwa ada sejumlah mekanisme sentral yang mengarah pada hasil ini, termasuk: (1) informasi, (2) pengaruh melalui perantara, (3) konfirmasi atas keterpercayaan, dan (4) ditegakkannya janji dan komitmen.¹⁹

B. Unsur Modal Sosial

Menurut Hasbullah (2006: 9 – 16), unsur-unsur pokok modal sosial adalah : 1) partisipasi dalam suatu jaringan, 2) imbal balik (*reciprocity*), 3) kepercayaan (*trust*), 4) norma-norma sosial, 5) nilai-nilai dan 6) tindakan yang proaktif.²⁰ Penjelasan masing-masing unsur secara ringkas adalah:

Unsur modal sosial	Deskripsi
Partisipasi dalam suatu	Kemampuan orang atau individu atau anggota-anggota komunitas

¹⁸ Juia Hauberer, *Social Capital Theory* (...: VS Reseach, 2011), hlm. 124

¹⁹ Nan Lin, *Social...*, hlm. 114

²⁰ Jousairi Hasbullah, *Social Capital* (Jakarta: M-R United Press, 2006), hlm. 9-15

<p>jaringan</p>	<p>untuk melibatkan diri dalam suatu jaringan hubungan sosial merupakan salah satu kunci keberhasilan untuk membangun modal sosial.</p>
<p>Hubungan Timbal Balik (<i>Reciprocity</i>)</p>	<p>Modal sosial selalu diwarnai oleh kecenderungan saling bertukar kebaikan di antara individu-individu yang menjadi bagian atau anggota jaringan. Hubungan timbal balik ini juga dapat diasumsikan sebagai saling melengkapi dan saling mendukung satu sama lain. Modal sosial tidak hanya didapati pada kelompokkelompok masyarakat yang sudah maju atau mapan.</p>
<p>Rasa Percaya (<i>Trust</i>)</p>	<p>Rasa percaya adalah suatu bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan-hubungan sosial yang didasari perasaan yakin bahwa orang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan selalu bertindak dalam suatu pola yang saling mendukung. Rasa percaya menjadi pilar kekuatan dalam modal sosial. Rasa percaya dapat membuat orang bertindak sebagaimana yang diarahkan oleh orang lain karena ia meyakini bahwa tindakan yang disarankan</p>

	orang lain tersebut merupakan salah satu bentuk pembuktian kepercayaan yang diberikan kepadanya.
Norma Sosial	Norma-norma sosial merupakan seperangkat aturan tertulis dan tidak tertulis yang disepakati oleh anggota-anggota suatu komunitas untuk mengontrol tingkah laku semua anggota dalam komunitas tersebut. Norma sosial berlaku kolektif.
Nilai-nilai	Nilai adalah suatu ide yang dianggap benar dan penting oleh anggota komunitas dan diwariskan secara turun-temurun. Nilai-nilai tersebut antara lain mengenai etos kerja (kerja keras), harmoni (keselarasan), kompetisi dan prestasi. Selain sebagai ide, nilai-nilai juga menjadi motor penggerak bagi anggota-anggota komunitas.
Tindakan proaktif	Keinginan yang kuat dari anggota kelompok untuk terlibat dan melakukan tindakan bagi kelompoknya adalah salah satu unsur yang penting dalam modal sosial. Tindakan yang proaktif tidak terbatas pada partisipasi dalam artian kehadiran dan menjadi bagian kelompok tetapi lebih berupa kontribusi nyata

	<p>dalam berbagai bentuk. Tindakan proaktif dalam konteks modal sosial dilakukan oleh anggota tidak sematamata untuk menambah kekayaan secara materi melainkan untuk memperkaya hubungan kekerabatan, meningkatkan intensitas kekerabatan serta mewujudkan tujuan dan harapan bersama.</p>
--	--

C. Konsep Modal Budaya

Modal diperoleh melalui proses belajar yang membutuhkan waktu dan kerja keras. Sebagaimana dijelaskan oleh Bourdieu dalam artikelnya yang berjudul *The Form of Capital*, modal merupakan akumulasi dari kerja atau karya. Dalam contoh sebelumnya, kemampuan menulis yang disadari sebagai modal tidak bisa diperoleh secara langsung dan otomatis, diperlukan kerja dan usaha yang terus menerus. Bourdieu mengatakan bahwa diperlukan waktu untuk mengumpulkan modal dan merupakan kemampuan potensial untuk menghasilkan keuntungan dan memproduksi dirinya dalam bentuk yang sama atau yang dikembangkan bentuknya dan mempunyai kecenderungan untuk muncul dalam setiap benda. Maka, orang tidak akan bisa meningkatkan modal tanpa banyak upaya dan dalam waktu yang singkat.

Modal budaya merupakan akses penting dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Lareau & Weininger: modal sebagai *one that provides access to scarce rewards, is subjected to monopolization, and, under certain conditions, may be transmitted from one generation to the*

next atau sesuatu yang menyediakan akses untuk menghasilkan upah, yang bisa menyebabkan monopoli, dan dalam keadaan tertentu bisa diberikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian, modal selalu berorientasi dengan lama waktu perolehan dan daya upaya dari agensi untuk mendapatkannya. Dengan modal yang besar, seseorang akan mempunyai banyak akses untuk mendapatkan lebih banyak hasil, seseorang bisa juga memonopoli sesuatu dan menurunkan modal untuk keluarganya. Salah satu contohnya adalah seorang anak yang belajar membuat patung dari ayahnya yang merupakan pematung hebat, setiap hari ia bergelut dengan berlatih dan membuat patung. Suatu saat ia akan menjadi pematung yang hebat juga dan akan menghasilkan banyak dari karyanya. Selain itu ia juga bisa menurunkan keahliannya kepada anak-anaknya.

Modal budaya mempunyai peran penting dalam kajian masalah pendidikan. Pada tahun 1960-an Bourdieu mencoba membuat terobosan baru dengan menteorikan masalah pendidikan tidak hanya dengan dasar paedagogis dan psikologis tetapi dengan menggunakan dasar sosiologis dan antropologis. Menurut Bourdieu sebagaimana dikatakan Haryatmoko, masalah pendidikan tidak hanya bertumpu pada masalah proses belajar-mengajar beserta kurikulumnya dan evaluasi kemampuan menyerap materi yang diajarkan tetapi juga harus dipahami bahwa peserta didik mempunyai kesempatan yang berbeda, baik karena perbedaan ekonomi atau sosial budaya. Selain itu, kelas dan sekolah adalah sebuah sistem sosial dan sistem ini sangat berpengaruh pada apa yang akan dicapai, proses pencapaiannya dan hasil pencapaiannya. Oleh karena itu, sebab itu unsur budaya menjadi sangat penting karena pendidikan disadari sebagai proses pembudayaan.

Kesadaran akan besarnya peran sosiologi dan antropologi ini memunculkan teori modal budaya atau kapital budaya.

Modal budaya adalah satu konsep sosiologi yang dikenalkan oleh Pierre Bourdieu. Bourdieu dan Jean-Claude Passeron pertama kali menggunakan istilah dalam "*Cultural Reproduction* dan *Social Reproduction*" (1973). Pierre Bourdieu (1930-2002) pada awalnya menghasilkan karya-karya yang memaparkan sejumlah pengaruh teoritis, termasuk fungsionalisme, strukturalisme dan eksistensialisme, terutama pengaruh Jean Paul Sartre dan Louis Althusser. Pada tahun 60-an ia mulai mengolah pandangan-pandangan tersebut dan membangun suatu teori tentang model masyarakat. Bourdieu menganalisis bagaimana sekolah telah menyumbang kepada reproduksi kelas sosial. Ketidaksamaan sosial telah dipindahkan dari satu generasi kepada generasi yang lain.

Bourdieu seorang sosiolog yang sangat bergaya Eropa, yang tertarik pada adanya kelas sosial dan bentuk-bentuk ketimpangan di semua bidang. Pada awalnya, gagasannya menciptakan antropologi budaya reproduksi sosial tentang suku-suku di Aljazair selama 1960-an. Bourdieu menggambarkan perkembangan dinamis struktur nilai dan cara berpikir yang membentuk apa yang disebut dengan 'habitus', yang menjadi jembatan antara agensi subjektif dengan objektif. Habitus adalah produk sejarah yang terbentuk sejak manusia lahir dan berinteraksi dengan masyarakat dalam ruang dan waktu tertentu. Habitus merupakan hasil pembelajaran lewat pengasuhan, aktivitas bermain, dan juga pendidikan masyarakat dalam arti yang luas. Pembelajaran terjadi secara halus, tak disadari dan tampil sebagai hal wajar, sehingga seolah-olah sesuatu alamiah, seakan-akan terlebih oleh alam atau sudah dari sananya. Habitus mencakup pengetahuan dan pemahaman

seseorang tentang dunia, yang memberikan kontribusi terdiri pada realitas dunia. Oleh sebab itu, pengetahuan seseorang memiliki kekuasaan konstitutif (kemampuan menciptakan bentuk realitas dunia 'real'). Habitus tidak pernah 'tak berubah', baik melalui waktu untuk seorang individu, maupun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bourdieu beranggapan bahwa habitus berubah-ubah pada tiap urutan atau perulangan peristiwa ke suatu arah yang kompromi dengan kondisi-kondisi material.

Menurut Bourdieu, modal budaya dibagi menjadi tiga macam atau jenis, yaitu modal budaya yang *embodied* (modal budaya yang terinternalisasi), *objectified* (modal yang diwujudkan dalam benda), dan modal budaya yang *institutionalized* (modal budaya yang diinstitutionalisasi). Ada juga yang mengatakan bahwa modal budaya bisa diklasifikasi ke dalam tiga bagian yaitu *embodied dispositions* atau warisan yang sudah menyatu, *cultural good* (benda-benda budaya), dan *education qualifications* (kualifikasi pendidikan). Pembagiannya didasarkan pada pengelompokan budaya sebagai benda atau sesuatu yang menyatu dengan manusianya. Modal budaya yang berupa benda dibedakan dengan dasar apakah berupa benda yang berkaitan dengan budaya dan hasil budaya atau benda berupa bukti suatu kemampuan atau keterampilan tertentu.

Jenis yang pertama adalah modal budaya yang terinternalisasi dalam diri orangnya yaitu yang berupa cita rasa budaya seseorang, tradisi-tradisi, norma-norma dan tidak bisa dipisahkan dengan pembawanya. Ketika seseorang mati ia tidak bisa menyerahkan modal yang sudah menyatu dengan dirinya kepada orang lain. Modal budaya yang manunggal ini tidak bisa diakumulasikan melebihi kapasitas seseorang dan surut ataupun mati bersama pembawanya. Kalau kemampuan biologisnya menurun,

misalnya memorinya menurun maka modalnya juga berkurang kalau biologisnya meninggal modal tersebut juga hilang dengan sendirinya. Hal ini dimaknai bahwa perlu waktu yang panjang untuk mewarisi dan menguasai budaya yang manunggal ini. Bourdieu menuliskan *..in the form of long lasting disposition of the mind and body....*²¹Badan dan pikiran terlibat dalam proses pewarisannya. Akumulasi modal budaya yang manunggal misalnya dalam bentuk budaya, pengolahan, *bildung*, prasarat terjadinya manunggalan, inkorporasi (memasukkan dalam grup atau sistem), dimana semuanya ini mengimplikasikan proses penanaman dan asimilasi, pengorbanan waktu, waktu yang harus diinvestasikan secara individual oleh investornya sendiri.

Modal budaya dapat diukur dari berbagai aspek. Dari beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh DiMaggio (1982) dan DiMaggio dan Mohr (1985) mengukur sikap, aktivitas dan informasi yang berkaitan dengan budaya. Robinson dan Garnier (1985) mengukur kemampuan dan pengalaman pendidikan. Selain itu mereka juga mengukur kebiasaan kerja, penampilan, kemampuan dasar, konsumsi budaya dan cita rasa. Berdasarkan hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa unsur-unsur yang terkait dengan modal budaya diperlukan untuk memperbaiki mutu pendidikan.

Jenis yang kedua adalah modal yang diwujudkan benda (*objectified cultural capital*). Benda-benda ini merupakan perwujudan dari modal yang menyatu dan merupakan realisasi dari teori-teori yang dimiliki seseorang *..in the form of cultural goods, which are the trace or*

²¹ Pierre Bourdieu, *Outline of a Theory of Practice* (Cambridge: The University Press, 1977), hlm. 47

realization of theories.... Seseorang yang percaya bahwa bahasa Inggris itu sangat berguna bisa jadi akan memiliki beberapa benda yang berkaitan dengan kepercayaannya itu, misalnya kamus, novel-novel berbahasa Inggris, film-film berbahasa Inggris dan lain-lain. Selain itu, modal ini juga bisa berupa benda yang dihasilkan seseorang dalam rangka beraktivitas budaya, misalnya lukisan, puisi, buku, desain rumah dan lain-lain. Benda-benda ini bisa dipindahtanggankan kepada orang lain secara langsung. Pendapat tersebut membuktikan bahwa dalam jenis modal budaya sangat terkait dengan kebutuhan untuk proses pendidikan, modal budaya diperlukan untuk mendukung proses pendidikan dalam berjalan lebih lancar dan lebih efektif, seperti halnya ada buku-buku sangat dibutuhkan dalam kegiatan belajar. Persoalan kualitas buku yang perlu untuk dikaji agar hasilnya benar-benar memberikan manfaat bagi pengembangan potensi siswa.

Jenis ketiga adalah modal budaya yang bersifat akademis, karena berupa sertifikat atau surat keterangan yang menandakan dan memberi jaminan bahwa seseorang mempunyai pengetahuan dan atau kemampuan tertentu. Sifatnya memberi garansi akan pengetahuan dan kemampuan seseorang. Misalnya, ijazah Dokter yang diberikan seseorang memberikan garansi bahwa pemilik ijazah tersebut menjadi modal penting untuk berhak mengobati orang sakit. Meskipun jenis yang ketiga berupa benda tetapi dipisahkan dari jenis yang kedua karena menunjukkan kualifikasi pendidikan atau ketrampilan seseorang dan dibuat oleh institusi tertentu. Selain itu kepentingan untuk menggolongkan jenis ketiga ini adalah untuk membedakan keterampilan yang diperoleh dari proses pendidikan dan pelatihan dari keterampilan yang

diperoleh secara belajar mandiri atau autodidak ..*makes the difference between the capital of the autodidact.*

Kajian tentang modal budaya dapat dipahami dari beberapa konsep pokok yakni tentang habitus. Habitus adalah “struktur-struktur atau kognitif” melalui mana orang berurusan dengan dunia sosial. Orang dikarunia dengan serangkaian skema yang diinternalisasikan melalui itu mereka merasakan, mengerti, mengapresiasi, dan mengevaluasi dunia sosial. Melalui skemaskema demikianlah orang menghasilkan praktik-praktik mereka maupun merasakan dan mengevaluasinya. Secara dialektis, habitus adalah produk internalisasi struktur-struktur dunia sosial. Habitus adalah produk sejarah, sesuai dengan skema praktik individu dan kolektif, dan karenanya sejarah, sesuai dengan skema-skema oleh sejarah.

Bagi Bourdieu, modal memiliki definisi yang sangat luas dan mencakup hal-hal material (yang dapat memiliki nilai simbolik) dan berbagai atribut ‘yang tak tersentuh’, namun memiliki signifikansi secara kultural, misalnya: pretise, status, dan orotitas (yang dirujuk sebagai modal simbolik) serta modal budaya (Harker, 1990: 13-16). Modal budaya dapat mencakup rentangan luas properti, seperti seni, pendidikan, dan bentuk-bentuk bahasa. Modal berperan sebagai sebuah relasi sosial yang terdapat di dalam suatu sistem pertukaraan, dan istilah ini diperluas ‘pada segala bentuk barang-baik material maupun simbol, tanpa perbedaan-yang mempresentasikan dirinya sebagai sesuatu yang jarang dan layak untuk dicari dalam sebuah formasi sosial tertentu.

Modal budaya adalah berbentuk simbolik tidak seperti modal ekonomi yang berbentuk material. Oleh itu ilmu pengetahuan adalah modal budaya. Modal budaya mempunyai tiga subjenis yaitu “*embodied*”, “*objectified*” and

"institutionalized". Modal budaya *"embodied"* dibagikan kepada secara sadar diperoleh dan secara pasif diwarisi sifat-sifat diri sendiri. Modal budaya tidak berpindah serta-merta seperti hadiah atau wasiat, sebaliknya, ia diperoleh dari masa ke masa. Sebagai contoh ialah modal bahasa. Modal bahasa sebagai satu penguasaan dan kaitan dengan bahasa. Modal bahasa dianggap sebagai satu bentuk modal budaya *'embodied'* karena kemahiran berkomunikasi diperoleh seseorang karena melakuna proses interaksi sosial dengan masyarakat dimana seseorang menjalani proses kehidupannya.

Modal budaya *"objectified"* terdiri atas pada benda-benda fisik yang dimiliki, sebagai contohnya peralatan saintifik atau karya-karya seni. Barang-barang budaya ini boleh dipindahkan secara keuntungan ekonomi, misalnya dengan membeli atau menjual dengan dengan tujuan keuntungan sesuai dengan kesanggupan orang lain untuk membayarnya dan bagi maksud *"simbolik"*. Contohnya, seseorang itu dikatakan boleh memiliki modal budaya *"objectified"* dengan memiliki lukisan manakala seseorang itu boleh menggunakan lukisan hanya jika seseorang itu mempunyai asas yang betul tentang konsep modal budaya sebelumnya.

Modal budaya *"institutionalized"* terkait dengan instusi yang memberikan modal budaya pada seseorang di dalam bentuk bentuk kelayakan akademik. Konsep ini memainkan peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat modern, karena dengan modal budaya seseorang dapat dinilai kedudukannya secara kualitatif dan kuantitatif. Hal ini yang mendasari bahwa sekolah atau lembaga pendidikan mempunyai peran yang strategis untuk membangun dan mengembangkan modal budaya. Dalam konteks inilah, analisis kerja Bourdieu menjadi landasan

pokok dalam memahami tentang peran latar belakang sosial siswa akan menentukan keberhasilan dalam meraih kesuksesan dalam belajar, artinya siswa yang memiliki latar belakang sosial tertentu mempunyai pengaruh dalam sukses studi.

BAB IV

KEKERASAN SIMBOLIK DAN MADRASAH

A. Kekerasan Simbolik

Bourdieu merupakan sosiolog yang pemikirannya banyak diwarnai ide-ide filosofis. Berikut ini beberapa konsep-konsep yang nantinya sangat bermanfaat untuk menjelaskan makna kekerasan simbolik.

1. Modal

Bourdieu memaknai modal bukan hanya dimaknai modal semata-mata sebagai modal yang berbentuk materi, melainkan modal merupakan sebuah hasil kerja yang terakumulasi (dalam bentuk yang “terbendakan” atau bersifat “menumbuh” -terjiwai dalam diri seseorang). Bourdieu menyebut istilah modal sosial (*social capital*), modal budaya (*cultural capital*), modal simbolik (*symbolic capital*).²² Modal sosial menunjuk pada sekumpulan sumberdaya yang aktual atau potensial yang terkait dengan pemilikan jaringan hubungan saling mengenal dan/atau saling mengakui yang memberi anggotanya dukungan modal yang dimiliki bersama.

Modal sosial dapat diwujudkan dalam bentuk praktis seperti pertemanan, dan bentuk terlembagakan terwujud dalam keanggotaan kelompok yang relatif terikat seperti

²² Nanang Martono, *Kekerasan Simbolik di Sekolah Sebuah Ide Sosiologi Pendidikan Piere Bourdieu* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hal.32

keluarga, suku, sekolah. Modal budaya merujuk pada serangkaian kemampuan atau keahlian individu, termasuk di dalamnya adalah sikap, cara bertutur kata, berpenampilan, cara bergaul, dan sebagainya. Modal simbolik merupakan sebuah bentuk modal yang berasal dari jenis yang lain, yang disalah-kenali bukan sebagai modal yang semena, melainkan dikenali dan diatur sebagai sesuatu yang sah dan natural. Modal simbolik ini berupa pemilihan tempat tinggal, pemilihan tempat wisata, hobi, tempat makan, dan sebagainya. Menurut Bourdieu modal simbolik merupakan sumber kekuasaan yang krusial.

2. Kelas

Secara khusus Bourdieu mendefinisikan kelas sebagai kumpulan agen atau aktor yang menduduki posisi-posisi serupa dan ditempatkan dalam kondisi serupa serta ditundukkan atau diarahkan pada pengondisian yang serupa. Menurut Bourdieu setiap kelas memiliki sikap, selera, kebiasaan, perilaku atau bahkan modal yang berbeda. Bourdieu membedakan kelas menjadi tiga. Perbedaan ini sekali lagi didasarkan pada faktor pemilihan modal tadi. Pertama, kelas dominan, yang ditandai oleh pemilikan modal yang cukup besar. Individu dalam kelas ini mampu mengakumulasikan berbagai modal dan secara jelas mampu membedakan dirinya dengan orang lain untuk menunjukkan identitasnya. Kelas dominan juga mampu memaksakan identitasnya kepada kelas lain. Kedua, kelas borjuasi kecil. Mereka diposisikan ke dalam kelas ini karena memiliki kesamaan sifat dengan kaum borjuasi, yaitu mereka memiliki keinginan untuk menaiki tangga sosial, akan tetapi mereka menempati kelas menengah dalam struktur masyarakat. Mereka dapat dikatakan akan lebih banyak melakukan imitasi terhadap kelas dominan. Ketiga, kelas

populer. Kelas ini merupakan kelas yang hampir tidak memiliki modal, baik modal ekonomi, modal budaya maupun modal simbolik. Mereka berada pada posisi yang cenderung menerima dominasi kelas dominan, mereka cenderung menerima apa saja yang dipaksakan kelas dominan.²³

3. Habitus

Konsep habitus bukanlah konsep yang diciptakan Bourdieu. Bourdieu hanya memperluas kembali konsep habitus yang dikemukakan Marcel Mauss, Norbert Elias, Max Weber, Durkheim, Hegel, dan Edmund Husserl dengan istilah yang berbeda namun memiliki makna yang sama. Bourdieu merumuskan konsep habitus sebagai analisis sosiologis dan filsafati atas perilaku manusia. Dalam arti ini, habitus adalah nilai-nilai sosial yang dihayati oleh manusia, dan tercipta melalui proses sosialisasi nilai-nilai yang berlangsung lama, sehingga mengendap menjadi cara berpikir dan pola perilaku yang menetap di dalam diri manusia tersebut. Habitus seseorang begitu kuat, sampai mempengaruhi tubuh fisiknya. Habitus yang sudah begitu kuat tertanam serta mengendap menjadi perilaku fisik disebutnya sebagai Hexis. Pada awalnya, habitus diistilahkan dengan hexis, kemudian diterjemahkan Thomas Aquinas ke dalam bahasa Latin dengan istilah habitus.²⁴ Habitus juga dapat dirumuskan sebagai sebuah sistem disposisi-disposisi (skema-skema persepsi pikiran, dan tindakan yang diperoleh dan bertahan lama). Habitus juga merupakan gaya hidup (*lifestyle*), nilai-nilai (*values*), watak (*dispositions*), dan

²³ Haryatmoko, *Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa* (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hal. 11-12

²⁴ Haralambos and Holdborn, *Sociology: Themes and Perspectives 6th Edition* (London: Harper Collins Publisher, 2004)

harapan (*expectation*) kelompok sosial tertentu. Sebagian habitus dikembangkan melalui pengalaman. Teori Bourdieu lahir dijiwai oleh keinginannya untuk memadukan semangat antara objektivisme dan subjektivisme. Dalam aliran pemikiran objektivisme, terlalu menekankan pada peranan struktur yang menentukan aktor dan lingkungan sosialnya, disini kaum objektivisme lebih melihat secara makro atau biasa disebut dengan aliran strukturalis seperti Durkheim, Marx, Saussure dan lainnya. Di sisi lain, pemikiran subjektivisme lebih melihat pada sisi mikro, yaitu menekankan pada tindakan aktor dalam analisisnya, tokoh subjektivisme misalnya seperti Weber, Sartre, dan lainnya. Bourdieu menentang kedua pemikiran ini dan ingin menggabungkan diantara keduanya. Karena menurut Bourdieu, tidak semua hal dipengaruhi secara mutlak atau dominan oleh struktur maupun oleh aktor, tetapi ada pengaruh timbal balik dari keduanya. Sehingga Bourdieu berusaha untuk membuat hubungan dialektik antara struktur objektivisme dan fenomena subjektivisme. Untuk menggambarkan perhatian Bourdieu terhadap hubungan dialektika antara struktural dan cara aktor membangun realitas sosialnya, Bourdieu memberikan nama pada orientasi pemikirannya sebagai "Strukturalisme Genetis". Bourdieu mendefinisikan strukturalisme genetis dengan cara berikut:

Analisis struktur objektif tak dapat dipisahkan dari analisis asal-usul struktur mental individual yang hingga taraf tertentu merupakan produk penggabungan struktur sosial; juga tak dapat dipisahkan dari analisis asal-usul struktur sosial itu sendiri; ruang sosial dan kelompok yang menempatnya adalah produk dari perjuangan historis (di mana agen berpartisipasi sesuai dengan posisi mereka di

dalam ruang sosial dan sesuai dengan struktur mental yang menyebabkan agen dapat memahami ruang sosial ini).²⁵

Pada dasarnya dalam pandangan Bourdieu, yang disebut sebagai objektivisme adalah suatu pengetahuan objektif yang mengandung dominasi dan dalam kondisi ini, individu tidak bisa menolaknya. Otomatis dominasi yang dimaksud disini berasal dari dorongan yang ada pada luar individu itu sendiri, yakni apa yang dinamakan struktur. Sedangkan pengertian dari subjektivisme sendiri adalah mengarah pada tindakan individu yang bertindak atau melakukan sesuatu diluar struktur.

Upaya Bourdieu untuk menjembatani antara objektivisme dengan subjektivisme, dapat dilihat dari konsep Bourdieu tentang habitus dan arena (lingkungan/ranah) dan hubungan dialektik antara keduanya. Habitus berada di dalam pikiran aktor, sedangkan arena (lingkungan/ranah) berada di luar pikiran aktor. Meskipun sebenarnya semua konsep dari Bourdieu saling berkaitan dan mempengaruhi. Setiap kelas akan memiliki habitus yang berbeda-beda. Habitus inilah yang kemudian dipaksakan kelas dominan kepada kelas terdominasi. Kelas dominan akan selalu memaksakan habitusnya melalui berbagai mekanisme kekuasaan.

4. Kekerasan dan Kekuasaan

Menurut Bourdieu, kekerasan berada dalam lingkup kekuasaan. Hal tersebut berarti kekerasan merupakan pangkal atau hasil sebuah praktik kekuasaan. Ketika sebuah kelas mendominasi kelas yang lain, maka di dalam proses tersebut akan menghasilkan sebuah kekerasan. Untuk

²⁵ Pierre Bourdieu, *Outline of A Theory of Practice* (Cambridge: Cambridge University Press, 1995)

menjalankan aksi dominasi melalui kekerasan ini, kelas dominan selalu berupaya agar aksinya tidak mudah dikenali. Mekanisme kekerasan yang dilakukan kelas dominan dilakukan secara perlahan namun pasti, sehingga kelas dominan tidak sadar bahwa dirinya menjadi subjek kekerasan. Dengan demikian, kelas dominan memiliki kekuasaan yang digunakan untuk mendominasi kelas yang tidak beruntung, kelas tertindas. Mekanisme kekerasan seperti inilah yang kemudian disebut sebagai kekerasan simbolik.²⁶

Kekerasan simbolik adalah salah satu konsep penting dalam ide teoretis Bourdieu. Makna konsep ini terletak pada upaya aktor-aktor sosial dominan menerapkan suatu makna sosial dan representasi realitas yang diinternalisasikan kepada aktor lain sebagai sesuatu yang alami dan absah, bahkan makna sosial tersebut kemudian dianggap benar oleh aktor lain tersebut. Kekerasan simbolik dilakukan dengan mekanisme “penyembunyian kekerasan” yang dimiliki menjadi sesuatu yang diterima sebagai “yang memang seharusnya demikian”. Proses ini menurut Bourdieu dapat dicapai melalui proses *inkalkulasi* atau proses penanaman yang berlangsung secara terus-menerus.

Kekerasan simbolik dapat dilakukan dengan dua cara. *Pertama*, eufemisme. Eufemisme biasanya membuat kekerasan simbolik menjadi tidak nampak, bekerja secara halus, tidak dapat dikenali dan dapat dipilih secara “tidak sadar”. Bentuk eufemisme dapat berupa kepercayaan, kewajiban, kesetiaan, kesopanan (sopan-santun), pemberian, utang, pahala atau belas-kasihan. *Kedua*, mekanisme sensorisasi yang menjadikan kekerasan simbolik nampak sebagai “moral kehormatan” seperti: kesantunan,

²⁶ Piere Bourdieu, *Outline...*

kesucian, kedermawanan dan sebagainya yang biasanya dipertentangkan dengan “moral yang rendah”, seperti: kekerasan, kriminal, ketidakpantasan, asusila, kerakusan dan sebagainya.²⁷

5. Modal Simbolik dan Kekerasan Simbolik

Modal (*capital*) yang dimaksud Bourdieu, secara mendasar tidak berbeda dengan modal (*capital*) dalam ekonomi. Bahkan Bourdieu, membuat kategori atau tipe dari bentuk modal (*capital*) yakni berupa; *economy capital*, *social capital*, *cultural capital* (modal ekonomi, sosial dan budaya). Dan setiap modal memiliki komoditasnya masing-masing, misalnya; ekonomi berupa sumber daya uang (*money resouces*), modal sosial berupa jejaringan sosial, kenalan orang berpengaruh (*social network influence people*), dan modal budaya berupa wawasan, pengetahuan, cara berpikir yang dianggap dapat membuat suatu identitas, budaya tertentu sebagai budaya yang “tinggi” (*high culture*) dan *legitimate*. Adapun kompetensi-kompetensi keilmuan, penguasaan bahasa atau “*linguistic capital*” juga merupakan bagian modal budaya, penguasaan bahasa, gaya, berbicara dengan menggunakan bahas yang sesuai (*properly*) dengan kelas sosial tertentu dapat melegitimasi status sosial tertentu pula.

Bagi Marx, modal (*capital*) bukanlah sebuah relasi sederhana, melainkan sebuah proses, di dalam mana berbagai gerakan adalah selalu (berupa) modal. Bourdieu melihat modal simbolik atau *symbolic capital* (seperti: harga diri, martabat, atensi) merupakan sumber kekuasaan yang krusial.²⁸ Modal simbolik adalah setiap spesies modal yang

²⁷ Haryatmoko, *Menyingkap...*

²⁸ Piere Bourdieu, *Outline...*

dipandang melalui skema klasifikasi, yang ditanamkan secara sosial. Ketika pemilik modal simbolik menggunakan kekuatannya, ini akan berhadapan dengan agen yang memiliki kekuatan lebih lemah, dan karena itu si agen berusaha mengubah tindakan-tindakannya. Maka, hal ini menunjukkan terjadinya kekerasan simbolik (*symbolic violence*).

Kekerasan simbolik pada dasarnya adalah pemaksaan kategori-kategori pemikiran dan persepsi terhadap agen-agen sosial terdominasi, yang kemudian menganggap tatanan sosial itu sebagai sesuatu yang adil. Ini adalah penggabungan struktur tak sadar, yang cenderung mengulang struktur-struktur tindakan dari pihak yang dominan. Pihak yang terdominasi kemudian memandang posisi pihak yang dominan ini sebagai yang benar. Kekerasan simbolik dalam arti tertentu jauh lebih kuat daripada kekerasan fisik, karena kekerasan simbolik itu melekat dalam setiap bentuk tindakan dan struktur kognisi individual, dan memaksakan momok legitimasi pada tatanan sosial.

Dalam tulisan-tulisan teoretisnya, Bourdieu menggunakan beberapa terminologi ekonomi untuk menganalisis proses-proses reproduksi sosial dan budaya, tentang bagaimana berbagai bentuk modal cenderung untuk ditransfer dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bagi Bourdieu, pendidikan formal mewakili contoh kunci proses ini. Keberhasilan pendidikan, menurut Bourdieu, membawakan keseluruhan cakupan perilaku budaya, yang meluas sampai ke fitur-fitur yang seakan-akan bersifat non-akademis, seperti: gaya berjalan, busana, atau aksen.

6. Modal Simbolik Yang Menjadi Modal Terjadinya Kekerasan Simbolik.



Bagi Bourdieu modal yang dimiliki individu dalam lingkungan sosialnya yang digunakan untuk menentukan posisi dalam suatu arena. Modal itu harus selalu diproduksi dan direproduksi kembali. Menurut Bourdieu terdapat empat jenis modal, yaitu modal ekonomi, modal sosial, modal kultural, dan modal simbolik.²⁹

1. Modal ekonomi: segala bentuk modal yang dimiliki yang berupa materi, misalnya uang, emas, mobil, tanah, dan lain-lain.
2. Modal sosial: terdiri dari hubungan sosial yang bernilai antara individu, atau hubungan-hubungan dan jaringan hubungan-hubungan yang merupakan sumberdaya yang berguna dalam penentuan dan reproduksi kedudukan-kedudukan sosial. Misalnya seorang mahasiswa kenal baik dengan seorang dosen.
3. Modal kultural: meliputi berbagai pengetahuan yang sah. Misalnya ijazah, cara berbicara, cara bergaul, cara pembawaan diri (sopan santun).
4. Modal simbolik: berasal dari kehormatan dan prestise seseorang. Misalnya posisi atau jabatan seseorang sebagai kepala pemerintahan.

²⁹ Pierre Bourdieu, "The Forms of Capital", dalam *The Routledge Falmer Reader in Sociology of Education*, (ed.) Stephen J. Ball (London: The Routledge Falmer, 2004)

Distribusi kapital menentukan posisi atau kelas agen di dalam sistem sosial. Kelas yang dominan adalah kelas yang memiliki jumlah (akumulasi) terbesar dari keempat bentuk kapital, sedangkan kelas bawah atau kaum marginal adalah pemilik kapital yang paling sedikit. Secara logis, maka kelas pemilik kapital adalah kelas yang paling dominan.

7. Sekolah sebagai Arena Terjadinya Kekerasan Simbolik

Pendidikan bagi Bourdieu, hanyalah sebuah alat untuk mempertahankan eksistensi kelas dominan. Sekolah pada dasarnya hanya menjalankan proses reproduksi budaya (*cultural reproduction*), sebuah mekanisme sekolah, dalam hubungannya dengan institusi yang lain, untuk membantu mengabadikan ketidaksetaraan ekonomi antar-generasi.³⁰ Kelas dominan mempertahankan posisinya melalui apa yang disebut *Illich-hidden curriculum*, sekolah memengaruhi sikap dan kebiasaan siswa dengan menggunakan budaya kelas dominan. Kelas dominan memaksakan kelas terdominasi untuk bersikap dan mengikuti budaya kelas dominan melalui sekolah. Sekolah hampir selalu menerapkan budaya kelas dominan dalam aktivitasnya. Siswa dari latar belakang kelas bawah (kelompok minoritas di sekolah) mengembangkan cara berbicara dan bertindak yang biasa digunakan kelas dominan atau yang biasa diistilahkan Bourdieu dengan habitus.

Sekolah-sekolah menurut Bourdieu merupakan tempat untuk menyosialisasikan habitus kelas dominan sebagai jenis habitus yang alami dan memosisikan habitus kelas dominan sebagai satu-satunya habitus yang tepat dan paling baik serta memperlakukan setiap anak (siswa)

³⁰ Anthony Giddens, *Sociology Fifth Edition* (USA, Polity Press, 2006)

seolah-olah mereka memiliki akses yang sama kepada habitus tersebut. Menurut Bourdieu:

....budaya elite begitu dekat dengan budaya sekolah, sehingga anak-anak dari kelas menengah ke bawah hanya dapat memperoleh sesuatu yang diberikan kepada anak-anak dari kelas-kelas terdidik -gaya, selera, kecerdasan-dengan usaha yang sangat keras. Pendeknya, berbagai sikap dan kemahiran yang kelihatannya natural dalam anggota kelas terdidik dan yang lazimnya diperkirakan datang dari mereka, tepatnya karena sikap-sikap dan kemahiran itu adalah budaya kelas tersebut.³¹

Dengan cara ini, habitus kelas dominan ditransformasikan menjadi bentuk modal budaya yang diterima begitu saja oleh sekolah-sekolah dan bertindak sebagai alat seleksi yang paling efektif dalam proses-proses reproduksi sebuah masyarakat yang hierarkis.³² Mereka yang memiliki habitus yang sesuai (dengan habitus kelas dominan) akan menerima keberhasilan, sementara mereka yang tidak mampu menyesuaikan habitusnya, akan mengalami kegagalan. Agar kelas bawah dapat mengalami keberhasilan, maka ia harus melakukan-apa yang disebut-proses *borjuasi*, meniru habitus kelas dominan. Habitus kelas dominan selalu diposisikan sebagai habitus yang paling baik dan paling sempurna.

Pernyataan di atas semakin menunjukkan bahwa sekolah akan selalu menciptakan ketidaksetaraan sosial dalam masyarakat. Bagaimanapun juga, meskipun sistem pendidikan memberikan akses seluas-luasnya bagi semua

³¹ Richard Harker, (*Habitus X Modal*) + *Ranah = Praktik: Pengantar Paling Komprehensif kepada Pemikiran Piere Bourdieu*, diterjemahkan dari An Introduction to The Work of Piere Bourdieu: The Practice Theory oleh Pipit Maizer (Bandung: Jalasutra, 2007)

³² Richard Harker, (*Habitus...*)

kelas, namun sistem ini tetap tidak akan menguntungkan bagi kelas bawah. Hal ini dikarenakan kelas dominan memiliki modal budaya yang jauh melebihi kapasitas kelas bawah. Bagi Bourdieu, peserta didik dari kelas dominan lebih diuntungkan karena memiliki modal budaya. Mereka beruntung berkat asal keluarga yang memungkinkan mendapatkan kebiasaan budaya (membaca, menulis, diskusi), latihan-latihan dan sikap yang langsung membuat mereka lebih siap bersaing di sekolah. Mereka juga mewarisi pengetahuan dan keterampilan, serta selera yang sangat mendukung pengembangan budaya yang dituntut oleh sistem pendidikan di sekolah. *Privilege* budaya ini mengemuka karena *familiaritas* mereka dengan karya-karya seni dan sastra berkat kunjungan teratur mereka ke museum, nonton teater dan konser serta kegiatan sejenis lainnya.³³

Sebaliknya, peserta didik yang berasal dari kelas bawah, satu-satunya akses ke budaya luar adalah sekolah. Bagi lapisan kelas bawah sekolah merupakan bentuk *akulturasi* budaya. Perilaku di dalam budaya universitas mengandaikan isi dan modalitas proyek profesional yang merupakan budaya kelas dominan. Pengajaran budaya mengandaikan *corpus* pengetahuan, keterampilan termasuk dalam cara berbicara atau bertutur kata yang biasanya dimiliki kaum terdidik. Kebiasaan membaca tumbuh di perpustakaan rumah, modal budaya berkembang dengan pembiasaan melihat pertunjukan-pertunjukan pilihan yang berkualitas. Kemampuan percakapan yang bersifat *alusif* yang hanya bisa ditangkap oleh mereka yang terdidik berkembang dalam kalangan sosial tertentu. Warisan budaya seperti itu biasanya diwariskan secara tidak

³³ Nanang Martono, *Kekerasan...* hal. 43

langsung, penuh *diskresi*, bahkan dapat dikatakan tanpa upaya *metodis* atau tindakan yang kelihatan karena telah menjadi bagian dari habitus kalangan terdidik. Untuk itu, tidak mengherankan bila bagi kalangan elite, pendidikan merupakan kelanjutan kelangsungan pewarisan budaya dan bagian dari strategi kekuasaan, sedangkan untuk kelas miskin sekolah merupakan simbolisasi akses ke kalangan elite. Sekolah menjadi satu-satunya alat yang mampu menjanjikan harapan keberhasilan sosial, sedangkan untuk kalangan atas sistem pendidikan menjamin pelanggaran *privilese* mereka.³⁴

Selain itu, sekolah juga beroperasi dalam batasan-batasan habitus tertentu, akan tetapi sekolah juga bereaksi terhadap kondisi eksternal yang berubah-ubah. Sekolah selalu beradaptasi dengan kondisi di luar dirinya, seperti menyesuaikan diri dengan kondisi sosial, ekonomi, politik, perkembangan teknologi yang turut memengaruhi kinerja dan fungsi sekolah. Sekolah menawarkan berbagai “fungsi” positif yang dinilai berpihak pada kelas bawah, akan tetapi sebenarnya fungsi-fungsi tersebut tidak jauh bedanya sebagai fungsi mempertahankan dominasi kelas atas yang dominan. Ketika tenaga ahli banyak dibutuhkan dalam dunia kerja, maka sekolah pun berlomba-lomba memberikan keterampilan bagi individu dari kelas bawah, seperti kursus komputer, menjahit, bahasa asing, perbankan, dan sebagainya. Individu kelas bawah tersebut sebenarnya digiring untuk mengikuti habitus kelas dominan, mereka diciptakan untuk melayani kelas dominan guna memenuhi kebutuhan akan kelas pekerja. Individu kelas bawah

³⁴ Haryatmoko, *Menyingkap...*

diciptakan untuk menjadi kelas bawah pula dalam dunia kerja.³⁵

Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah lebih banyak menyediakan habitus kelas dominan. Kegiatan les piano atau les-les musik yang ditawarkan lebih banyak berpihak pada selera, keinginan, kegemaran, atau bahkan bakat yang dimiliki kelas dominan. Sekolah-sekolah menawarkan kegiatan belajar tambahan, seperti les mata pelajaran bagi siswanya, tentu saja dalam hal ini adalah siswa yang memiliki materi yang lebih, sehingga mampu membayar biaya les tambahan. Kehadiran berbagai lembaga bimbingan belajar yang menawarkan berbagai cara praktis dalam mengerjakan soal ujian mengindikasikan masih kurangnya materi yang disampaikan guru di sekolah. Pemisahan materi ini, bahkan merupakan proses yang disengaja untuk memaksa siswa mengikuti kegiatan pelajaran tambahan ini. Artinya, secara tidak langsung siswa yang berasal dari kelas bawah tidak akan mampu mendapatkan materi pelajaran secara penuh, karena sebagian materi yang lain akan disampaikan melalui bimbingan belajar. Siswa dari kelas bawah juga tidak akan mendapatkan trik-trik jitu dalam mengerjakan soal-soal ujian. Sekali lagi, cara-cara ini hanya akan diperoleh bila siswa mengikuti bimbingan belajar yang tentu saja berbiaya mahal. Dengan demikian, sekolah telah menjadi tempat yang paling strategis untuk berlangsungnya praktik-praktik kekerasan simbolik. Proses ini terjadi ketika siswa dari kelas bawah secara tidak sadar dipaksa untuk menerima semua habitus kelas dominan melalui, misalnya, berbagai peraturan sekolah yang hanya mengakomodasi kelas habitus kelas dominan, memberikan materi, baik melalui kurikulum formal maupun kurikulum tersembunyi

³⁵ Richard Harker, (*Habitus...*)

yang sekali lagi tidak pernah disadari siswa kelas terdominasi: melalui kurikulum, melalui bahasa, melalui kegiatan ekstrakurikuler, dan mekanisme lainnya. Setiap hari mereka selalu “dikenalkan” dengan habitus kelas dominan, mereka dikenalkan dengan budaya, kebiasaan, gaya hidup, selera, cara berpakaian, cara bersikap, cara berperilaku, cara bertutur kata, cara bertindak “yang baik” menurut kelas dominan. Akan tetapi, mereka selalu menganggap hal tersebut sebagai sebuah keharusan, sebuah hal biasa yang sudah diatur “dari sananya”, sehingga mereka pun akhirnya menerima habitus kelas dominan dengan lapang dada. Padahal di sisi lain, mereka tidak sadar bila habitus mereka telah diinjak-injak, dicampakan, dibuang, dianggap sebagai habitus yang tidak berguna di sekolah. Habitus mereka tidak boleh dibawa di sekolah; di sekolah mereka harus berperilaku layaknya kelas dominan. Mereka harus mengenakan berbagai atribut yang notabene bukanlah habitus mereka: berdasi, bersepatu, mereka juga dipaksa berseragam (meskipun mereka tidak mampu membeli seragam dan sepatu), dan lebih parah lagi, warna dan jenis sepatu pun sering kali diatur sedemikian rupa-warna sepatu harus hitam; ketika pelajaran olahraga, siswa harus memakai sepatu khusus olahraga.³⁶

B. Madrasah

1. Pengertian Madrasah

Madrasah merupakan *isim makan* dari “darasa” yang berarti “tempat duduk untuk belajar”. Istilah madrasah ini sekarang menyatu dengan istilah sekolah atau perguruan

³⁶ Nanang Martono, *Kekerasan... hal. 45*

(terutama perguruan Islam).³⁷ Perkataan madrasah berasal dari bahasa Arab yang artinya tempat belajar. Madrasah dalam bahasa Indonesia adalah sekolah lebih dikhususkan lagi sekolah-sekolah agama Islam. Dalam *Shorter Encyclopaedia of Islam*, madrasah artinya nama dari suatu lembaga dimana ilmu-ilmu keislaman diajarkan.

Dengan keterangan tersebut dapat dipahami bahwa madrasah adalah penekanannya sebagai suatu lembaga yang mengajarkan ilmu-ilmu keislaman. Perkataan madrasah ditanah Arab ditunjukkan untuk semua sekolah secara umum, akan tetapi di Indonesia ditujukan untuk sekolah-sekolah yang mempelajari ajaran-ajaran Islam. Madrasah pada prinsipnya adalah kelanjutan dari sistem pesantren.

Menurut Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Tahun 1975, pengertian madrasah adalah lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang diberikan sekurang-sekurangnya 30% di samping mata pelajaran umum.³⁸ Ditinjau dari segi tingkatannya madrasah dibagi menjadi:

- a) Tingkat Ibtidaiyah (Tingkat Dasar)
- b) Tingkat Tsanawiyah (Tingkat Menengah)
- c) Tingkat Aliyah (Tingkat Menengah Atas)³⁹

2. Sejarah Dan Perkembangan Madrasah Di Indonesia

Madrasah bukan lembaga pendidikan Islam asli Indonesia, tetapi berasal dari dunia Islam di Timur Tengah yang berkembang sekitar abad ke-10 M atau 11 M. Madrasah berkembang sebagai simbol kebangkitan golongan sunni.

³⁷ Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hal.160

³⁸ Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 102.

³⁹ Haidar Putra Daulay, *Sejarah...*, Hal. 94-95

Madrasah didirikan sebagai sarana transmisi ajaran-ajaran golongan sunni. Pada perkembangan berikutnya, madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam formal seperti *kuttab* dan masjid. Seluruh dunia Islam telah mengadopsi sistem madrasah di samping *kuttab* dan masjid untuk mentransmisi nilai-nilai Islam. Pada awal perkembangannya madrasah tergolong lembaga pendidikan setingkat *college* (jika dibandingkan dengan lembaga pendidikan Islam saat ini).

Istilah “madrasah” juga diadopsi oleh umat Islam di Indonesia. Di Timur Tengah madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional, seperti surau, *dayah*, atau pesantren yang tidak mengenal sistem klasikal dan penjenjangan. Akan tetapi kehadiran madrasah di Indonesia menunjukkan fenomena modern dalam sistem pendidikan Islam di Indonesia. Di Indonesia istilah “madrasah” diadopsi untuk memenuhi kebutuhan modernisasi pendidikan islam dengan menggunakan sistem klasikal, perjenjangan, penggunaan bangku, bahkan memasukan pengetahuan umum sebagai bagian kurikulumnya.⁴⁰

Madrasah di Indonesia muncul sebagai jembatan yang menghubungkan antara lembaga pendidikan umum dan lembaga pendidikan tradisional pesantren. Madrasah menawarkan pendidikan umum sebagaimana ditawarkan sekolah umum. Dapat dikatakan bahwa madrasah pada awal abad ke -20 sudah mengalami konsolidasi sebagai lembaga pendidikan Islam modern.⁴¹

Sejarah dan perkembangan madrasah dibagi dalam dua periode yaitu:

a) Periode Sebelum Kemerdekaan

⁴⁰ Hanun Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), hal. 192-193

⁴¹ Arief Subhan, *Lembaga pendidikan islamindonesia abad ke-20* (Jakarta: kencana, 2012), hal. 132-133

Pendidikan dan pengajaran agama Islam dalam bentuk pengajian al Qur'an dan pengajian kitab yang diselenggarakan di rumah-rumah, surau, masjid, pesantren, dan lain-lain. Pada perkembangan selanjutnya mengalami perubahan bentuk baik dari segi kelembagaan, materi pengajaran (kurikulum), metode maupun struktur organisasinya, sehingga melahirkan suatu bentuk yang baru yang disebut *madrasah*.

Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam berfungsi menghubungkan sistem lama dengan sistem baru dengan jalan mempertahankan nilai-nilai lama yang masih baik yang masih dapat dipertahankan dan mengambil sesuatu yang baru dalam ilmu, teknologi dan ekonomi yang bermanfaat bagi kehidupan umat Islam. Oleh karena itu, isi kurikulum madrasah pada umumnya adalah apa yang diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan Islam (surau dan pesantren) ditambah dengan beberapa materi pelajaran yang disebut dengan ilmu-ilmu umum.

Latar belakang pertumbuhan madrasah di Indonesia dapat di kembalikan pada dua situasi yaitu:

(1) Gerakan Pembaruan Islam di Indonesia

Gerakan pembaruan Islam di Indonesia muncul pada awal abad ke-20 yang dilatarbelakangi oleh kesadaran dan semangat yang kompleks sebagaimana diuraikan oleh *Karel A Steenbrink* dengan mengidentifikasi empat faktor yang mendorong gerakan pembaruan Islam di Indonesia, antara lain:

- (a) Keinginan untuk kembali kepada Al Qur'an dan Hadis
- (b) Semangat nasionalisme dalam melawan penjajah
- (c) Memperkuat basis gerakan sosial, budaya dan politik
- (d) Pembaruan pendidikan Islam di Indonesia

Bagi tokoh-tokoh pembaruan, pendidikan kiranya senantiasa dianggap sebagai aspek yang strategis untuk membentuk sikap dan pandangan keislaman masyarakat. Oleh karena itu, pemunculan madrasah tidak bisa lepas dari gerakan pembaruan Islam yang dimulai oleh usaha beberapa orang tokoh-tokoh intelektual agama Islam yang selanjutnya dikembangkan oleh organisasi-organisasi Islam.

(2) Respons Pendidikan Islam terhadap Kebijakan Pendidikan Hindia Belanda

Pertama kali bangsa Belanda datang ke Nusantara hanya untuk berdagang, tetapi karena kekayaan alam Nusantara yang sangat banyak maka tujuan utama untuk berdagang tadi berubah untuk menguasai wilayah Nusantara dan menanamkan pengaruh di Nusantara sekaligus dengan mengembangkan pahamnya yang terkenal dengan semboyan 3G yaitu, *Glory* (kemenangan dan kekuasaan), *Gold* (emas atau kekayaan bangsa Indonesia), dan *Gospel* (upaya salibisasi terhadap umat Islam di Indonesia).

Dalam menyebarkan misi-misinya itu, Belanda (VOC) mendirikan sekolah-sekolah kristen. Misalnya di Ambon yang jumlah sekolahnya mencapai 16 sekolah dan 18 sekolah di sekitar pulau-pulau Ambon, di Batavia sekitar 20 sekolah, padahal sebelumnya sudah ada sekitar 30 sekolah. Dengan demikian, untuk daerah Batavia saja, sekolah kristen sudah berjumlah 50 buah. Melalui sekolah-sekolah inilah Belanda menanamkan pengaruhnya di daerah jajahannya.

Pada perkembangan selanjutnya di awal abad ke-20 atas perintah Gubernur Jenderal Van Heutsz sistem pendidikan diperluas dalam bentuk sekolah desa, walaupun masih diperuntukkan terbatas bagi kalangan anak-anak bangsawan. Namun pada masa selanjutnya, sekolah ini

dibuka secara luas untuk rakyat umum dengan biaya yang murah.

Dengan terbukanya kesempatan yang luas bagi masyarakat umum untuk memasuki sekolah-sekolah yang diselenggarakan secara tradisional oleh kalangan Islam mendapat tantangan dan saingan berat, terutama karena sekolah-sekolah pemerintah Hindia Belanda dilaksanakan dan dikelola secara modern terutama dalam hal kelembagaan, kurikulum, metodologi, sarana dan lain-lain. Perkembangan sekolah yang demikian jauh dan merakyat menyebabkan tumbuhnya ide-ide di kalangan intelektual Islam untuk memberikan respons dan jawaban terhadap tantangan tersebut dengan tujuan untuk memajukan pendidikan Islam. Ide-ide tersebut muncul dari tokoh-tokoh yang pernah mengenyam pendidikan di Timur Tengah atau pendidikan Belanda. Mereka mendirikan lembaga pendidikan baik secara perorangan maupun secara kelompok atau organisasi yang dinamakan *madrasah* atau *sekolah*. Madrasah-madrasah yang didirikan tersebut antara lain:

- (a) Madrasah (*Adabiyah School*). Madrasah ini didirikan oleh Syekh Abdullah Ahmad pada tahun 1907 di Padang Panjang.
- (b) Sekolah Agama (*Madrasah School*). Didirikan oleh Syekh M. Thaib Umar di Sungayang, Batusangkar pada tahun 1910.
- (c) Madrasah Diniyah (*Diniyah School*). Madrasah diniyah didirikan pada tanggal 10 Oktober 1915 oleh Zainuddin Labai El Yunusiy di Padang Panjang. Madrasah ini adalah madrasah sore yang tidak hanya mengajarkan pelajaran agama tetapi juga pelajaran umum.
- (d) Madrasah Muhammadiyah. Madrasah ini tidak diketahui berdirinya secara pasti, namun diperkirakan berdiri pada

tahun 1918, yang didirikan oleh Organisasi Muhammadiyah.⁴²

- (e) Madrasah yang didirikan oleh HasyimAsy'ari berdiri pada tahun 1919 M bernama Salafiyah diasuh oleh K.H. Ilyas, madrasah ini memberikan pengetahuan agama dan pengetahuan umum.⁴³

(3) Periode Sesudah Kemerdekaan

Setelah kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, kemudian pada tanggal 3 Januari 1946 di bentuklah Departemen Agama yang akan mengurus keberagamaan di Indonesia termasuk didalamnya pendidikan, khususnya Madrasah. Secara instansional departemen agama di serahi kewajiban dan bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengembangan pendidikan agama dalam lembaga-lembaga tersebut. Lembaga-lembaga pendidikan agama Islam ada yang berstatus negeri ada yang berstatus swasta.

Dalam upaya meningkatkan madrasah maka pemerintah melalui Kementrian Agama memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk material dan bimbingan, untuk itu Kementerian Agama mengeluarkan peraturan Menteri Agama No 1 Tahun 1946 dan disempurnakan dengan peraturan Menteri Agama No 7 Tahun 1952. Di dalam peraturan tersebut terdapat ketentuan jenjang pendidikan pada madrasah yang terdiri dari : Madrasah Rendah (Madrasah Ibtidaiyah), Madrasah Lanjutan Tingkat Pertama (Madrasah Tsanawiyah), Madrasah Lanjutan Atas (Madrasah Aliyah).

⁴² Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana,2007), hal. 290-293

⁴³ Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hal. 194

Upaya pemerintah selanjutnya untuk meningkatkan status madrasah adalah dengan jalan menegerikan madrasah-madrasah swasta yang dikelola oleh masyarakat, baik yang berbentuk pribadi atauun organisasi. Tercatat sejumlah ratusan madrasah swasta yang dijadiakn negeri yang meliputi:

- (a) Madrasah Ibtidaiyah Negeri (tingkat dasar)
- (b) Madrasah Tsanawiyah Agama Islam Negeri (tingkat menengah pertama)
- (c) Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri (tingkat menengah atas).⁴⁴

Walaupun pendidikan Islam sudah berjalan lama dan mempunyai sejarah panjang.Namun dirasakan, pendidikan Islam masih tersisih dari sistem pendidikan nasional. Keadaan ini berlangsung sampai dikeluarkannya SKB 3 Menteri (Menteri Agama, Pendidikan dan Kebudayaan) pada tanggal 24 Maret 1975 yang berusaha mengembalikan ketertinggalanpendidikan Islam untuk memasuki *mainstream* pendidikan nasional. Kebijakan ini membawa pengaruh yang sangat besar bagi madrasah, karena *pertama*, ijazah dapat mempunyai nilai yang sama dengan sekolah umum yang sederajat. *Kedua*, lulusan sekolah madrasah dapat melanjutkan kesekolah umum yang setingkat lebih tinggi. *Ketiga*, siswa madrasah dapat pindah kesekolah umum yang setingkat.⁴⁵

3. Sistem Pendidikan Dan Pengajaran Di Madrasah

Perpaduan antara sistem pada pondok pesantren dengan sistem yang berlaku pada sekolah-sekolah modern,

⁴⁴ Haidar Putra Daulay, *Sejarah...*, hal. 100-101

⁴⁵ Samsul Nizar, *Sejarah...*, hal. 923-924

merupakan sistem pendidikan dan pengajaran yang dipergunakan di madrasah. Proses perpaduan tersebut berlangsung secara berangsur-angsur mulai dan mengikuti sistem klasikal. Sistem pengajian kitab yang selama ini dilakukan, di ganti dengan bidang-bidang pelajaran tertentu, walaupun masih menggunakan kitab-kitab yang lama. Sementara itu kenaikan tingkat pun ditentukan oleh penguasaan terhadap sejumlah bidang pelajaran.

Dikarenakan pengaruh dari ide-ide pembaharuan yang berkembang di dunia Islam dan kebangkitan nasional bangsa Indonesia, sedikit demi sedikit pelajaran umum masuk ke dalam kurikulum madrasah. Buku-buku pelajaran agama mulai disusun khusus sesuai dengan tingkatan madrasah, sebagaimana halnya dengan buku-buku pengetahuan umum yang berlaku di sekolah-sekolah umum. Bahkan kemudian lahirlah madrasah-madrasah yang mengikuti sistem penjenjangan dan bentuk-bentuk sekolah modern, seperti Madrasah Ibtidaiyah sama dengan Sekolah Dasar, Madrasah Tsanawiyah sama dengan Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Aliyah sama dengan Sekolah Menengah Atas.

Kurikulum madrasah dan sekolah-sekolah agama, masih mempertahankan agama sebagai mata pelajaran pokok walaupun dengan presentase yang berbeda. Dalam hal ini Kementrian Agama mulai mengadakan pembinaan dan pengembangan terhadap sistem pendidikan madrasah melalui Kementrian Agama, Merasa perlu menentukan kriteria madrasah.

Kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Agama untuk madrasah-madrasah yang berada dalam wewenangnya adalah harus memberikan pelajaran agama sebagai mata pelajaran pokok, paling sedikit 6 Jam seminggu. Pengetahuan umum yang diajarkan di madrasah adalah:

- (a) Membaca dan menulis (huruf latin) bahasa Indonesia
- (b) Berhitung
- (c) Ilmu Bumi
- (d) Sejarah Indonesia dan Dunia
- (e) Olahraga dan Kesehatan
- (f) Selain mata pelajaran agama dan Bahasa Arab serta yang disebutkan di atas juga diajarkan berbagai keterampilan sebagai bekal paralulusannya terjun kemasyarakat.⁴⁶

⁴⁶ Hasbullah, *Sejarah....*, hal. 170-171

A. Deskripsi Hasil Penelitian

Pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan di MIN Balikpapan dan MIN Nganjuk adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. adapun data yang diperoleh dalam penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:

1. Kekerasan Simbolik di Madrasah Ibtida'iyah Negeri (MIN) Balikpapan
 - a. Tata Tertib Siswa, kekerasan simbolik dan normalisasi habitus

Kekerasan simbolik yang peneliti temukan di MIN Balikpapan banyak terdapat di tata tertib siswa dan kurikulum yang menjadi budaya kelas dominan yang diterapkan untuk seluruh tatanan strata sosial yang majemuk. Adapun tata tertib tersebut terdiri dari perintah, aturan-aturan dan sanksi. Adapun kekerasan simbolik yang terdapat pada tata tertib siswa antara lain sebagai berikut : poin 1) menyebutkan bahwa setiap siswa harus berada di sekolah tepat pukul 07.00. Aturan seperti itu biasanya dipakai kelas dominan untuk mengajarkan disiplin pada anak-anak mereka. Kelas dominan biasanya membuat aturan tertulis yang disepakati semua anggota keluarga kemudian dipajang di dinding. Kelas dominan biasanya bangun jam 03 sebelum jam kerja dan mulai siap-siap menyambut hari baru. Berdasarkan penelitian, 44% orang sukses bangun 3 jam sebelum jam kerja dimulai. Hal ini

dilakukan agar mereka dapat memiliki waktu yang cukup untuk siap-siap dan menenangkan diri sehingga dapat memulai kerja dengan kondisi tenang. Dengan bangun pagi banyak keuntungan yang didapat misalkan tidak buru-buru saat berangkat kerja dan masih ada waktu untuk membaca disela-sela waktu sebelum berangkat kerja untuk menambah wawasan. Orang kelas dominan akan mengajarkan kebiasaan itu pada anak-anak mereka Contohnya bangun lebih awal paling lambat pukul 04.00, merapikan tempat tidur, mandi dengan bersih, shalat, siap-siap pakai seragam, sarapan dan berangkat ke sekolah tepat waktu, belajar, menonton televisi hanya 30 menit dll. Prinsip kelas dominan adalah waktu itu uang. Anak kelas dominan tidak akan sulit dengan adanya aturan tersebut karena mereka sudah terbiasa. Sedangkan untuk anak kelas terdominasi tidak terbiasa dengan hal itu, karena orang tua mereka sibuk mencari nafkah berangkat pagi pulang malam demi sesuap nasi. Jangankan buat aturan tertulis aturan spontanpun mungkin tidak ada, waktu mereka habis untuk mencari nafkah dan anaknya sudah tidak dipedulikan lagi. Jadi bagi anak terdominasi akan sulit mengikuti aturan tersebut, tapi mereka harus mengikuti jika tidak ingin kena sanksi. Hal ini menunjukkan bahwa aturan tersebut merupakan kekerasan simbolik yang tidak ketara tapi nyata.

Tata tertib poin 2) menyatakan bahwa: pintu pagar sekolah jam 07.15 Wita sudah ditutup, bagi siswa yang terlambat tidak diperkenankan masuk ke dalam kelas. Aturan itu jelas terlihat adanya kekerasan simbolik. Karena anak kelas terdominasi dipaksa untuk mengikuti aturan tersebut. Anak kelas dominan akan dengan mudah mengikuti aturan itu karena mereka sudah terbiasa bangun pagi jadi mereka tidak akan pernah terlambat. Beda halnya dengan anak kelas terdominasi akan sulit mengikuti aturan

itu karena pada jam-jam itu mereka kadang masih membantu pekerjaan rumah orang tua mereka. seperti menyapu, memasak, memberi makan ternak dll.

Tata tertib Poin 3) menyatakan bahwa: berbaris sebelum masuk kelas, membaca do'a sebelum dan sesudah pembelajaran. Perintah itu juga bisa dikatakan sebagai kekerasan simbolik. Habitus membaca doa sebelum dan sesudah belajar adalah habitus kelas dominan. Pendidikan orang tua Kelas dominan otomatis tinggi jadi dalam mengajar anak-anak mereka adalah membiasakan hal-hal yang baik dalam segala hal. Misalkan terbiasa berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan yang baik. Sedangkan kelas terdominasi hal tersebut jarang dan bahkan tidak pernah sama sekali dilakukan, karena orang tuanya juga tidak hafal dan mengerti doa-doa. Jadi anak terdominasi akan menyesuaikan anak kelas dominan jika ingin hafal dan menjadi habitus.

Tata tertib point 4) berbunyi: siswa yang tidak hadir karena halangan, supaya menyampaikan surat kepada kepala sekolah/wali kelas. Aturan tersebut juga merupakan kekerasan simbolik karena aturan itu habitus kelas dominan, karena kelas terdominasi tidak kenal dengan surat menyurat. Mereka menggunakan media berbicara saat berkomunikasi karena kebanyakan mereka tidak bisa menulis. Hal itu berdampak ketika mereka tidak menulis surat IKA tidak masuk sekolah maka otomatis mereka akan dialpha dan akan mempengaruhi nilai akhir nantinya. Aturan tersebut sangat menguntungkan anak kelas dominan karena orang tua mereka berpendidikan jadi hal tersebut tidak menjadi masalah besar.

Tata tertib poin 5) berbunyi: siswa yang meninggalkan pelajaran yang sedang berlangsung harus meminta izin kepada guru yang bersangkutan dan guru

piket. Habitus tata karma dan sopan santun sudah dimiliki kelas dominan jadi mereka sudah terbiasa dan mudah melakukannya, Sedangkan untuk kelas terdominasi, hal tersebut sulit untuk dilakukan karena kebiasaan mereka dalam berkata dan berperilaku masih kurang sopan, kurang tata karma dan bahkan bisa dikatakan perilakunya seperti orang brandalan.

Tata tertib poin 6) siswa memakai seragam sekolah sesuai yang telah ditentukan. Adapun seragam yang harus digunakan siswa/I MIN Balikpapan dalam seminggu sebagai berikut: (a) hari senin: baju putih dan celana/rok putih lengkap dengan topi dan dasi (bagi siswa putra), (b) hari selasa dan rabu: baju putih dan celana/rok merah, (c) kamis: baju batik dan celana/rok putih, (d) Jum'at: seragam Pramuka, (e) Sabtu: pakaian olahraga. Poin 7) pada waktu pelajaran olahraga, para siswa harus berpakaian olahraga sesuai dengan ketentuan dan tidak diperbolehkan mencoret baju olahraga, apabila baju olahraga dicoret akan disita. Tata tertib poin 8) siswa putri diwajibkan memakai pakaian yang menutupi mata kaki warna hitam hari jum'at dan hari sabtu (sesuai yang ditentukan dan sudah rapi dari rumah), point 9) apabila siswa-siswi yang masih menggunakan kaos kaki dan sepatu yang tidak sesuai dengan aturan akan disita sekolah, dan poin 10) siswa putra diharuskan memakai celana yang telah ditentukan oleh sekolah, siswa dilarang memakai celana botol atau kecil di bawah. Tata tertib point 6,7,8,9, dan 10 adalah mengenai peraturan memakai seragam. Hal tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah MIN Balikpapan diperoleh data bahwa ketentuan pakaian seragam yang harus digunakan siswa dalam seminggu sebagai berikut:

Hari senin memakai baju putih pakai rompi dan celana/rok putih lengkap dengan topi dan dasi (bagi laki-

laki), hari selasa dan rabu memakai baju putih pakai rompi dan celana merah, hari kamis memakai baju batik dan celana/rok putih, hari jum'at memakai seragam Pramuka, dan hari sabtu memakai baju olahraga. selain itu harus memakai kaos kaki dan sepatu yang seragam dari sekolah.

Dapat dianalisis bahwa tanpa disadari aturan kewajiban memakai seragam yang ditentukan di MIN Balikpapan merupakan kekerasan simbolik yang menjadi habitus dari tahun ketahun. Seragam adalah kekerasan simbolik yang paling ketara karena aturan seragama dibuat agar kelas terdominasi mengikutinya. Hal tersebut secara tidak langsung sebenarnya memberatkan orangtua. Karena tidak semua orang tua mampu mengikuti aturan tersebut. Jadi orang yang tingkat ekonomi bawah mau tidak mau harus mengikuti aturan tersebut.

Muncul sebuah pertanyaan, seragam sekolah itu masih diperlukan atau tidak? setiap tahun semua orang tua dari kalangan ekonomi rendah merasa tersiksa dengan urusan biaya sekolah. Selain setiap tahun biaya masuk dan uang iuran SPP sekolah semakin meningkat seiring juga dengan meningkatnya tarif dasar listrik dan BBM, mereka juga masih harus dipusingkan oleh berbagai keperluan perlengkapan sekolah anak mereka, mulai dari buku, tas, sepatu, hingga seragam sekolah. Perlu diingat bahwa di negeri ini seragam sekolah di setiap jenjang pendidikan berbeda, dan akhir-akhir ini tiap sekolah juga mulai memiliki seragam sendiri yang merupakan ciri khas sekolah mereka masing-masing. Sebegitu repot dan ruwetnya seorang anak agar bisa dapat duduk di dalam kelas, mendengarkan, “berdiskusi”, dan “berbagi” ilmu pengetahuan bersama guru dan teman-temannya. Lebih parahnya lagi semua perlengkapan “penyeragaman” di atas kadang dijual langsung oleh pihak sekolah dan apabila ada

murid yang tidak “diperlengkapi” dengan sempurna pasti akan dihukum. Sekali lagi, sebegitu repotnya seorang anak agar bisa berlari di pagi hari, bermain bola, bersenang-senang sambil menyehatkan tubuhnya bersama teman-temannya. Bila kita menengok ke belakang, awal mula penyeragaman pakaian sekolah oleh pemerintah adalah untuk memupuk kebanggaan nasional. Tapi pada kenyataannya kebijakan tersebut harus menyiksa masyarakat miskin di negeri ini. Sebagai catatan orang miskin di Indonesia berjumlah sekitar 25,14 juta orang (data Badan Pusat Statistik tahun 2019) jumlah yang tidak sedikit. Untuk makan setiap hari, bayar kontrakan, bayar listrik, bayar ini-itu, dan bayar SPP saja sudah sangat memberatkan mereka, apalagi jika ditambah untuk beli seragam. Untuk mereka yang kaya mungkin itu bukan masalah tapi bagi masyarakat miskin itu menjadi sebuah masalah besar. Beberapa mitos yang diyakini kebenarannya oleh khalayak umum bahwa dengan berseragam akan tercipta rasa persatuan dan kesatuan di antara para siswa, membentuk kerapian, menampakkan keindahan, dan menciptakan kedisiplinan siswa. Dan jika seragam dihapuskan akan tercipta *gap* yang besar antara yang miskin dan yang kaya. Sebuah pemikiran yang keliru. Bukankah kerapian, keindahan, dan disiplin dapat juga tercipta dengan menggunakan baju bebas? Dan bukankah tujuan kita sekolah adalah untuk sadar akan keadaan diri kita sendiri dan mengetahui realitas yang ada di masyarakat, bahwa ada yang miskin dan ada yang kaya, bahwa perbedaan itu pasti ada dan itu hal yang lazim terjadi dalam suatu masyarakat yang majemuk, dan bahwa kita harus menghargai segala perbedaan yang ada. Lihat apa yang Tan Malaka lakukan waktu dia mendirikan sekolahnya. Dia tidak ingin ada tukang kebun di sekolahnya karena dia ingin anak-anak

sekolah belajar bagaimana menjadi rakyat sebenarnya (rakyat yang masih dalam ketertindasan). Jadi program penghapusan seragam harus didukung karena sudah tidak berguna lagi, karena hal tersebut telah membuat anak tidak menyadari dirinya sendiri. Seragam hanya digunakan untuk memotong akses bagi orang miskin mendapatkan pendidikannya. Seragam telah menjadi salah satu kekerasan simbolik yang menjadikan murid sebagai korbannya.

Tata tertib di poin 11) menyatakan bahwa: siswa harus memelihara keamanan, kebersihan, ketertiban dan keindahan lingkungan sekolah. Aturan itu jelas-jelas kebiasaan yang terjadi pada kelas dominan. Di rumah orang kelas dominan pasti ada pekerja seperti satpam dan tukang bersih-bersih (pembantu). Jadi masalah keamanan, kebersihan, ketertiban dan keindahan rumah sudah jelas aman, nyaman, asri dan sejuk. Anak kelas dominan akan terbiasa mendapat perlindungan dan keamanan jadi akan lebih mudah mengikuti aturan tersebut. Sedangkan kelas terdominasi akan sulit mengikuti aturan tersebut, karena dari merekalah yang banyak melanggar aturan tersebut. Kadang mereka bisa jadi pencuri di sekolah mereka, buang sampah sembarangan, suka mencoret-coret tembok, dinding dan fasilitas sekolah karena mereka tidak punya tata karma.

Tata Tertib di point 12) menyatakan bahwa: siswa-siswi yang menimbun sampah di laci belajarnya akan diberikan sanksi. Sanksi tersebut jelas-jelas kekerasan simbolik karena anak kelas dominasi sudah pasti punya kebiasaan bersih, rapi, dan sehat. Di rumah kelas dominan tiap ruangan pasti disediakan tempat sampah. Bahkan karena sudah habit ketika sampah yang habis dipakai jika tidak menemukan tempat sampah mereka akan menyimpan di tas mereka, nanti jika sudah menemukan tempat sampah baru dibuang. Hal tersebut menunjukkan bahwa anak kelas

dominan akan mudah mengikuti aturan tersebut Sedangkan anak terdominasi tidak punya kebiasaan itu, bahkan di rumah mereka mungkin tidak ada tempat sampah jadi setelah makan apapun sampahnya akan dibuang sembarang tempat.

Tata tertib point 13), siswa wajib menjaga nama baik sekolah di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Perintah dalam menjaga nama baik sekolah biasanya dilakukan juga oleh orang kelas dominan. Orang kelas dominan akan selalu menjaga kehormatan keluarganya. Maka anak kelas dominan akan mudah menerima aturan itu. Lain halnya dengan kelas terdominasi tidak peduli dengan nama baik, mereka sudah disibukkan mencari nafkah.

Tata tertib poin 14), siswa wajib bersikap sopan kepada Bapak/Ibu Guru, Karyawan, Tamu, dan sesama siswa lainnya. Perintah tersebut adalah habitus kelas dominan. Orang tua kelas dominan sudah mengajarkan tata karma dan kesopanan kepada anak mereka sejak dini karena anak usia dini mudah dibentuk dan lebih suka mencontoh perilaku orang tuanya. Orang tua kelas dominan mengajarkan dari yang mudah dipahami anak hingga yang sulit. seperti menghormati orang yang lebih tua, mendahulukan yang tua, meminta maaf, mengucapkan kata tolong, terima kasih, menghormati sesama, tidak pelit pujian dan membantu yang lemah dll.

Tata tertib poin 15), semua siswa harus mengikuti upacara dengan tertib, hidmat penuh perhatian dan kesadaran yang tinggi sehingga upacara berlangsung dengan baik dan lancar. Aturan tersebut jelas merupakan kekerasan simbolik. Anak kelas dominan sudah terbiasa disiplin, jadi aturan tersebut tidak sulit diikuti. Sedangkan anak terdominasi akan sulit disiplin karena di rumah tidak mendapatkan pengetahuan itu.

Tata tertib poin 16), siswa dilarang membawa buku bacaan atau gambar yang tidak sesuai dengan pendidikan. Orang Kelas dominan mempunyai banyak koleksi buku di rumahnya, karena orang kelas dominan senang sekali membaca buku setiap hari. Bahkan ada jatah tersendiri untuk belanja buku setiap bulannya. Karena menurut Orang kelas dominan membaca adalah jendela dunia. Berbagai referensi mereka baca dari materi terkait pendidikan, karir, pengembangan kepribadian, sejarah, biografi orang sukses sampai novel hanya untuk sekedar hiburan. Hal tersebut menunjukkan bahwa aturan itu dibuat berdasarkan habitus kelas dominan. Sedangkan kelas terdominasi tidak punya kepikiran untuk koleksi buku bacaan bahkan novel sekalipun.

Tata tertib point 17) menyatakan bahwa: siswa putra dilarang berambut panjang dan point 18) siswa-siswi dilarang berkuku panjang, rambut berwarna dan bertindik (bagi putra). Aturan itu merupakan kekerasan simbolik, karena anak kelas dominan itu terbiasa rapi, bersih dan wangi. Mereka mencukur rambut, kuku, mencat rambut mereka tiap dua minggu sekali di salon. Karena uang banyak, jadi salon yang dipilihpun yang berkualitas mutunya. Anak kelas terdominasi seperti anak yang tidak terurus kebanyakan rambut gondrong dan kuku panjang dibiarkan saja, selain tidak punya uang untuk memotong rambut, di rumah juga tidak punya alat potong rambut atau kuku. jadi anak terdominasi identik dengan kumuh, bau dan lusuh. mereka akan sulit mengikuti aturan tersebut.

Tata Tertib point 19) menyatakan bahwa: siswa putra dilarang memakai perhiasan, dan siswa putri dilarang memakai perhiasan yang berlebihan dan tidak boleh membawa peralatan make-up. aturan tersebut menunjukkan bahwa perhiasan dan make-up adalah identik dengan kelas,

jadi aturan itu dibuat karena kelas dominan yang dijadikan acuan, itu artinya sudah terjadi kekerasan simbolik. Kelas terdominasi tidak ada yang punya kebiasaan membeli perhiasan atau make-up, karena untuk keperluan yang pokok saja tidak cukup apalagi untuk hal-hal yang seperti itu.

Tata Tertib Point 20) menyatakan bahwa: siswa tidak dibenarkan menerima tamu dan membawa teman tanpa seizin Guru piket dan Kepala Sekolah. Habitus kelas dominan adalah mempunyai tamu banyak, karena relasi orang kaya itu banyak dari teman, sahabat, kolega, pegawai dll. sedangkan kelas terdominasi sedikit relasinya paling hanya keluarga dan sahabat dekat itupun jarang bersilaturahmi.

Tata tertib point 21) menyatakan bahwa: siswa dilarang makan makanan kecil sewaktu mengikuti pelajaran. aturan tersebut menunjukkan bahwa nyemil adalah habitus kelas dominan. Kelas terdominasi tidak biasa dengan nyemil terpenting makan nasi kenyang sudah cukup. Lain halnya dengan kelas dominan, selain mereka makan 4 sehat 5 sempurna yang terdiri dari nasi, lauk pauk, susu, sayur dan buah, banyak juga cemilan yang tersedia dalam rumah. Ketika waktu nyantai bersama keluarga maka cemilan itu bermanfaat sekali untuk menemani saat bercengkrama.

Tata tertib point 22) menyatakan bahwa: siswa tidak dibenarkan mencoret-coret bangku dan tembok sekolah. Budaya. Perilaku baik dan buruk sudah di ajarkan kepada anak kelas dominan sejak usia dini, sehingga jadi habit yang baik. Aturan itu sangat menguntungkan untuk anak kelas dominan karena mereka tahu akibat ketika aturan itu dilanggar. Berbeda dengan anak terdominasi mereka tidak tahu perbuatan yang baik dan benar. kebanyakan karena kreativitas mereka kurang tersalurkan saat di rumah karena orang tua tidak mampu mengakomodasi kebutuhan mereka,

sebab itu mereka salurkan bakat-bakat mereka pada bangku-bangku atau tembok-tembok sekolah. Sebenarnya mereka ingin menyalurkan kreativitas mereka tapi di tempat yang salah.

Tata tertib point 23) menyatakan bahwa: siswa tidak dibenarkan membawa Handphone (HP), apabila melanggar tersebut maka akan diberi sanksi dan HP akan disita sekolah. Aturan tersebut jelas merupakan kekerasan simbolik. Hanya anak kelas dominan saja yang punya fasilitas HP. Orang tua kelas dominan biasanya memfasilitasi HP pada anak-anak mereka saat duduk di kelas SMP ada pula yang duduk di kelas SD bahkan ada yang masih PAUD sudah dibelikan HP. Sedangkan anak terdominasi fasilitas itu tidak mereka dapatkan hingga mereka dewasa, hanya bagi mereka yang punya pekerjaan yang bisa membeli HP sendiri.

b. Hukuman sebagai bentuk Kekerasan Simbolik

Point 23) tentang Sanksi-sanksi: Pelanggaran terhadap peraturan dan tata tertib tertera di atas akan dikenakan sanksi-sanksi sebagai berikut: (1) nasehat dan teguran, (2) peringatan secara lisan kepada yang bersangkutan, (3) peringatan secara tertulis dengan tembusan Kepala Sekolah, (4) diserahkan sementara kepada Orangtua/wali murid, (5) dikeluarkan dari sekolah.

Dominasi yang sering dilakukan Guru yang pertama adalah Hukuman Guru, sadar atau tanpa disadari, merupakan salah satu pelaku kekerasan simbolik di sekolah. Karakteristik setiap anak berbeda-beda, ada yang pasif dan aktif (tidak bisa diam baik mulut, tangan dan kaki mereka). Bagi Guru, Anak yang aktif adalah anak yang nakal dan pengganggu. Tak jarang sebagian Guru akan menghukum akan perbuatan mereka agar jera. Guru-Guru di MIN Balikpapan akan menghukum anak didiknya ketika

melanggar tata tertib, seperti anak yang terlambat datang tidak boleh masuk, baju olahraga yang dicoret akan disita, apabila tidak memakai seragam yang sudah ditentukan dari sekolah maka akan disita, siswa/i yang tidak memelihara kebersihan, ketertiban dan keindahan lingkungan sekolah serta menimbun sampah di dalam laci akan diberi sanksi, dan membawa HP akan disita.

Pada saat proses belajar mengajar berlangsung jika ada anak yang mengganggu jalannya PBM maka akan dihukum oleh Guru. seperti: disuruh menulis "*Saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi*" di kertas sebanyak empat halaman lalu harus ditandatangani oleh orang tua, kadang ada juga yang langsung disuruh menulis ke depan di papan tulis. Rela tidak rela ikhlas tidak ikhlas harus dilakukan hukuman itu akibat perbuatannya. selain itu jika ada anak yang tidak mengerjakan PR akan disuruh berdiri dengan satu kaki dengan tangan kanan memegang telinga kiri selama jam pelajaran habis bahkan ada yang menyuruh lari memutar lapangan selama 10 x. Salah satu Guru juga pernah menghukum anak didik yang tidak memakai seragam lengkap saat upacara bendera dengan hormat ke arah berndera merah putih selama satu jam. Hukuman tersebut dilakukan setelah upacara bendera, di bawah teriknya sinar matahari, di tengah lapangan upacara dan disaksikan oleh ratusan murid lainnya.

Guru-guru hanya suka memberi hukuman tanpa menanyakan dulu ada apa di balik kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa-siswanya. Dan mereka juga tidak sadar akan dampak (psikologis) apa yang terjadi di balik hukuman yang mereka berikan. Mereka mungkin tidak sadar kalau hukuman seperti dicontohkan di atas dapat mengakibatkan murid mereka menjadi takut, malu, terhina, tidak berdaya, cemas, khawatir, apatis, hilang kepercayaan diri, menutup

diri, marah bahkan mendendam yang pada akhirnya akan mengganggu proses kembang anak bahkan mengakibatkan kegagalannya di sekolah. Hendaknya para guru mengubah hukuman-hukuman yang selama ini mereka berikan pada anak didik mereka karena hukuman-hukuman yang tidak mendidik itu pada hakekatnya hanyalah merupakan kekerasan semata.

Kegiatan Belajar Mengajar salah satu penyebab mengapa anak-anak Indonesia kurang kritis dan cenderung untuk diam saat ditanya adalah karena kurangnya ditanamkan budaya bertanya oleh guru. Guru di kelas sangat jarang menggunakan kata tanya “mengapa” atau “bagaimana”. Mereka lebih senang bertanya “apa”, “siapa”, dan “kapan” atau memberikan pertanyaan yang sudah jelas jawabannya. Siswa tidak dibiasakan untuk menjawab pertanyaan dengan berpikir menggunakan akal pikiran mereka. Dan celakanya lagi, tercipta mitos bahwa “lebih baik diam daripada menjawab tapi salah”. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya budaya “diam” di kalangan siswa. Kebiasaan guru tersebut salah satunya didorong oleh padatnya kurikulum yang dianut di negeri ini. Jadi kebanyakan guru sibuk mengejar deadline sehingga tidak ingin atau bahkan malas jika ada siswanya yang bertanya macam-macam yang kiranya dapat menyita waktunya. Di lain pihak guru lebih senang menggunakan kalimat-kalimat perintah; bahwa siswa “harus inilah, itulah, beginilah, begitulah, *ndak boleh begitu*, jangan seperti itu” dan lain sebagainya. Kalimat-kalimat yang mengharuskan siswa menjadi individu yang patuh, penurut dan tidak bebas dalam bertindak dan berpikir. Kenyataan yang didukung oleh “kekuatan” yang dimiliki oleh guru untuk boleh menghukum siswanya jika tidak mengikuti apa yang dikatakannya. Diakui atau tidak semua hal di atas merupakan suatu kekerasan

yang mengekang kebebasan (berpikir dan bertindak), rasa ingin tahu dan kreatifitas anak. Dan dikhawatirkan jika hal tersebut terus dilakukan maka kebebasan, rasa ingin tahu dan kreatifitas tersebut lama kelamaan akan hilang. Sistem pendidikan kita yang bertujuan untuk membuat murid menjadi patuh, sopan dan pintar sangat diaplikasikan oleh cara mengajar guru di dalam kelas. Guru lalu tentu saja menganggap murid sebagai anak yang bodoh, tidak tahu, tidak bisa dan tidak mengerti apa-apa. Sedangkan mereka menganggap diri mereka sebagai yang mahatahu, yang lebih bisa, dan yang lebih pintar. Pandangan tersebut lalu diterjemahkan sebagai pelegitimasi mereka sebagai penguasa di dalam kelas. Dan itulah mengapa mereka menggunakan istilah “Kegiatan Belajar Mengajar”, yang menjelaskan status murid dan guru. Ada jarak yang lebar antara murid yang belajar dan guru yang memberi pelajaran. Hal itu pun terlihat dari cara mengajar guru di sini yang seperti mengutip ungkapan Sartre “*mengunyah*” (*digestive*) atau memberi makan (*nutritive*) pengetahuan kepada siswa (Siti Murtiningsih, 2004:78). Guru seperti memberi makan di mana pengetahuan-pengetahuan disuapkan kepada siswa-siswanya untuk membuat mereka kenyang. Sebuah konsep yang menurut Paolo Freire sebagai “Konsep Gaya Bank”. Anak-anak menjadi terpasung kebebasannya, bahkan untuk memilih pelajaran yang mereka suka saja mereka tidak boleh. Semuanya telah diatur dan murid hanya tinggal menurut saja. Murid hanya dipandang sebagai objek dan tidak sebagai subjek. Dan apabila ada murid yang membangkang, mereka sebagai penguasa diberikan keleluasaan untuk menghukum dengan berbagai cara baik fisik dan non fisik seperti apa yang telah utarakan di atas. Dalam pelaksanaannya guru jarang sekali berdiskusi dengan murid-muridnya, guru lebih sering

berceramah di depan kelas. Hal tersebut didukung juga oleh bentuk ruang-ruang kelas yang menjadikan guru sebagai tokoh sentral di dalam kelas. Sekali lagi cara mengajar yang seperti ini merupakan suatu kekerasan yang telah membuat hak, kebebasan dalam berpikir dan bertindak, rasa ingin tahu, kreatifitas, dan karakter murid hilang. Sekarang ini dalam pengajaran sudah dikenal dengan apa yang disebut "*L'enseignement sur l'apprenant*" atau pengajaran yang ditekankan pada murid. Guru dalam sistem ini hanyalah sebagai fasilitator dimana muridlah yang harus berperan aktif dalam pembelajarannya. Guru harus memberikan otonomi yang sebesar-besarnya kepada murid-muridnya. Otonomi yang berarti pembebasan kepada mereka untuk mencari sumber-sumber belajar lainnya selain dari yang diberikan oleh guru mereka. Otonomi yang membuat guru harus bekerja keras untuk mencari strategi yang terbaik untuk dapat memberikan latihan-latihan atau tugas-tugas yang dapat merangsang murid-muridnya untuk belajar menurut kesenangan hati mereka. Di sinilah diskusi biasa terjadi; diskusi antara guru dan murid; murid dan murid. Jadi tugas guru hanya membantu dan merangsang murid untuk menemukan strategi belajar mereka masing-masing yang pada akhirnya akan membuat mereka dapat menjadi murid yang mandiri. Oleh karena itu saya cenderung untuk menggunakan ungkapan "Kegiatan Belajar-Belajar" ketimbang "Kegiatan Belajar Mengajar" karena ungkapan tersebut lebih menggambarkan posisi guru dan murid yang memang sedang dalam proses belajar dan belajar. Dominasi yang dilakukan sekolah dan pemerintah Pernahkah anda membaca pengumuman yang diberikan sekolah pada setiap menjelang Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS)? Di setiap pengumuman tersebut sekolah memperbolehkan setiap siswa yang telah menyelesaikan

administrasi mereka dengan sekolah mengikuti ujian sedangkan yang belum harap segera menyelesaikannya sebelum waktu ujian dimulai. Memang terkadang itu hanya gertakan belaka, tapi itu dapat memberikan dampak psikologis (cemas, khawatir, takut, malu, minder, stress, dan hilang kepercayaan diri) pada murid terlebih lagi mereka yang tergolong miskin sehingga pada akhirnya akan mengganggu konsentrasi mereka dalam mengerjakan ujian. Kegagalan mengerjakan ujian di negeri ini diartikan sebagai kegagalan mereka mengikuti pendidikan. Sebuah kekerasan yang sepatutnya tidak dilakukan oleh sekolah yang seharusnya menjadi tempat teraman di dunia ini. Beratnya beban yang diterima seorang murid di Indonesia dikarenakan banyaknya beban pelajaran dan padatnya jam pelajaran yang harus dilalui. Saya ingat dulu waktu sekolah saya selalu membawa tas yang penuh dengan buku pelajaran setiap harinya. Mulai dari pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris sampai Pancasila. Guru menjadi orang pertama yang dipusingkan karena mereka harus menyelesaikan apa yang sudah tertulis dalam kurikulum dan jika mereka tidak sanggup, mereka akan dicap sebagai guru yang gagal. Jadi mau tidak mau guru hanya menerangkan seadanya saja dan selalu memberikan Pekerjaan Rumah (PR) yang bertumpuk guna mengejar target kurikulum. Pemberian PR yang berlebihan telah membuat anak-anak tidak mempunyai waktu untuk bermain dan menikmati masa kecilnya yang seharusnya diisi dengan senyum dan tawa. Masa kecil mereka yang semestinya bahagia kini hanya diisi dengan kata belajar, belajar dan belajar. PR dan les-les merupakan aktivitas mereka di luar sekolah guna memberikan nilai yang baik di sekolah dan menyenangkan hati kedua orang tua mereka. Menyenangkan hati orang tua karena tidak ada satu pun orang tua yang ingin anak mereka

gagal di sekolah jadi mereka rela mengorbankan kebahagiaan masa kecil anak mereka dengan mengirim anak mereka ke tempat-tempat les atau mendatangkan guru-guru les hanya demi kebanggaan semata. Lagi-lagi anak yang menjadi korbannya. Akhirnya masih banyak kekerasan simbolik yang terjadi di sekolah yang belum terungkap. Penelitian ini bukan ditujukan untuk mengecilkan peran besar sekolah dan para guru yang telah melahirkan para pemikir hebat di negeri ini, tapi hanya untuk memperlihatkan kalau yang mereka lakukan selama ini salah dan untuk meminta supaya terjadi perubahan agar di kemudian hari pendidikan kita dapat lebih maju. Membayangkan asyiknya bersekolah di sekolahnya Tottochan pastilah sangat menyenangkan. Setiap pagi kita bisa memilih pelajaran apa yang kita suka. Bertemu guru-guru yang mau meladeni segala permintaan dan pertanyaan aneh semua muridnya. Berenang tanpa sehelai pakaian, hanya untuk menunjukkan perbedaaan antar sesama murid dan belajar menghargai kekurangan yang dimiliki orang lain. Bagi saya itu adalah gambaran sekolah yang selama ini tidak pernah saya temui dalam hidup saya. Sekolah di mana tidak ada satu pun kekerasan di dalamnya.

c. Majalah Dinding, Modal, Kekerasan Simbolik dan Normalisasi Habitus

Majalah dinding adalah salah satu media tulis ilmiah yang paling sederhana bentuknya. Dinamakan sebagai majalah dinding dikarenakan prinsip utamanya adalah sama seperti majalah. Biasanya ditempatkan di dinding-dinding sekolah. Bentuknya penyajiannya bisa berupa tulisan, gambar, karikatur, pamlet, berbagai macam hasil karya siswa, teka-teki silang, cerita bersambung, cerita bergambar yang disusun secara menarik. Semua materi disusun

menggunakan azas keharmonisan, sehingga tampilan wajah majalah dinding menjadi menarik. Material majalah dinding biasanya terbuat dari kardus, kertas HVS, tripleks, kertas karton dan bahan lain yang relatif murah harganya. Peranan utama majalah dinding adalah sebagai salah satu fasilitas siswa unjuk kreativitas, tetapi juga bisa digunakan sekolah untuk mendeminasikan nilai-nilai sekolah. Selain itu manfaat majalah dinding bagi sekolah adalah sebagai media informasi, komunikasi, rekreasi, kreatifitas, menumbuhkan kebiasaan membaca, pengisi waktu luang, melatih kemampuan menulis dan menjalin komunikasi antar siswa, guru dan manajemen sekolah.

Jika kita baca dan hayati sepintas lalu tentang deskripsi majalah dinding di atas seolah-olah tidak ada yang salah dan menyimpang dari keberadaan majalah dinding yang adalah di Madrasah Ibtida'iyah Negeri (MIN) Balikpapan. Semua terkesan baik dan mendukung proses pendidikan yang diselenggarakan madrasah, tetapi jika cermati lebih mendalam ternyata terdapat nilai-nilai kekerasan yang dikandung didalamnya seperti berikut ini:



Gambar 1⁴⁷

1. Keimanan. Nilai keimanan jika dibaca sepintas lalu bagi orang islam kebanyakan tentu akan menyetujui karena dianggap sudah alamiah atau semestinya demikian adanya. Tidak ada yang salah dengan nilai keimanan. Tetapi jika ditelaah lebih dalam ternyata nilai keimanan itu adalah habitus orang elit (kiyai/ustad) yang dipaksakan kepada kaum bawah supaya mengikutinya. Keimanan juga merupakan modal yang dimiliki oleh kaum elit agama. Tentu ini bukan masalah benar/salahnya nilai keimanan tetapi ini merupakan tindakan kekerasan simbolik yang dilakukan kaum elit terhadap kaum bawah. Kaum bawah dipaksa untuk mengikuti budaya atau habitus orang elit yang dianggap

⁴⁷ Dokumen Mading MIN Balikpapan

sebagai budaya atau habitus yang baik dan seharusnya dimiliki oleh setiap murid di MIN Balikpapan.

2. Keamanan. Nilai keamanan jika ditelaah secara sepintas lalu, memang tidak akan kelihatan sebagai salah satu mekanisme kekerasan simbolik yang ada di MIN Balikpapan. Dikarenakan keamanan merupakan unsur utama dalam kegiatan belajar-mengajar di sekolah secara umum, tetapi jika ditelaah secara seksama dan mendalam ternyata nilai keamanan merupakan habitus kaum elit yang dipaksakan kepada kaum bawah supaya diikuti. Kita bisa menyaksikan bahwa kaum elit dengan rumah besar dan megah dengan konstruksi besi baja yang kuat, pintu besi yang susah untuk dibuka, dikelilingi tembok yang tinggi masih memerlukan penjaga keamanan (satpam) di rumahnya. Itu semua bisa dilakukan oleh kaum elit dikarenakan mereka memiliki modal ekonomi yang memadai. Adapapun muara dari itu semua dimaksudkan tidak lain adalah untuk memberikan rasa aman kepada kaum elit. Mereka sangat takut hartanya dicuri, rahasianya diketahui dan berbagai alasan yang lain. Untuk itu mereka sangat paranoid dengan frasa rasa aman, celaknya hal itu ditiru oleh MIN Balikpapan. Sampai-sampai harus membuat mading tentang keamanan, padahal hal itu merupakan habitus kaum elit. Akhirnya dengan fungsi mading sebagai media informasi yang persuasif (mengelabui), nilai keamanan merupakan salah satu bentuk kekerasan simbolik yang ada di MIN Balikpapan.
3. Ketertiban. Nilai ketertiban merupakan salah satu habitus kaum elit. Kita bisa melihat pada kaum elit, bagaimana mereka mengatur keluarga dengan tertib, belajar dengan tertib, makan dengan tertib, duduk dengan tertib, ke kamar mandi dengan tertib, berjalan dengan tertib

bahkan tidurpun dengan tertib dll. Berbeda dengan kaum bawah, makan dengan sembarangan, tidur sembarangan, duduk sembarangan, belajar sembarangan buang hajat sembarangan dll. Dengan demikian ketertiban merupakan bentuk ritual kekerasan simbolik yang coba diinternalisasikan oleh kaum elit di MIN Balikpapan kepada siswa dari kaum bawah.

4. Kebersihan. Nilai kebersihan merupakan habitus kaum elit. Bisa diketahui bagaimana kaum elit selalu menjaga lingkungan tetap bersih. Lantai rumah selalu di pel setiap hari untuk menjaga kebersihannya, mobil/motor selalu dicuci setiap hari supaya bersih, baju dipakai sekali kemudian dicuci supaya tetap bersih, halaman selalu disapu supaya tetap bersih bahkan kaum elit bersedia mengangkat asisten rumah tangga khusus untuk kebersihan rumah karena memiliki modal ekonomi dll. Berbeda dengan kaum bawah, mereka membersihkan rumah biasanya satu minggu sekali atau jika akan ada tamu, mereka tidak bisa mengangkat asisten rumah tangga untuk membersihkan rumah karena tidak punya modal ekonomi seperti kaum elit, mereka lebih sibuk kerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga daripada harus membersihkan rumah dll. Dengan demikian nilai kebersihan yang coba ditanamkan oleh MIN Balikpapan terhadap para muridnya merupakan salah satu wujud mekanisme kekerasan simbolik yang ada pada madrasah tersebut.
5. Keindahan. Nilai keindahan merupakan salah satu habitus kaum elit. Bisa kita saksikan bagaimana rumah orang elit dibangun dengan gaya eropa yang indah dan artistik, megah, mewah, elegan dan pastinya mahal. Terbuat dari batu marmer yang unik, dihiasi dengan lampu kristal yang mempesona pandangan mata dll. Seringkali mereka

berjalan-jalan keluar kota untuk menyaksikan keindahan alam terbuka (gunung, pantai, kota) bahkan keluar negeri sekedar untuk menyaksikan keindahan musim salju yang tidak ada di Indonesia, dengan satu tujuan yaitu menikmati keindahan dunia. Itu semua bisa dilakukan oleh kaum elit dikarenakan mereka memiliki modal ekonomi yang memadai. Sementara bagi kaum bawah, jangankan memikirkan keindahan alam terbuka, bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari sudah sangat beruntung sekali. Jangankan memiliki rumah megah, mewah dan indah sudah memiliki rumah tipe sangat sederhana sekali saja seumur hidup sudah sangat syukur sekali (RS9).

6. Kerindangan. Kerindangan juga termasuk dari habitus kaum elit. Sering kita menyaksikan rumah kaum elit yang ditanami pohon-pohon yang rindang dengan tujuan menjaga kualitas udara di sekitar rumah agar tetap sejuk dan segar. Disamping juga berfungsi sebagai tanaman yang bisa dinikmati buahnya. Tetapi perlu diketahui bahwa biasanya tanaman yang ditanam kaum elit itu adalah tanaman yang relatif mahal harga bibitnya sehingga kaum bawah tidak akan sanggup untuk membelinya. Sehingga kaum bawah hanya bisa menyaksikan bagaimana lingkungan rumah kaum elit yang rindang sementara lingkungan keluarga kaum bawah kering dan panas. Demikianlah bagaimana MIN Balikpapan telah berubah fungsinya menjadi agen kekerasan simbolik bukannya menjadi agen transformasi masyarakat.
7. Kekeluargaan. Nilai kekeluargaan juga merupakan salah satu habitus kaum elit. Kita bisa menyaksikan bagaimana nilai kekeluargaan dari kaum elit itu selalu dijaga dan dirawat. Ritual reoni keluarga, ritual halal bi halal, ritual

selamatan, ritual pengantinan, ritual sunatan dll. Merupakan bentuk konkrit nilai kekeluargaan yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat kaum elit kita. Bagi kaum elit ritual-ritual tersebut telah menjadi habitus dan kebutuhan sementara bagi kaum bawah jika ingin mengikuti ritual-ritual tersebut tentu dengan agak memaksakan diri. Dikarenakan tidak dimilikinya modal ekonomi yang memadai. Akhirnya untuk memenuhi kebutuhan nilai kekeluargaan dilakukan dengan meminjam kesana-kemari bahkan tidak jarang yang terjebak hutang pada rentenir. Dengan demikian jelaslah bahwa nilai kekeluargaan yang di pajang pada mading MIN Balikpapan merupakan mekanisme kekerasan simbolik yang dilakukan pihak madrasah kepada murid.



Gambar 2⁴⁸

Buanglah sampah pada tempatnya dan pilahlah Allah SWT Indah dan Cinta Keindahan seperti gambar pada majalah dinding di atas merupakan salah satu wujud nyata habitus kaum elit yang coba dipaksakan secara halus kepada kaum bawah. Pada keluarga kaum elit, tentu segala kebutuhan yang ada pada rumah tangga akan terpenuhi dengan baik. Misalnya kebutuhan rekreasi, kebutuhan buku,

⁴⁸ Dokumentasi Mading MIN Balikpapan

kebutuhan makanan yang bergizi, kebutuhan transportasi, kebutuhan komunikasi bahkan sampai kebutuhan tempat sampah tentu telah tersedia dengan baik dan lengkap. Bahkan bagi kaum elit, kebutuhan tempat sampah itu telah di sesuaikan dengan peruntukan sampah yang dihasilkan. Misalnya tempat sampah plastik dipisahkan dengan tempat sampah organik, tempat sampah basah dipisahkan dengan tempat sampah yang kering. Berbanding terbalik dengan keadaan kaum bawah, jangankan untuk memenuhi kebutuhan liburan, kebutuhan makanan bergizi, kebutuhan transportasi dan kebutuhan komunikasi, kebutuhan tempat sampah yang terbagi menjadi sampah plastik, sampah organik, sampah kering dan sampah basahpun tidak ada. Jangankan menyediakan tempat sampah yang terpisah, yang ada malah sampah langsung dibuang pada lubang sampah yang digali di pekarangan rumah, itu dengan catatan keluarga kaum bawah masih punya sisa tanah untuk membuat lubang sampah. Jika tidak memiliki sisa lahan untuk membuat lubang sampah yang terjadi malah sampah dibuang dibuang disungai. Begitulah perbedaan keadaan keluarga kaum elit dengan keluarga kaum bawah. Keluarga kaum elit dengan habitusnya yang tertib membuang sampah pada tempatnya dan dipilah antara sampah plastik, sampah organik, sampah basah dan sampah kering telah diabadikan dan dijadikan rule model di MIN Balikpapan. Maka yang terjadi adalah kekerasan simbolik habitus orang elit dipaksakan kepada kaum bawah.



Gambar 3⁴⁹

Profil siswa MIN Balikpapan yang dipampang pada majalah dinding tersebut diatas merupakan salah satu wujud nyata dari kekerasan simbolik yang terjadi di MIN Balikpapan. Dari delapan profil yang terpampang tersebut dapat kita ketahui bahwa semuanya merupakan cerminan dari habitus kaum elit. Antara lain:

1. Berakhlak. Akhlak adalah habitus kaum elit yang paling tinggi nilainya. Hanya orang-orang elitlah yang bisa memiliki nilai ini. Tidak peduli orang tersebut kaya, pintar, jenius atau seperti apapun mereka belum tentu memiliki nilai berakhlak ini. Hanya orang dengan kualitas individu yang luar biasa yang bisa memiliki kualitas akhlak yang baik. Sementara kaum bawah identik dengan hal yang tidak bermoral, misalnya suka mencuri, korupsi, merampok, jorok dll. Jadi majalah dinding profil siswa

⁴⁹ Dokumen Mading MIN Balikpapan

berakhlak merupakan perwujudan dari kekerasan simbolik pemaksaan habitus kaum elit kepada kaum bawah merupakan sebuah kenyataan.

2. Jujur. Nilai jujur juga merupakan wujud habitus kaum elit yang coba diinternalisasikan atau dinormalisasikan kepada kaum bawah. Kejujuran merupakan nilai yang sudah sangat sulit kita temukan di negeri ini. Tidak peduli dia merupakan pejabat tinggi, pejabat menengah, pejabat rendah, pedagang, petani atau buruh jika dia jujur maka dia adalah kaum elit. Jujur merupakan nilai yang telah mengalami anomali dalam masyarakat. Jika ada pejabat jujur dia akan dimusuhi oleh teman-temannya, jika ada pedagang jujur dia akan dikucilkan oleh pedagang yang lainnya, jika ada petani yang jujur maka disebut sebagai orang yang lugu. Begitu sulitnya menemukan nilai jujur ini pada seorang individu di negeri ini. Kenyataannya di negeri ini kebanyakan dihuni oleh kaum rendah dalam nilai kejujuran. Sehingga siapapun dia sepanjang jujur maka dia merupakan kaum elit. Sehingga menjadi jelas bagaimana habitus kaum elit (jujur) coba dinormalisasikan di MIN Balikpapan.
3. Kreatif. Kreatif merupakan wujud habitus kaum elit. Dengan penguasaan berbagai modal (ekonomi, budaya, agama, Sosial dll) oleh kaum elit, menjadikan mereka menjadi manusia yang kreatif. Sejak kecil mereka telah dilatih dan dirangsang dengan berbagai fasilitas yang memadai untuk bisa menjadi manusia yang kreatif kelak di kemudian hari. Akhirnya ketika kaum elit telah selesai dari bangku kuliah dan kembali ke masyarakat mereka menjadi kaum yang kreatif karena sudah terbiasa dengan dukungan fasilitas yang memadai sedari awal kehidupannya. Sementara bagi kaum bawah, kreatif merupakan jargon yang indah untuk diucapkan tetapi

sangat sulit untuk dilakukan. Dikarenakan mereka tidak memiliki modal untuk bisa mendukung daya kreatifitas. Jadi jelas bahwa kreatif itu merupakan habitus kaum elit. Dengan dipampangnya kreatif dalam majalah dinding di MIN Balikpapan, hal tersebut bisa dimaknai sebagai tindakan normalisasi habitus kelas elit kepada kaum bawah atau bisa juga disebut sebagai tindakan kekerasan simbolik dari kaum elit kepada kaum bawah yang di legitimasi oleh madrasah.

4. Percaya Diri. Percaya diri juga merupakan habitus kaum elit yang paling nyata. Bagi kaum elit, dengan berbagai fasilitas dan kepemilikan modal dari mulai masa kanak-kanak sampai dewasa tentu akan membuat rasa percaya diri mereka sangat kuat. Dikarenakan mereka telah terbiasa dengan berbagai hal yang dianggap asing oleh sebagian orang. Misalnya, ketika kaum elit berada di bandara mereka percaya diri karena sudah sering ke bandara, ketika mereka masuk bank atau masuk hotel mereka sangat percaya diri karena sudah seringkali ke bank atau ke hotel, ketika kaum elit berada dalam pesawat mereka dengan santai dan percaya diri menikmati segala fasilitas yang diberikan karena sudah sering naik pesawat, ketika kaum elit berusaha untuk melamar pekerjaan di sebuah kantor, mereka dengan santai dan percaya diri melakukan wawancara dengan pemilik perusahaan. Bahkan ketika kaum elit mendaftarkan anaknya untuk sekolah, mereka dengan santai dan percaya diri (kadang-kadang agak sombong) datang ke sekolah untuk mendaftarkan anaknya. Sementara bagi kaum bawah, ketika datang ke bandara atau ke bank atau ke hotel (bahkan mereka tidak pernah datang) atau ketika mereka naik pesawat (sering belum pernah naik pesawat) mereka akan minder, malu, risih,

grogri dan berbagai perasaan negatif yang tidak bisa dikendalikan. Segala perasaan negatif tersebut sulit untuk dikendalikan dikarenakan mereka tidak pernah atau jarang sekali menikmati fasilitas kaum elit tersebut. Tidak pernah atau jarang menikmati fasilitas tersebut dikarenakan ketiadaan modal bagi kaum bawah. Jadi ketika MIN Balikpapan memajang nilai percaya diri di majalah dinding madrasah, hal itu merupakan bentuk kekerasan simbolik oleh kaum elit terhadap kaum bawah.

5. Mandiri. Mandiri juga merupakan wujud habitus kaum elit. Dengan berbagai fasilitas yang dimiliki kaum elit menjadikan mereka bisa memberikan sesuatu yang terbaik kepada anak-anaknya. Anak-anak kaum elit sedari kecil sudah dididik dengan metode pendidikan yang mandiri. Misalnya mereka ketika sudah usia 7 tahun kamar tidurnya dipisah dengan kamar tidur orang tuanya. Di lingkungan keluarga mereka sering melakukan diskusi mengenai masa depan keluarga dengan melibatkan anak (anak dimintai pendapatnya) sehingga mereka ke depan akan menjadi lebih mandiri dikarenakan terbiasa berfikir kritis dan dihargai pendapatnya oleh orang tua. Bahkan tidak jarang orang tua kaum elit menyewa jasa seorang profesional untuk membantu anak-anaknya supaya bisa menjadi orang yang mandiri. Berkebalikan dengan kaum bawah, dikarenakan ketiadaan modal pada keluarga mereka, jangankan untuk memisah kamar anak yang sudah berumur 7 tahun yang ada malah mereka tidur di ruang tamu secara bersama-sama, di lingkungan keluarga jangankan diskusi antar anggota keluarga yang ada malah pertengkaran memperebutkan mainan atau makanan, pada keluarga bawah jangankan untuk menyewa jasa profesional untuk mengajari kemandirian anak yang ada adalah bisa makan 3 kali sehari saja sudah syukur. Jadi

sudah menjadi sangat jelas sekali bahwa kemandirian merupakan habitus kaum elit yang dipaksakan kepada kaum bawah.

6. Disiplin dan Bertanggung-jawab. Nilai disiplin dan bertanggung-jawab merupakan salah satu habitus utama kaum elit. Semenjak kecil kaum elit telah mendidik anak-anak mereka untuk selalu disiplin dan bertanggung-jawab. Misalnya jadwal kegiatan mereka dalam satu hari sudah terprogram dengan rinci. Misalnya setelah bangun tidur mereka harus segera mandi, setelah mandi mereka sholat subuh berjama'ah, setelah sholat subuh mereka berganti baju seragam sekolah dilanjutkan sarapan, setelah itu mereka berangkat sekolah sampai siang atau bahkan sore hari, setelah pulang dari rumah mereka istirahat sebentar baru bermain dengan teman sebayanya baru dilanjutkan sholat ashar berjama'ah setelah itu mereka mengaji di mushalla atau di langgar, kemudian sholat maghrib dan isya' berjama'ah setelah itu baru belajar dengan mengulang pelajaran yang diberikan di sekolah atau mengerjakan PR. Semua kegiatan kaum elit tersebut dapat dilakukan dikarenakan mereka sudah mapan dengan penguasaan atas modal secara memadai, sehingga mereka sudah tidak memikirkan bagaimana susahnyanya mencukupi kebutuhan sehari-hari. Semua kegiatan itu dilaksanakan dengan penuh disiplin dan bertanggung-jawab. Bagi kaum elit disiplin dan tanggung-jawab merupakan kunci untuk meraih kesuksesan. Mulai sejak dini anak-anak mereka latih dengan disiplin dan tanggung-jawab. Berbeda dengan kaum bawah, habitus mereka adalah malas-malasan, ogah-ogahan, tidak disiplin dan suka membuat keributan baik dengan sesama saudara maupun sesama tetangga atau teman. Kalaupun mereka tidak membuat keributan, mereka sudah

disibukkan dengan bekerja membantu orang tua untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tidak ada nilai disiplin dan tanggung-jawab pada kaum bawah yang ada hanya bekerja dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Jadi dengan dipasangnya majalah dinding yang berbunyi disiplin dan bertanggung-jawab pada MIN Balikpapan ini mengandaikan sebuah kondisi sekolah seperti kondisi keluarga kaum elit yang harus diterapkan kepada semua murid terutama dari kaum bawah.

7. Peduli. Peduli juga merupakan wujud habitus dari kaum elit. Sedari kecil kaum elit sudah dibiasakan untuk peduli dengan segala sesuatu. Misalnya mereka diajari untuk peduli lingkungan, peduli sesama (menjadi donatur yayasan), peduli kepada sesama manusia yang ditimpa bencana (memberi sumbangan kebakaran), memberikan pakaian yang layak pakai untuk orang lain yang membutuhkan dll. Itu semua dapat dilakukan oleh kaum elit dikarenakan mereka telah memiliki modal ekonomi yang memadai. Dengan dimilikinya modal ekonomi secara memadai kemudian dengan tingkat kepedulian sosial yang tinggi terhadap sesama membuat kaum elit mendapatkan privilege berupa modal sosial dan modal simbolik di mata masyarakat sehingga kaum elit selalu dihargai, dihormati dan disanjung atau dipuja. Sementara bagi kaum bawah, satu-satunya hal yang mereka pedulikan dalam hidup mereka adalah bagaimana mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari untuk diri sendiri. Jadi tidak ada kata peduli dalam kamus hidup kaum bawah, walaupun ada benih-benih kata peduli dalam sanubari kaum bawah, dia telah mati sebelum lahir dalam tindakan kaum bawah. Jadi dengan slogan “peduli” yang dipampang pada majalah dinding oleh MIN Balikpapan merupakan bentuk

sosialisasi/naturalisasi/normalisasi habitus kaum elit kepada kaum bawah. Itu merupakan bentuk kekerasan simbolik yang dilakukan kaum elit kepada kaum bawah dengan media MIN Balikpapan.

8. Sopan. Nilai sopan juga merupakan bentuk habitus kaum elit. Semenjak masa kecil kemudian remaja sampai mereka dewasa dan tua tidak bisa lepas dengan nilai “sopan”. Kata sopan sudah mendarah daging dalam kehidupan kaum elit. Kebutuhan akan kata sopan bagi kaum elit sudah pada taraf seperti kebutuhan makhluk hidup akan oksigen. Jika makhluk hidup tidak bisa hidup tanpa oksigen, demikian juga kaum elit tidak bisa hidup tanpa kesopanan. Dalam keluarga elit segala sesuatunya harus selalu dalam batas kesopanan. Duduk dengan sopan, makan dengan sopan, mandi dengan sopan, berpakaian dengan sopan, berjalan dengan sopan, tidur dengan sopan dll. Bahkan ada sekolah kepribadian yang khusus untuk memberikan pelajaran tentang kesopanan bagi kaum elit (tentunya dengan biaya yang sangat mahal). Sementara bagi kaum bawah, kata sopan mungkin juga sering terdengar di telinga mereka akan tetapi segera lenyap dihembus oleh angin kebutuhan hidup sehari-hari. Bagi kaum bawah kata sopan tidak sebegitu penting dibandingkan dengan mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Peduli apa dengan kata sopan jika perut tidak diisi selama tiga hari misalnya. Jadi habitus kaum elit adalah sopan sementara kaum bawah habitusnya adalah barbar. Dengan dinormalisasikannya kata sopan di MIN Balikpapan itu merupakan bentuk kekerasan simbolik dari kaum elit kepada kaum bawah.



Gambar 4⁵⁰

Majalah dinding lain yang merupakan bentuk kekerasan simbolik kaum elit terhadap kaum bawah adalah yang berbunyi “Mulailah Hidup Sehat, Waspadalah Jajanan Pembawa Penyakit, Plastik, Pewarna, Pengawet MSG, Kotor dan Jorok Kebersihan Tanda Orang Beriman”. Waspada jajanan pembawa penyakit, merupakan pesan yang sangat menohok dari kaum elit kepada kaum bawah. Dalam pesan tersebut dengan sangat jelas bisa dipahami bahwa jika membeli jajanan di sekolah/madrasah akan terkena penyakit. Dengan asumsi bahwa jajanan yang dijual di sekolah/madrasah tidak bersih/sehat/higienis seperti habitus kaum elit miliki. Bagi kaum elit makanan dan jajanan yang sehat itu hanya ada di rumah makan mewah, swalayan mewah, mall dan restoran. Sementara warung tegal, kantin sekolah/madrasah dan toko kelontong jelas tidak sehat karena kotor, jorok dan kumuh.

⁵⁰ Dokumen Mading MIN Balikpapan

Penggunaan plastik, pewarna makanan, pengawet, MSG, kotor dan jorok merupan habitus kaum bawah, untuk itu harus di jauhi, dibuang jauh-jauh dan dijadikan musuh bersama. Jika ada kaum bawah yang masih bertahan dengan habitus tersebut, akan disebut sebagai orang jorok, orang kotor, orang udik bahkan ada yang sampai menyebut sebagai orang barbar (tidak berperadaban).

Kemudian ada kalimat yang berbunyi “kebersihan tanda orang beriman” ini juga merupakan bentuk nyata dari kekerasan simbolik yang dilakukan oleh kaum elit terhadap kaum bawah. Bagi kaum elit yang serba berkecukupan, masalah kebersihan dengan mudah bisa diselesaikan oleh para asisten rumah tangganya. Kebersihan sebagai tanda orang beriman bisa dimaknai sebagai hanya orang elitlah yang beriman dikarenakan selalu bersih sementara bagi kaum bawah bisa dikatan sebagai orang yang tidak beriman karena kotor dan jorok.



Gambar 5⁵¹

⁵¹ Dokumen Mading MIN Balikpapan

Majalah dinding berikutnya yang merupakan bentuk kekerasan simbolik kaum elit terhadap kaum bawah adalah buku jendela dunia dan dijadikan buku sebagai pengisi waktu luang mu. Bagi kaum elit, kegiatan membaca merupakan ritual wajib yang harus dilakukan setiap hari. Kegiatan membaca disini bahkan sudah ditanamkan semenjak anak masih di dalam kandungan seorang ibu (pendidikan prenatal). Setelah anak lahir dan belum bisa membaca sendiri, kegiatan membaca dilakukan oleh seorang ibu atau ayah dengan cara mendongengkan cerita dari buku kepada anaknya. Setelah bisa membaca, anak-anak kaum elit sering dibawakan buku bacaan oleh orang tuanya karena pekerjaan mereka tidak jauh dari kegiatan membaca. Selain itu anak-anak kaum elit sering juga diajak jalan ke toko buku atau perpustakaan untuk membeli/meminjam buku sekaligus berlibur. Sementara jika anak-anak kaum elit telah menginjak usia remaja, mereka sering ikut les untuk menambah materi pelajaran yang tidak diberikan dari sekolah/madrasah. Akhirnya ketika anak kaum elit tersebut telah memasuki usia dewasa mereka telah terbiasa dengan budaya baca. Membaca merupakan habitus kaum elit. Sementara bagi kaum bawah, kegiatan membaca adalah ritual asing. Dikarenakan orang tua kaum bawah yang kurang berpendidikan, ketika masih mengandung anaknya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sementara setelah anak lahir, ketika malam hari menjelang tidur anak juga tidak pernah didongengin oleh orang tuanya karena orang tua sudah terlalu capek dengan pekerjaan pada siang hari. Setelah anak kaum bawah menginjak usia sekolah, anak kaum bawah juga disekolahkan tetapi ketika di sekolah anak kaum bawah sering mendapat perlakuan yang kurang simpatik dari guru dikarenakan mereka belum bisa membaca. Guru sering mengeluh karena anak dari kaum

bawah sering didapati sulit untuk diajari membaca. Guru sering mengeluh karena kemampuan akademik anak kaum bawah sering kali jauh dibawah rata-rata. Anak kaum bawah juga tidak bisa ikut untuk les privat untuk menambah materi pelajaran karena orang tuanya tidak memiliki biaya. Demikianlah buku jendela dunia merupakan habitus kaum elit yang dipaksakan kepada kaum bawah. Terjadilah kekerasan simbolik di MIN Balikpapan lewat media malajah dinding.



Gambar 6⁵²

Gambar 6 diatas merupakan bentuk kekerasan simbolik yang kesekian di MIN Balikpapan.

1. Salam. Mengucap salam merupakan habitus kaum elit. Anak-anak kaum elit semenjak kecil sudah dibiasakan untuk mengucapkan salam setiap memasuki rumah ataupun keluar rumah. Setiap bertemu dengan orang tua, saudara, kakak, adik atau bertemu kakek-nenek selalu diajari untuk mengucapkan salam. Salam bagi kaum elit

⁵² Dokumen Mading MIN Balikpapan

dimaknai sebagai ucapan sapaan sekaligus do'a. Sehingga jika ada anak ketika bertemu dengan orang tua atau saudara atau kakek dan nenek tidak mengucapkan salam dianggap tidak sopan atau tidak beretika. Berbeda dengan kaum bawah, dikarenakan pendidikan yang mereka terima kurang begitu bagus dan dukungan keluarga yang juga kurang memadai sehingga ucapan salam bagi kaum bawah belum sampai kepada taraf kebiasaan. Baru sebatas wacana yang masih jauh pelaksanaan. Dengan dipampangnya salam pada majalah dinding MIN Balikpapan, ini merupakan bentuk kekerasan simbolik kaum elit kepada kaum bawah, berupa pemaksaan habitus kaum elit kepada kaum bawah.

2. Senyum. Senyum juga merupakan wujud habitus kaum elit. Dikarenakan kaum elit sudah terbiasa dengan pergaulan yang kosmopolitan, sering bertemu bahkan bergaul dengan orang-orang penting dimana sudah menjadi rahasia umum bahwa jika bergaul dengan orang-orang penting harus selalu ramah dan tersenyum ketika bertemu walaupun dalam hati saling membenci, tetapi tampilan luarnya dituntut untuk selalu halus dan lembut dengan diwaliki oleh senyuman. Bahkan ada tokoh nasional yang mendidik anaknya untuk selalu tersenyum jika bertemu dengan para tamu walaupun kakinya lagi terinjak oleh orang lain. Senyum bagi kaum elit adalah tindakan kepura-puraan belaka. Senyum dimaknai sebagai media diplomasi dan simbol status keberadaban dari kaum elit. Jika ada orang yang ketika bertemu orang lain tidak tersenyum bisa dikatakan sebagai orang tersebut tidak beradab atau tidak beretika. Berbeda dengan kaum bawah yang terbiasa dengan pergaulan dengan orang bawah, kaum bawah dalam pergaulannya selalu bersikap terbuka dan polos. Tidak ada sikap

kepura-puraan dalam kehidupan kaum bawah. Kaum bawah jika sedang bahagia akan terwujud dalam senyum yang selalu terkembang di wajahnya, demikian juga jika sedang tidak enak hati mereka akan tampil bermuram durja. Kaum bawah dalam tampilannya selalu menampilkan kondisi apa adanya tanpa rekayasa. Jadi dengan kata senyum yang ditampilkan pada majalah dinding MIN Balikpapan tersebut, itu menunjukkan bagaimana habitus kaum elit dipaksakan kepada kaum bawah.

3. Sapa. Menyapa orang lain secara terlebih dahulu juga merupakan habitus kaum elit. Bagi kaum elit untuk bisa diterima di tengah-tengah masyarakat, mereka harus dapat membawakan diri sebaik-baiknya. Salah satu strategi untuk bisa diterima di masyarakat adalah dengan menyapa terlebih dahulu kepada siapa saja yang ditemui, lebih-lebih jika ada agenda/kepentingan dengan masyarakat tersebut. Jika perlu sebelum datang kepada masyarakat tersebut, orang-orang elit akan melakukan observasi terlebih dahulu tentang masyarakat yang bersangkutan, menyangkut profesinya, kebiasaannya, budayanya dan tentu tidak kalah penting adalah nama-nama orang dari masyarakat tersebut. Jadi ketika kaum elit bertemu dengan kaum bawah, dengan lemah-lembut mereka akan menyapa kaum bawah terlebih dahulu karena mereka telah mengetahui nama-nama kaum bawah tersebut. Bukan kebetulan jika kaum elit menyapa terlebih dahulu kepada kaum bawah, semua itu dilakukan dengan tujuan supaya kaum bawah merasa diperhatikan, lebih dihargai dan merasa lebih familiar. Dengan perasaan positif yang telah dibangun pada awal pertemuan, kaum elit berharap agenda kaum elit akan sukses tanpa hambatan. Demikianlah habitus kaum elit

“menyapa” terlebih dahulu itu dipraktikkan kepada kaum bawah. Bagi kaum bawah, tidak ada pilihan lain selain mengikuti habitus kaum elit.

4. Sopan. Sopan bisa dimaknai sebagai hormat dan takzim terhadap tata tertib menurut adat yang baik. Atau bisa juga dimaknai sebagai orang yang beradab, tahu adat dan baik budi bahasanya. Serta bisa juga dimaknai sebagai orang yang baik tingkah-lakunya (perbuatannya). Sebagai sebuah habitus kaum elit, sopan merupakan norma yang paling mencolok membedakan antara kaum elit dengan kaum bawah. Bagi kaum elit, nilai kesopanan sudah ditanamkan semenjak anak-anak mereka masih kecil. Dimulai dari cara makan harus tenang, tidak bersuara/berisik, mempersilahkan orang tua terlebih dahulu dll. Berbicara kepada orang tua harus dengan suara yang lemah lembut tidak boleh dengan suara nyaring apalagi membentak dll. Jika keluar atau masuk rumah harus selalu mengucapkan salam dll. Sementara bagi kaum bawah, para orang tua sudah tidak ada waktu untuk mengajari anak-anaknya nilai kesopanan. Waktu mereka sudah habis digunakan untuk kerja mencari nafkah demi mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari. Ketika orang tua kaum bawah datang ke rumah, mereka sudah lelah tidak sempat untuk mengajari anak-anaknya tentang nilai kesopanan. Demikianlah sopan itu merupakan habitus kaum elit yang dipaksakan kepada kaum bawah yang dimediasi oleh MIN Balikpapan.
5. Santun. Santun bisa dimaknai sebagai halus, sabar dan tenang. Bisa juga dimaknai sebagai suka mengasihi dan berbelas-kasihan kepada sesama orang yang sedang mengalami kesulitan. Atau bisa juga dimaknai sebagai orang yang suka memberikan bantuan kepada kaum yang membutuhkan. Sebagai habitus kaum elit, santun sudah

diajarkan kepada keturunan mereka semenjak anak-anak. Maka tidak mengherankan ketika kita menyaksikan anak-anak kaum elit yang diajak oleh orang tuanya datang ke panti asuhan, panti jompo ke yayasan dll. Untuk memberikan santunan dan bantuan. Itu semua dilakukan oleh kaum elit untuk mengajarkan kepada anak-anaknya tentang nilai kesantunan. Dengan datang ke panti asuhan, panti jompo dan ke yayasan, para orang tua mengajari anak-anak mereka untuk selalu bersyukur atas kenikmatan yang mereka dapatkan selama ini, dan yang tidak kalah pentingnya dari hanya rasa syukur adalah untuk selalu bekerja keras supaya nasib mereka tidak seperti yang ada di panti asuhan, panti jompo atau yayasan tersebut. Sementara bagi kaum bawah, nilai santun merupakan kalimat yang indah diucapkan tetapi sulit untuk direalisasikan. Atau dengan kata lain bukan habitus kaum bawah. Dengan demikian jelas bagaimana kekerasan simbolik itu bekerja dengan cara memaksakan habitus kaum elit kepada kaum bawah dengan memanfaatkan media majalah dinding MIN Balikpapan.



Gambar 7⁵³

⁵³ Dokumen Mading MIN Balikpapan

Kekerasan simbolik berikutnya yang terdapat di MIN Balikpapan adalah majalah dinding berupa hiasan yang ada pada kelas siswa. Majalah dinding/hiasan dinding seperti pada gambar di atas menggambarkan bagaimana suasana/kondisi ruang tidur/kamar tidur pada kaum elit didesain atau ditata. Pada ruang tidur/kamar tidur kaum elit terdapat pernak-pernik/hiasan dinding yang menghiasi segenap penjuru. Hal demikian dimaksudkan untuk menambah keindahan/estetika ruangan sekaligus untuk memberikan motivasi/menginternalisasikan nilai-nilai positif penghuninya supaya lebih baik dalam menjalani kehidupan. Disamping itu, dengan adanya hal tersebut dimaksudkan supaya setiap penghuni ruangan tersebut bisa terbiasa aktif dan kreatif dalam kegiatan sehari-hari. Tetapi yang perlu diingat bahwa pernak-pernik tersebut walaupun mungkin terlihat sederhana dan dari bahan yang murah bukanlah gratis, itu juga harus membeli. Berbeda dengan kaum elit, yang setiap anak memiliki kamar tidur sendiri dengan dipenuhi berbagai ornamen keindahan dan kreatifitas, kamar anak kaum bawah tidaklah memiliki aksesoris seperti gambar di atas. Bagi kaum bawah jangankan ruang tidur yang dipenuhi dengan hiasan yang indah dan kreatif, bahkan banyak kaum bawah yang tidurnya masih bersama dengan orang tua, saudara, kakek dan nenek secara bersamaan pada ruang keluarga. Tidak ada ornamen, tidak aksesoris dan tidak ada kamar tidur pribadi anak. Jadi dengan adanya aksesoris yang dipampang pada ruang kelas di MIN Balikpapan tersebut mengindikasikan bagaimana kekerasan simbolik itu terjadi, habitus kelas elit diinternalisasikan kepada kaum bawah secara halus tanpa disadari oleh siswa, orang tua, guru, kepala madrasah bahkan mungkin yang memasang hiasan tersebut juga tidak menyadarinya.



Gambar 8⁵⁴

Kekerasan simbolik pada majalah dinding MIN Balikpapan berikutnya adalah *Save Water For Better Life* yang terjemahan bebasnya kira-kira berarti hematlah air untuk kehidupan yang lebih baik. Kalimat ini adalah ucapan khas kaum elit. Dengan berbagai modal yang berhasil dikapitalisasi oleh kaum elit, baik kapital sosial, kapital ekonomi, kapital budaya, kapitas agama, kapital pendidikan dll., kaum elit telah terbiasa dengan hal-hal asing dan rumit bagi kaum bawah. Dikarenakan kaum elit memiliki kapital pendidikan yang lebih memadai, membuat mereka lebih tahu akan pentingnya menjaga pasokan air tanah yang ada. Akan tetapi pengetahuan tersebut tidak serta merta membuat kaum elit lebih sadar. Kita bisa menyaksikan di kota-kota besar yang air tanahnya menjadi asin, itu semua disebabkan tidak lain karena air laut telah merembes ke daratan. Kenapa sampai air laut masuk ke daratan? disebabkan tidak lain karena air tanah telah habis disedot

⁵⁴ Dokumen Mading MIN Balikpapan

oleh pabrik-pabrik yang ada di kota-kota besar. Kemudian siapa pemilik pabrik-pabrik tersebut kalau bukan kaum elit. Tidak mungkin kaum bawah bisa memiliki pabrik. Itulah paradok dari majalah dinding di MIN Balikpapan yang berbunyi *Save Water For Better Life*, bagaimana kaum bawah disuruh dengan cara lemah-lembut untuk menghemat air tetapi kaum elit dengan pabrik-pabrik raksasa mereka yang kehausan menghisab habis air tanah yang kita tinggali bersama ini.



Gambar 9⁵⁵

Kekerasan simbolik pada majalah dinding berikutnya yang terjadi di MIN Balikpapan adalah Jam 07.05 Wita Anda Sudah Terlambat Gerbang Ditutup. Jika kita simpulkan kalimat tersebut sebenarnya tidak lain adalah disiplin. Bagi siswa MIN Balikpapan hal pertama dan yang paling utama

⁵⁵ Dokumen Mading MIN Balikpapan

dilakukan di awal masuk sekolah adalah disiplin. Disiplin merupakan habitus kaum elit yang paling utama. Bagi kaum elit, apapun bidang ekonomi yang ditekuni hal pertama yang dilakukan adalah disiplin. Disiplin adalah kunci kesuksesan. Tidak ada kesuksesan tanpa disiplin. Dikarenakan kaum elit sering disebut sebagai orang yang sukses, sudah menjadi rahasia umum bahwa kaum elit juga merupakan orang yang disiplin. Jadi bukanlah hal yang aneh jika habitusnya coba dipaksakan kepada kaum bawah. Dalam hal ini “Jam 07.05 Wita Anda Sudah Terlambat Gerbang Ditutup” merupakan habitus kaum elit yang disosialisasikan kepada kaum bawah di MIN Balikpapan.

d. Kotak P3K, Kekerasan Simbolik dan Normalisasi Habitus



Gambar 10⁵⁶

Kekerasan simbolik berikutnya yang terjadi di MIN Balikpapan terdapat pada media kotak P3K. Kotak P3K merupakan habitus kaum elit. Hampir bisa dipastikan setiap

⁵⁶ Dokumen Kotak P3K MIN Balikpapan

rumah kaum elit selalu tersedia kotak P3K di dalamnya. Dengan alasan untuk berjaga-jaga jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di rumah, kotak P3K selalu disediakan di rumah kaum elit. Kotak P3K biasanya berisi plester, kain kasa, perban, alkohol, obat tetes mata, cangkir, sendok kecil, minyak kayu putih, obat diare, obat batuk, anti biotik dll. Dari berbagai isi yang ada dalam kotak P3K tersebut, yang biasa disebut sebagai barang murah bagi kaum elit, bisa dipastikan tidak selalu tersedia di rumah kaum bawah. Bagi kaum bawah, kotak P3K beserta isinya tidaklah lebih penting nilainya jika dibandingkan dengan ketersediaan beras. Jadi dengan dengan memajang kotak P3K pada MIN Balikpapan terlepas dari fungsinya, merupakan proses normalisasi habitus kaum elit kepada kaum bawah.

e. Kode Etik Siswa, Kekerasan Simbolik dan Normalisasi Habitus



Gambar 11⁵⁷

⁵⁷ Dokumen Kode Etik Siswa MIN Balikpapan

Kekerasan simbolik berikutnya yang terdapat di MIN Balikpapan adalah kode etik siswa. Kode etik merupakan pedoman tertulis sebagai ukuran dalam berperilaku bagi siswa MIN Balikpapan dalam kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler, olah raga dan aktivitas yang lain serta dalam berinteraksi dengan masyarakat. Berikut akan dijelaskan kekerasan simbolik dari poin-poin kode etik siswa tersebut:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.
2. Menciptakan budaya Islami di lingkungan madrasah
3. Menghormati Bapak/Ibu Guru dan Karyawan Madrasah
4. Mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan peraturan yang berlaku
5. Melaksanakan ajaran Islam dengan berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist
6. Memelihara kerukunan dan kedamaian antar teman
7. Mencintai diri sendiri, keluarga, masyarakat dan menyayangi sesama
8. Mencintai lingkungan, bangsa dan negara
9. Menjaga dan memelihara fasilitas madrasah
10. Menjaga, memelihara kebersihan, kenyamanan, ketertiban, keindahan dan keamanan madrasah

f. Lukisan, Kekerasan Simbolik dan Normalisasi Habitus



Gambar 12⁵⁸

Kekerasan simbolik berikutnya yang peneliti temukan di MIN Balikpapan adalah seni lukisan. Seni lukisan merupakan karya yang dibuat dengan adanya proses melukis. Sebagai sebuah karya seni, seni lukisan berfungsi sebagai media rekreasi kaum elit disamping sebagai media pendidikan. Dengan seni lukis siapapun bisa diajak untuk menyeberangi dunia seni yang dihadirkan lukisan. Selain itu seni lukisan juga merupakan ekspresi kaum elit untuk menunjukkan habitusnya. Tidak semua golongan manusia bisa memiliki atau mengoleksinya dikarenakan harganya yang mahal. Hanya kaum elit saja yang mampu untuk memilikinya. Sedangkan kaum bawah hanya bisa menonton atau memandangi seni pada pertunjukan seni di museum atau pagelaran-pagelaran seni yang diadakan oleh pemerintah atau kaum elit saja.

⁵⁸ Dokumen seni lukisan MIN Balikpapan



Gambar 13⁵⁹

Dengan dipampangnya seni lukisan pada MIN Balikpapan, baik dengan tujuan untuk estetika, untuk media komunikasi atau untuk media pendidikan merupakan bentuk kekerasan simbolik yang dilakukan oleh kaum elit kepada kaum bawah secara halus. Sudah jelas dari awal bahwa seni lukisan merupakan habitus kaum elit dan bukan habitus kaum bawah. Hanya orang dengan modal ekonomi yang memadai yang mampu membuat, membeli, mengoleksi dan merawat seni lukisan. Hal yang mustahil dilakukan oleh kaum bawah dikarenakan ketiadaan modal ekonomi. Dalam pandangan kaum bawah, jika ada uang lebih dipakai untuk membeli beras daripada untuk lukisan.

⁵⁹ Dokumen seni lukisan MIN Balikpapan

g. Lomba dan Kekerasan Simbolik



Gambar 14⁶⁰

Kekerasan simbolik berikutnya yang peneliti temukan di MIN Balikpapan adalah piala. Piala diperoleh dari proses perlombaan. Dalam setiap perlombaan, baik lomba dalam bidang akademik (kimia, fisika, biologi, matematika) maupun non akademik (lomba lari, lomba menggambar, lomba pidato, lomba membaca puisi, lomba azdan dll.) seringkali sang juara akan diberi hadiah berupa tropi maupun uang pembinaan dari panitia. Jika dilihat sekilas proses pemberian hadiah kepada para juara lomba tidak ada yang salah dengan hal tersebut. Tetapi jika kita renungkan secara lebih mendalam dan seksama, ternyata lomba merupakan wujud kekerasan simbolik yang sangat

⁶⁰ Dokumen koleksi piala MIN Balikpapan

diimpikan oleh banyak kalangan. Betapa tidak, dengan menjadi juara orang bisa menjadi terkenal, dengan terkenal orang akan menjadi mudah mencari pengaruh, dengan pengaruh yang kuat orang akan mudah untuk menjadi penguasa dan dengan kuasa orang dengan mudah menjadi kaya berlimpah materi. Maka tidak heran banyak orang tua yang rela bersusah payah mengikutkan les privat anak-anaknya supaya bisa berprestasi atau juara ketika ada perlombaan.

Jika kita telaah menggunakan teori filsafat pendidikan humanisme atau teori filsafat pendidikan eksistensialisme, setiap manusia itu unik. Artinya manusia itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Jika memang manusia berbeda, pertanyaannya mengapa diperlukan perlombaan untuk mengetahui kemampuan/kelebihan manusia satu terhadap manusia lainnya. Bukankah manusia selalu punya kelebihan dan juga memiliki kekurangan. Mungkin saja pemenang lomba itu memang orang yang kelebihannya dalam bidang itu, tetapi bagi yang tidak menang bukan berarti tidak memiliki kelebihan, tetapi kelebihannya pada bidang lain.

Akhirnya, jika kita perhatikan proses lomba yang diselenggarakan baik dalam bidang akademik maupun non akademik merupakan ritual kekerasan simbolik yang sangat mencolok. Ketika panitia memberikan hadiah kepada para juara, seolah-olah panitia sedang berkata kepada orang yang menyaksikan bahwa inilah sang juara, dia pantas mendapatkan segala hadiah yang telah disediakan panitia, jika kalian (penonton) ingin mendapatkan apa yang telah didapatkan sang juara maka kamu harus giat berlatih, disiplin dan tentu saja kalian harus les privat yang mahal biayanya. Jika tidak bisa melakukan hal itu jangan berharap

untuk menjadi juara. Itulah kekerasan simbolik yang diwujudkan dalam tropi piala MIN Balikpapan.

2. Kekerasan Simbolik di Madrasah Ibtida'iyah Negeri (MIN) 2 Nganjuk

a. Tata tertib madrasah, kekerasan simbolik dan normalisasi habitus

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting (untuk tidak mengatakan paling penting) dalam kehidupan. Pendidikan bertujuan untuk mempersiapkan anak didik menjadi manusia dewasa yang siap untuk menghadapi kenyataan kehidupan di masyarakat. Dengan kata lain pendidikan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Dalam kehidupan modern pelaksanaan proses pendidikan dilaksanakan oleh sebuah institusi yang bernama sekolah/madrasah (untuk selanjutnya kita sebut madrasah).

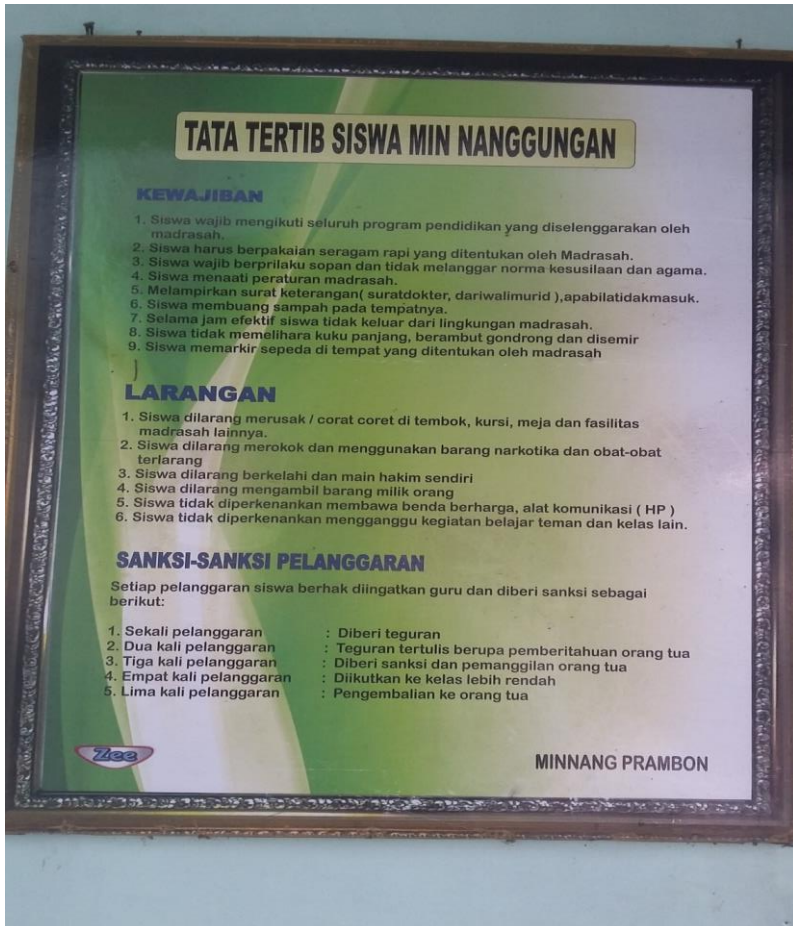
Lingkungan madrasah sangat menentukan berhasil atau tidaknya proses pendidikan yang dilaksanakan. Terdapat beragam latar belakang keluarga, ekonomi, sosial dan budaya dari peserta didik yang ada di lingkungan sebuah madrasah. Beragam atau heterogennya latar belakang peserta didik tentu sangat berpengaruh terhadap tingkat kedisiplinan madrasah. Sementara salah satu syarat supaya proses belajar-mengajar di sekolah bisa dilaksanakan dengan efektif adalah lingkungan yang kondusif atau disiplin. Salah satu upaya yang dilakukan oleh madrasah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif adalah dengan diterapkannya tata tertib madrasah.

Tata tertib madrasah merupakan seperangkat peraturan atau ketentuan yang secara organisasi hal tersebut mengikat setiap komponen madrasah, baik itu siswa, guru, kepala madrasah, tata usaha maupun perangkat

madrasah yang lain agar tujuan yang telah ditetapkan madrasah dapat dicapai. Sementara itu menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tata tertib madrasah merupakan peraturan yang mengatur segenap tingkah laku para siswa selama mereka belajar di madrasah guna menciptakan suasana yang mendukung proses pendidikan.

Tata tertib madrasah selain memuat nilai pendisiplinan bagi peserta didik lebih jauh ternyata juga mempunyai kadungan atau menjadi sarana sosialisasi habitus kelas tertentu, lebih khususnya, tata tertib madrasah dapat menjadi mekanisme kekerasan simbolik di madrasah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata tertib madrasah menampilkan habitus kelas tertentu. Lebih jauh, hal ini mengindikasikan mekanisme kekerasan simbolik juga dapat terjadi melalui tata tertib madrasah. Tata tertib madrasah merupakan ritual wajib pertama dan utama yang tanamkan madrasah kepada para peserta didik. Untuk itu, mekanisme kekerasan simbolik melalui tata tertib ini, tidak disadari merupakan mekanisme kekerasan simbolik yang sangat efektif.



Gambar 15⁶¹
Tata tertib MIN 2 Nganjuk

Tata tertib madrasah tentang kewajiban siswa butir ke 2 misalnya, sangat kental dengan habitus kelas atas. Bacaan siswa harus berpakaian seragam rapi yang ditentukan oleh madrasah tentu saja sangat menguntungkan peserta didik dari kalangan kelas atas. Bagi peserta didik dari kalangan atas untuk bisa mendapatkan baju seragam

⁶¹ Dokumen Tata Tertib MIN 2 Nganjuk

yang bagus (mahal, halus, tahan lama) dan rapi (disetrika) bukanlah pekerjaan yang sulit, dikarenakan fasilitas yang dimiliki oleh orang tua sangat memadai. Sementara bagi peserta didik dari kalangan bawah, untuk bisa mendapatkan atau memiliki baju seragam yang bagus (mahal, halus, tahan lama) dan rapi (disetrika) kemungkinan hanya merupakan imajinasi belaka. Sehingga tata tertib tersebut sangat memaksakan habitus kelas atas, dan sangat merugikan peserta didik kelas bawah.

Tata tertib madrasah tentang kewajiban siswa butir ke-3 yang berbunyi siswa wajib berperilaku sopan dan tidak melanggar norma kesusilaan dan agama, merupakan cerminan dari budaya kelas atas. Untuk peserta didik dari kelas atas, berperilaku sopan, tidak melanggar norma kesusilaan dan agama tentu sudah diberikan oleh orang tua sejak mereka di dalam keluarga. Sementara untuk peserta didik yang berasal dari kalangan bawah, madrasah merupakan satu-satunya akses mereka mendapatkan pengetahuan atau budaya perilaku sopan, norma kesusilaan dan agama. Sehingga tata tertib tentang kewajiban siswa yang ke-3 ini sangat merugikan peserta didik kelas bawah, kemudian sangat menguntungkan peserta didik dari kelas atas. Mereka dipaksa mengikuti budaya kelas atas yang dilegitimasi dalam tata tertib atau dengan istilah lain normalisasi habitus kelas atas kepada peserta didik kelas bawah.

Selanjutnya tata tertib madrasah tentang kewajiban siswa yang mengandung unsur kekerasan simbolik adalah butir ke-5 yang berbunyi melampirkan surat keterangan (surat dokter/surat izin dari wali murid) apabila tidak masuk. Aktifitas mendatangi atau konsultasi kepada dokter merupakan aktifitas atau kebiasaan (habitus) kelas atas. Sehingga jika madrasah membuat tata tertib dengan

bunyi; jika tidak masuk harus melampirkan surat keterangan dokter ini adalah habitus kelas atas. Hal ini sangat menguntungkan kelas atas karena mereka sudah terbiasa dan *familiar* dengan dunia medis. Kemudian mereka dengan modal ekonomi yang dimiliki dengan mudah mendapatkan pelayanan dari dokter yang mahal. Sementara bagi peserta didik kelas bawah untuk mendapatkan surat keterangan sakit dari dokter merupakan persoalan yang tidak sepele. Disebabkan karena mereka tidak memiliki modal ekonomi yang memadai serta tidak terbiasa datang ke dokter. Jika orang atas sakit yang dijadikan rujukan adalah dokter, untuk peserta didik dari kelas bawah jika sakit yang menjadi rujukannya adalah dukun. Dengan demikian, tata tertib madrasah poin ke-5 ini merupakan mekanisme kekerasan simbolik yang sangat nyata.

Tata tertib mengenai kewajiban siswa selanjutnya adalah butir ke-6 yaitu siswa membuang sampah pada tempatnya. Nilai membuang sampah pada tempatnya seolah-olah adalah sesuatu yang natural/alami dan sudah seharusnya dilakukan oleh setiap peserta didik, tetapi setelah diteliti secara seksama, ternyata itu adalah nilai yang terdapat pada keluarga kelas atas. Untuk keluarga kelas atas segala sesuatunya telah diatur sedemikian rupa bahkan membuang sampah harus pada tempatnya. Sementara peserta didik dari keluarga bawah nilai tersebut tidak atau belum menjadi kewajiban. Dengan demikian siswa harus membuang sampah pada tempatnya adalah mekanisme kekerasan simbolik yang berangkat dari habitus kelas atas kemudian dipaksakan secara syah/dinormaslisasikan kepada habitus kelas bawah di madrasah.

Tata tertib kewajiban siswa yang terindikasi mengandung kekerasan simbolik berikutnya adalah butir ke-8 yang berbunyi siswa tidak memelihara kuku panjang,

berambut gondrong dan disemir. Budaya badan yang bersih, jari tangan yang halus dan kuku tidak panjang, rambut klimis dan rapi, tidak gondrong dan disemir, bau badan yang harum merupakan cerminan dari kondisi kelas atas. Sebaliknya kondisi tangan yang kasar, kuku yang panjang, rambut yang gondrong dan acak-acakan, bau badan yang apek merupakan kondisi kelas bawah. Dengan demikian tata tertib siswa tidak memelihara kuku panjang, rambut gondrong dan disemir merupakan bentuk kekerasan simbolik. Hal tersebut merupakan mekanisme normalisasi habitus kelas atas kepada peserta didik kelas bawah di lingkungan MIN 2 Nganjuk.

Tata tertib tentang kewajiban siswa selanjutnya yang terindikasi mengandung unsur kekerasan simbolik adalah butir ke-9 yang berbunyi siswa memarkir sepeda di tempat yang telah ditentukan oleh madrasah. Sepeda merupakan cerminan atau simbol yang sangat kuat mengenai kondisi kelas atas. Kelas atas sudah sangat terbiasa dengan kepemilikan sepeda sementara kelas bawah belum tentu memilikinya, sehingga tata tertib yang berbunyi siswa memarkir sepeda di tempat yang telah disediakan madrasah merupakan bias kekerasan simbolik terhadap kelas bawah oleh kelas atas.

Tata tertib tentang larangan bagi siswa yang terindikasi mengandung unsur kekerasan simbolik adalah poin ke-2 yang berbunyi siswa dilarang merokok dan menggunakan barang narkotika serta obat-obatan terlarang lainnya. Rokok, narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya sangat kuat mencerminkan habitus kelas dominan/kelas atas. Siswa kelas bawah tidak mungkin sanggup memiliki rokok, narkotika dan obat-obatan terlarang dikarenakan harganya yang sangat mahal. Jadi tata tertib yang berbunyi siswa dilarang merokok, menggunakan narkotika dan obat-

obatan terlarang lainnya merupakan peraturan yang bias. Peraturan/tata tertib tersebut dibuat seolah-olah untuk semua peserta didik yang ada padahal pada prakteknya itu dimaksudkan hanya untuk peserta didik dari kelas atas, sedangkan peserta didik dari kelas bawah hanya dijadikan objek pelengkap penderita semata.

Tata tertib selanjutnya yang terkait larangan bagi siswa yang mengandung unsur kekerasan simbolik adalah poin ke-3 yang berbunyi siswa dilarang mengambil barang milik orang lain. Dilarang mengambil barang milik orang lain ini seolah-olah dikonotasikan kepada peserta didik dari kelas bawah semata. Terjadi bias dalam tata tertib ini dikarenakan kondisi sosial ekonomi peserta didik dari kelas bawah yang serba kekurangan dan kesulitan, sehingga setiap terjadi peristiwa pelanggaran pidana pencurian di madrasah yang tertuduh pertama adalah para peserta didik dari kalangan kelas bawah. Seolah-olah setiap terjadi peristiwa kehilangan sesuatu di madrasah yang disalahkan adalah peserta didik dari kalangan kelas bawah.

Tata tertib selanjutnya yang terkait larangan bagi siswa yang mengandung unsur kekerasan simbolik adalah poin ke-5 yang berbunyi siswa tidak diperkenankan membawa benda berharga, alat komunikasi atau HP. Benda berharga, alat komunikasi atau HP adalah simbol dari habitus kelas atas. Jika ditelaah sebenarnya peraturan ini dibuat hanya untuk mereka yang memiliki benda-benda tersebut, yaitu komunitas kelas atas. Sementara untuk kelas bawah dipastikan tidak memiliki barang-barang tersebut. Dengan demikian tata tertib ini merupakan proses (*gebyah uyah/bahasa jawa*) generaslisir dari habitus kelas atas kepada kelas bawah.

Tata tertib selanjutnya yang terindikasi mengandung unsur kekerasan simbolik adalah sanksi-sanksi pelanggaran.

Setiap siswa berhak diingatkan guru dan diberi sanksi. Sekali pelanggaran diberikan sanksi teguran, dua kali pelanggaran diberikan teguran tertulis berupa pemberitahuan orang tua, tiga kali pelanggaran diberi sanksi dan pemanggilan orang tua, empat kali pelanggaran diikutkan kelas yang lebih rendah dan lima kali pelanggaran dikembalikan kepada orang tua. Sanksi-sanksi yang tertulis tersebut sarat dengan muatan kekerasan simbolik yang dilegitimasi dengan nama tata tertib madrasah. Dengan diterapkannya serta dipampangnya tata tertib madrasah tersebut di dinding madrasah jelas ini akan memberikan efek yang mendalam dalam diri setiap peserta didik di madrasah. Alih-alih pererta didik akan melaksanakan dengan penuh keikhlasan dan kesadaran yang terjadi justru peserta didik akan merasa dihantui dan merasa takut jika ingat pesan-pesan yang ada dalam tata tertib tersebut.

b. Seragam madrasah, modal simbolik dan kekerasan simbolik

Praktik mengenakan seragam sekolah bermula pada abad ke-16 di Britania Raya. Praktik ini kemudian diadopsi oleh negara-negara lainnya, dan saat ini umum dijumpai di seluruh dunia. Seragam sekolah adalah seragam yang digunakan sebagai identitas siswa-siswi di sebuah lembaga pendidikan baik negeri ataupun swasta.

Pada sekolah-sekolah tertentu, kewajiban mengenakan seragam telah menjadi bagian dari tata-tertib sekolah dan dilaksanakan secara ketat, mulai dari ketentuan bentuk, bahan, atribut yang dikenakannya, bahkan termasuk cara pembeliannya. Penerapan disiplin berseragam yang sangat ketat, kerap kali “memakan korban” bagi siswa yang melanggarnya, mulai dari teguran lisan yang terjebak dalam kekerasan psikologis (*psychological*

violence), kekerasan/hukuman fisik (*physical abuse*) sampai pada kekerasan simbolik (*symbolic violence*).

Hasil pengamatan pada seragam Madrasah Ibtida'iyah Negeri (MIN) 2 Nganjuk yang menjadi sampel dalam penelitian ini menunjukkan bahwa seragam tersebut menggambarkan habitus kelas atas sekaligus menggambarkan modal simbolik kelas atas. Berikut ini beberapa gambar seragam Madrasah Ibtida'iyah Negeri (MIN) 2 Nganjuk.



Gambar 16⁶²

Tim paduan suara MIN 2 Nganjuk

Gambar 16 diatas, menggambarkan suasana sebuah ritual paduan suara pada acara formal yang khusyu' dengan mengenakan seragam baju putih-putih, yang perempuan memakai jilbab dan ditutup dengan songkok sedangkan yang laki-laki menggunakan penutup kelapa (songkok), ikat

⁶² Dokumen Seragam MIN 2 Nganjuk

pinggang hitam, sepatu hitam dan selempang seragam yang bertuliskan MIN 2 Nganjuk.

c. Majalah Dinding, Modal, Kekerasan Simbolik dan Normalisasi Habitus



Gambar 17⁶³

Kekerasan simbolik berikutnya yang peneliti temukan di MIN 2 Nganjuk terdapat pada majalah dinding (mading). Seperti gambar 17 di atas, yang berbunyi *Budayakan 6 S* yaitu: *Senyum, Sapa, Salam, Salim, Sopan dan Santun*. Dengan kalimat “budayakan” tersebut, ada unsur perintah dalam mading yang dipampang oleh MIN 2 Nganjuk. Kalimat perintah dalam budaya masyarakat Nganjuk khususnya dan pada masyarakat Indonesia pada umumnya merupakan kalimat yang umum diucapkan oleh atasan kepada bawahan. Belum pernah dijumpai kalimat perintah disampaikan oleh bawahan kepada atasan. Kalimat dari bawahan untuk atasan itu adalah kalimat permohonan.

⁶³ Dokumen Majalah Dinding MIN 2 Nganjuk

Sementara kata Senyum, Sapa, Salam, Salim, Sopan dan Santun yang terdapat pada majalah dinding di atas merupakan habitus kaum elit. Bagi kaum elit, kata Senyum, Sapa, Salam, Salim, Sopan dan Santun sudah menjadi menu harian keluarga kaum elit semenjak mereka masih anak-anak. Kata Senyum, Sapa, Salam, Salim, Sopan dan Santun bisa kita maknai sebagai akhlak. Akhlak menurut kaum elit lebih utama dari pada ilmu. Jadi Budayakan 6 S yaitu: Senyum, Sapa, Salam, Salim, Sopan dan Santun merupakan tindakan normalisasi habitus kaum elit kepada kaum bawah.



Gambar 18⁶⁴

Selanjutnya kekerasan simbolik yang peneliti temukan di majalah dinding MIN 2 Nganjuk adalah kalimat “Ucapkan Asslamu’alaikum Wr. Wb. Sebelum Masuk Kelas”. Kalimat “Assalamu’alaikum Wr. Wr.” Merupakan cerminan habitus kaum elit agamawan. Dalam tradisi kaum elit agamawan (Kyai) jika ada ada anak atau santri yang keluar masuk rumah kyai atau pondok harus selalu mengucapkan Assalamu’alaikum Wr. Wb. Jika ada anak atau santri yang keluar-masuk rumah kyai atau pondok tidak mengucapkan Assalamu’alaikum Wr. Wb. Maka anak atau santri tersebut akan dikatakan tidak sopan atau tidak tahu aturan atau tidak tahu tata krama bahkan tidak berbudaya. Sementara bagi

⁶⁴ Dokumen Majalah Dinding MIN 2 Nganjuk

keluarga kaum bawah kalimat Assalamu'alaikum Wr. Wb. Bukan menjadi masalah yang serius, apakah diucapkan atau tidak jika keluar masuk rumah, yang penting bagi kaum bawah di rumah ada beras yang bisa dimasak untuk makan tiap hari. Jadi dengan kalimat "Ucapkan Asslamu'alaikum Wr. Wb. Sebelum Masuk Kelas" merupakan kalimat perintah oleh kaum elit kepada kaum bawah yang dianggap tidak beretika atau tidak berbudaya. Sehingga kalimat tersebut termasuk dalam kategori kekerasan simbolik yang terjadi di MIN 2 Nganjuk.



Gambar 19⁶⁵

Kekerasan simbolik berikutnya yang terdapat pada majalah dinding di MIN 2 Nganjuk yang peneliti temukan adalah "Kedisiplinan; Disiplin menumbuhkan rasa tanggungjawab dan percaya diri". Disiplin merupakan habitus kaum elit. Dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dengan tingkat penguasaan modal ekonomi yang lebih baik, dengan tingkat penguasaan modal budaya yang

⁶⁵ Dokumen Majalah Dinding MIN 2 Nganjuk

lebih baik, dengan tingkat penguasaan modal sosial yang lebih baik dari kaum bawah, menjadikan kaum elit lebih sadar akan arti pentingnya nilai kedisiplinan dalam kehidupannya. Bagi kaum elit, bangun pada pagi hari menjelang subuh dilanjutkan dengan berbagai aktivitas pagi hari (sholat subuh berjama'ah, mandi, memasak, sarapan, berangkat kerja) pulang sore hari dilanjutkan dengan istirahat kemudian sholat maghrib berjama'ah dilanjutkan mengajari anak sampai malam, kemudian mengerjakan tugas kantor sampai larut malam itu sudah biasa dilakukan setiap hari oleh kaum elit. Berbeda dengan kaum bawah, bangun ketika matahari sudah tinggi, kemudian malas-malasan, tidak segera berangkat kerja dll. Merupakan kebiasaan dari kaum bawah. Menjadi tidak heran bahwa kaum bawah lebih lengket dengan stereotip malas dan tidak disiplin. Demikianlah disiplin itu dipahami sebagai habitus kaum elit yang kemudian dipaksakan kepada kaum bawah di MIN 2 Nganjuk dalam bentuk majalah dinding (mading).



Gambar 20⁶⁶

⁶⁶ Dokumen Majalah Dinding MIN 2 Nganjuk

Selanjutnya kekerasan simbolik yang terdapat di majalah dinding di MIN 2 Nganjuk yang peneliti temukan adalah “Buku adalah gudang ilmu membaca adalah kuncinya”. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa kegiatan membaca membutuhkan waktu tersendiri. Memang membaca bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja (misalnya di mobil, di rumah, di perpustakaan, di pinggir jalan dll) tetapi membaca tetap memerlukan waktu. Bagi kaum elit yang sudah terbiasa membaca ditunjang dengan berbagai fasilitas yang dimiliki dan berbagai modal yang telah dikumpulkan tentu untuk membeli buku dan membacanya bukanlah masalah yang sulit. Bagi kaum elit, ketika di rumah menjelang berangkat kerja sambil ngopi di teras rumah masih sempat untuk membaca sebentar, di dalam mobil sambil berangkat ke kantor bisa sambil membaca karena yang menyetir mobil adalah sopirnya, di kantor sambil istirahat siang masih sempat untuk membaca buku sebentar, diperjalanan pulang juga masih bisa membaca di dalam mobil, setelah sampai di rumah sambil istirahat sore juga masih sempat untuk membaca buku, malam sebelum tidur juga masih sempat untuk membaca buku. Tetapi bagi kaum bawah, bagaimana bisa membaca pagi hari lawong waktunya sudah habis untuk mengerjakan rutinitas, ketika berangkat kerja juga tidak bisa membaca dikarenakan berangkat menggunakan sepeda motor, bagaimana mau membaca, di lingkungan pekerjaan juga tidak sempat membaca dikarenakan pekerjaan yang sudah menumpuk harus segera diselesaikan, setelah pulang ke rumah sudah kecapekan jadi tidak sempat untuk membaca. Bahkan mungkin jangankan untuk membaca buku, untuk membeli bukunya saja tidak bisa karena ketiadaan uang. Jadi “Buku adalah gudang ilmu membaca adalah kuncinya”

merupakan bentuk kekerasan simbolik pemaksaan habitus kelas atas kepada kelas bawah.

d. Etika Dan Kekerasan Simbolik



Gambar 21⁶⁷

Kekerasan simbolik berikutnya yang peneliti temukan di MIN 2 Nganjuk adalah etika murid kepada guru. Tampak dalam gambar tersebut siswa MIN 2 Nganjuk mencium tangan guru sebelum masuk dalam kelas. Budaya cium tangan kepada kepada orang yang lebih tua ataupun kepada guru jelas merupakan habitus kaum elit. Dengan justifikasi menghormati orang yang lebih tua atau menghormati guru siswa diwajibkan untuk mencium tangan merupakan budaya feodal kaum elit. Dalam pandangan kaum elit, kaum bawah harus selalu menghormati, tunduk dan patuh kepada kaum elit. Kita bisa menyaksikan bagaimana nasib seorang pembantu rumah tangga di rumah kaum elit, walaupun pembantu tersebut telah berusia senja, tetap saja yang harus memberikan penghormatan adalah pembantu tersebut dengan menyebut ndoro, gusti, majikan,

⁶⁷ Dokumen Etika Murid Kepada Guru MIN 2 Nganjuk

kanjeng atau sebutan yang lain bagi tuan rumah. Tidak peduli yang jadi tuan rumah tersebut masih anak TK ataupun SD tetap saja pembantu harus selalu memberikan penghormatan. Tidak ada ceritanya bahwa di rumah kaum elit itu, dikarenakan sang pembantu rumah tangga telah berusia lanjut kemudian menjadi lebih dihormati, dihargai atau dimulyakan, yang ada malah disuruh berhenti karena sudah tidak produktif lagi, hendak diganti dengan yang lebih muda, lebih gesit dan lebih produktif kinerjanya. Jadi jika di MIN 2 Nganjuk ada tradisi cium tangan guru oleh siswa itu merupakan turunan dari habitus kaum elit. Itulah yang dinamakan kekerasan simbolik pemaksaan habitus kaum elit kepada kaum bawah. Jika kaum bawah (siswa) tidak mau cium tangan, maka siswa akan dilabeli sebagai anak yang tidak sopan, tidak berbudaya dan tidak mengerti tata krama.

e. Rekreasi, Habitus dan Kekerasan Simbolik



Gambar 22⁶⁸

⁶⁸ Dokumen Rekreasi Murid MIN 2 Nganjuk

Kekerasan simbolik berikutnya yang peneliti temukan di MIN 2 Nganjuk adalah rekreasi. Dalam tradisi sekolah di pulau jawa, setelah siswa selesai melaksanakan ujian (baik ujian kenaikan kelas maupun ujian kelulusan) kemudian melakukan rekreasi ke luar kota. Rekreasi dalam teorinya dimaksudkan untuk mengembalikan semangat/gairah siswa setelah tertekan beberapa waktu karena harus melaksanakan ujian. Diharapkan setelah melakukan rekreasi siswa merasa fress atau segar untuk melaksanakan proses pembelajaran selanjutnya. Jika seperti itu tujuan yang hendak dicapai tentu tidak ada yang salah tentang rekreasi yang telah diadakan oleh MIN 2 Nganjuk. Akan tetapi, jika dilihat dari sudut pandang lain ternyata rekreasi tidak lain merupakan bentuk kekerasan simbolik (pemaksaan secara halus, terstruktur dan sistematis) habitus kaum elit kepada kaum bawah. Betapa tidak, bagi kaum elit yang memiliki modal ekonomi yang memadai sudah menjadi budaya untuk mengajak anaknya rekreasi setiap selesai ujian sekolah atau ketika pergantian tahun baru selalu berlibur ke luar kota dengan menginap di hotel atau vila yang mewah dan mahal. Dengan satu tujuan, menghilangkan rasa penat dalam pikiran yang sebelumnya telah capek dengan pekerjaan.



Gambar 23⁶⁹

Sementara bagi kaum bawah, rekreasi merupakan kata mewah yang mudah diucapkan tetapi terlalu susah untuk dilaksanakan. Tetapi jika diteliti secara seksama ternyata kaum bawah juga bisa melakukan rekreasi, namun bentuk dan model rekreasinya sangat jauh berbeda dengan kaum elit. Jika kaum elit rekreasi dengan pergi ke luar kota (dengan objek wisata pantai, gunung atau wahana hiburan modern yang mewah dan mahal) berangkat menggunakan mobil mewah atau naik pesawat terbang kemudian menginap di hotel, vila atau penginapan yang lain, sementara kaum bawah hanya bisa rekreasi dengan pergi ke sawah melihat tanaman padi yang menghiju sambil menggembala kambing atau sapi peliharaannya.

Jika dilihat dan diteliti, kegiatan rekreasi yang telah dilakukan oleh MIN 2 Nganjuk merupakan imitasi atau peniruan terhadap habitus orang elit. Jika orang elit bisa rekreasi dengan berbagai sarana, media dan alat transportasi yang mewah dan mahal tidak dengan MIN 2 Nganjuk. MIN Nganjuk berangkat ke kota Jogjakarta dengan

⁶⁹ Dokumen Rekreasi Murid MIN 2 Nganjuk

menyewa bus pariwisata, kemudian para siswa untuk bisa ikut rekreasi bisa dengan cara mencicil biayanya kepada sekolah. Inilah yang dinamakan normalisasi habitus orang elit oleh orang bawah, jika tidak bisa meniru secara total habitus orang elit maka cukup mengkopinya dengan beberapa modifikasi dan menurunkan standar fasilitas yang ada.

f. Lomba dan Kekerasan Simbolik



Gambar 24⁷⁰

Kekerasan simbolik lainnya yang peneliti temukan di MIN 2 Nganjuk adalah pada lomba. Apapun jenis lombanya, prinsip utamanya adalah bagaimana mencari satu orang yang paling ahli/paling jago dalam satu bidang tertentu. Misalnya lomba matematika tingkat sekolah dasar, maka yang dicari adalah satu orang yang paling pintar (menjawab dengan cepat, tepat dan benar) matematika pada tingkat sekolah dasar. Begitu juga misalnya lomba adzan, yang dicari oleh dewan juri adalah anak yang suaranya paling merdu,

⁷⁰ Dokumen koleksi piala MIN 2 Nganjuk

paling panjang nafasnya, paling bagus lagunya dan paling bagus tampilannya. Seperti itu seterusnya dalam setiap lomba, padahal dalam sebuah pendidikan setiap individu/siswa itu adalah unik atau berbeda dengan yang lainnya. Kenapa kita harus mengadu siswa dalam satu bidang tertentu padahal kita tahu mereka berbeda dalam banyak hal. Jika ada perlombaan, apapun bentuk dan jenisnya pasti terjadi kekerasan simbolik di dalamnya, dikarenakan memaksakan siswa untuk selalu menjadi yang terbaik daripada yang lainnya. Sehingga untuk bisa menjadi juara jika perlu harus les privat kepada mantan juara juga tentu dengan biaya yang mahal. Jika harus les privat, tentu yang mampu hanya kaum elit dikarenakan mereka yang memiliki sumberdaya untuk melakukannya. Sementara kaum bawah hanya bisa menonton tanpa bisa berbuat apa-apa. Lagi-lagi kita menyaksikan habitus kaum elit yang dipaksakan/dinormalisasikan kepada kaum bawah pada lomba.

B. Analisa Hasil Penelitian

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian di atas, kekerasan simbolik yang terjadi di MIN Balikpapan dan MIN 2 Nganjuk termanifestasikan dalam hampir semua kegiatan madrasah. Adapun bentuk-bentuk kekerasan simbolik yang terjadi di MIN Balikpapan dan MIN 2 Nganjuk antara lain; siswa diwajibkan menjalani tata tertib madrasah, siswa dipaksa menerima dan menjalani hukuman madrasah, siswa dipaksa mempraktikkan habitus kelas atas yang dimuat pada majalah dinding madrasah, siswa dipaksa menerima habitus kelas atas berupa penyediaan kotak P3K, siswa dipaksa menerima dan menjalani kode etik siswa, siswa dipaksa menerima habitus kelas atas berupa lukisan, siswa dipaksa menerima dan menjalani lomba, siswa dipaksa

menerima dan mempraktikkan pemakaian seragam madrasah, siswa dipaksa menerima dan menjalani etika dan siswa dipaksa dan menerima habitus kelas atas berupa rekreasi.

Bentuk-bentuk kekerasan simbolik di MIN Balikpapan dan MIN 2 Nganjuk tersebut sesuai dengan tesis Bourdieu yang menyatakan bahwa madrasah hanya sebuah alat untuk mempertahankan eksistensi kelas dominan. Madrasah pada dasarnya hanya menjalankan proses reproduksi budaya. Kelas dominan mempertahankan posisinya melalui meminjam istilah Ivan Illich "*hidden curriculum*", madrasah mempengaruhi sikap dan kebiasaan siswa dengan menggunakan budaya kelas elit. Kelas elit memaksakan kelas bawah untuk bersikap dan mengimitasi budaya kelas elit melalui madrasah. Madrasah tidak lebih hanya sebagai tempat untuk mensosialisasikan habitus kelas dominan sebagai jenis habitus yang alami dan memosisikan habitus kelas atas sebagai satu-satunya habitus yang tepat dan paling baik.

Berbeda dengan Bourdieu yang menyatakan bahwa praktis madrasah hanya merupakan proses reproduksi budaya, Auguste Comte melihat bahwa di dalam perkembangan jiwa manusia, baik secara individual maupun secara keseluruhan terdapat kemajuan. Hukum perkembangan itu dapat dijabarkan dari kecenderungan umat manusia yang selalu berusaha agar dirinya dapat terus-menerus memperbaiki sifat dan keadaannya.⁷¹ Hal ini sesuai dengan tulisan Reza A.A Wattimena yang berpendapat bahwa jika seseorang ingin sukses dalam bidang apapun harus maka harus memiliki habitus yang

⁷¹ Lihat: <http://malahayati.ac.id/?p=15827>, diakses: Sabtu, 30 Mei 2019, Pukul: 22.24 Wita

sesuai dengan profesi yang hendak digelutinya. Misalnya ingin sukses dalam arena pendidikan, maka orang perlu mempunyai habitus pendidikan (belajar, menulis, berdiskusi, membaca) dan kapital intelektual (pendidikan dan penelitian). Jika dia tidak memiliki habitus dan kapital yang sesuai dengan pendidikan, maka bisa dipastikan dia tidak akan sukses di dalam arena pendidikan.⁷²

Hal yang sama juga berlaku di dalam arena hukum. Jika seseorang ingin sukses dalam arena hukum, maka dia harus habitus yang tepat (bekerja keras di LBH yang bagus, disiplin, pendidikan hukum), kapital budaya (jejaring sosial yang luas/pejabat dan pengusaha) yang tepat. Jika seseorang memiliki habitus pendidik kemudian dia terjun ke dunia hukum, maka kemungkinan dia akan gagal kecuali pendidikan hukum. Dengan demikian, konsep habitus, kapital dan arena terkait sangat erat. Untuk bisa meraih sukses atau kemajuan dalam bahasa Auguste Comte, seseorang perlu memiliki habitus dan kapital yang sesuai dengan arena di mana dia berada. Jika tidak memiliki habitus dan kapital yang tepat untuk satu arena, maka kemungkinan besar, dia akan gagal dalam arena yang dimasukinya.

⁷² Reza A.A Wattimena, *Berfikir Kritis Bersama Pierre Bourdieu: Filsuf dan Sosiolog Asal Perancis*: <https://rumahfilsafat.com/2012/04/14/sosiologi-kritis-dan-sosiologi-reflektif-pemikiran-pierre-bourdieu/>, diakses: Sabtu, 30 Mei 2019, Pukul: 22.19 Wita

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka, dapat disimpulkan bahwa kekerasan simbolik di Madrasah Ibtida'iyah Negeri (MIN) Balikpapan dan Madrasah Ibtida'iyah Negeri (MIN) 2 Nganjuk termanifestasikan dalam hampir semua kegiatan madrasah. Adapun bentuk-bentuk kekerasan simbolik yang terjadi di MIN Balikpapan dan MIN 2 Nganjuk antara lain; siswa diwajibkan menjalani tata tertib madrasah, siswa dipaksa menerima dan menjalani hukuman madrasah, siswa dipaksa mempraktikkan habitus kelas atas yang dimuat pada majalah dinding madrasah, siswa dipaksa menerima habitus kelas atas berupa penyediaan kotak P3K, siswa dipaksa menerima dan menjalani kode etik siswa, siswa dipaksa menerima habitus kelas atas berupa lukisan, siswa dipaksa menerima dan menjalani lomba, siswa dipaksa menerima dan mempraktikkan pemakaian seragam madrasah, siswa dipaksa menerima dan menjalani etika dan siswa dipaksa dan menerima habitus kelas atas berupa rekreasi.

Bentuk-bentuk kekerasan simbolik di MIN Balikpapan dan MIN 2 Nganjuk tersebut sesuai dengan tesis Bourdieu yang menyatakan bahwa madrasah hanya sebuah alat untuk mempertahankan eksistensi kelas dominan. Madrasah pada dasarnya hanya menjalankan proses reproduksi budaya. Kelas dominan mempertahankan posisinya melalui meminjam istilah Ivan Illich "*hidden curriculum*", madrasah mempengaruhi sikap dan kebiasaan

siswa dengan menggunakan budaya kelas elit. Kelas elit memaksakan kelas bawah untuk bersikap dan mengimitasi budaya kelas elit melalui madrasah. Madrasah tidak lebih hanya sebagai tempat untuk mensosialisasikan habitus kelas dominan sebagai jenis habitus yang alami dan memposisikan habitus kelas atas sebagai satu-satunya habitus yang tepat dan paling baik.

Berbeda dengan Bourdieu yang menyatakan bahwa praktis madrasah hanya merupakan proses reproduksi budaya, Auguste Comte melihat bahwa di dalam perkembangan jiwa manusia, baik secara individual maupun secara keseluruhan terdapat kemajuan. Hukum perkembangan itu dapat dijabarkan dari kecenderungan umat manusia yang selalu berusaha agar dirinya dapat terus-menerus memperbaiki sifat dan keadaannya. Hal ini sesuai dengan tulisan Reza A.A Wattimena yang berpendapat bahwa jika seseorang ingin sukses dalam bidang apapun harus maka harus memiliki habitus yang sesuai dengan profesi yang hendak digelutinya. Misalnya ingin sukses dalam arena pendidikan, maka orang perlu mempunyai habitus pendidikan (belajar, menulis, berdiskusi, membaca) dan kapital intelektual (pendidikan dan penelitian). Jika dia tidak memiliki habitus dan kapital yang sesuai dengan pendidikan, maka bisa dipastikan dia tidak akan sukses di dalam arena pendidikan.

Hal yang sama juga berlaku di dalam arena hukum. Jika seseorang ingin sukses dalam arena hukum, maka dia harus habitus yang tepat (bekerja keras di LBH yang bagus, disiplin, pendidikan hukum), kapital budaya (jejaring sosial yang luas/pejabat dan pengusaha) yang tepat. Jika seseorang memiliki habitus pendidik kemudian dia terjun ke dunia hukum, maka kemungkinan dia akan gagal kecuali pendidikan hukum. Dengan demikian, konsep habitus,

kapital dan arena terkait sangat erat. Untuk bisa meraih sukses atau kemajuan dalam bahasa Auguste Comte, seseorang perlu memiliki habitus dan kapital yang sesuai dengan arena di mana dia berada. Jika tidak memiliki habitus dan kapital yang tepat untuk satu arena, maka kemungkinan besar, dia akan gagal dalam arena yang dimasukinya.

B. Saran

1. Madrasah perlu meningkatkan jumlah (kuantitas) berbagai media dan sarana pendidikan yang ada
2. Madrasah perlu meningkatkan mutu (kualitas) berbagai media dan sarana pendidikan yang ada sehingga jika mungkin menyerupai atau semirip mungkin dengan yang aslinya atau bahkan jika perlu lebih baik daripada aslinya
3. Madrasah perlu menyusun media dan sarana pendidikan secara sistematis
4. Madrasah perlu melibatkan orang tua/stake holder dalam membuat berbagai media dan sarana pendidikan supaya lebih bisa menginspirasi siswa untuk menjadi orang sukses.
5. Madrasah perlu mengajak siswa untuk studi banding ke tempat kaum elit dan kaum bawah supaya mengerti nilai sebuah perjuangan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulsyani, *Sosiologi: Kelompok dan Masalah Sosial*, cet. 1, Jakarta: Fajar Agung, 1987

Ardina Barata, Patrick, *Strukturasi Kekuasaan dan Kekerasan Simbolik dalam cerpen "Ayam", "Suatu Malam Suatu Warung", dan "Tahi" dalam Kumpulan Cerpen Hujan Menulis Ayam Karya Sutardji Calzoum Bachri*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2017

Arikunto, Suharsimi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Grafindo Persada, 1991

Asrohah, Hanun, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999

Bourdieu, Pierre, *Outline of a Theory of Practice*, Cambridge: The University Press, 1995

....., *The Field of Cultural Production*, Cambridge: Polity Press, 2000

....., "The Forms of Capital", dalam *The Routledge Falmer Reader in Sociology of Education*, (ed.) Stephen J. Ball, London: The Routledge Falmer, 2004

Daulay, Haidar Putra, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009

Dokumen Mading MIN Balikpapan

Dokumen Kotak P3K MIN Balikpapan

Dokumen Kode Etik Siswa MIN Balikpapan

Dokumen seni lukisan MIN Balikpapan

Dokumen koleksi piala MIN Balikpapan

Dokumen Tata Tertib MIN 2 Nganjuk

Dokumen Seragam MIN 2 Nganjuk

Dokumen Majalah Dinding MIN 2 Nganjuk

Dokumen Etika Murid Kepada Guru MIN 2 Nganjuk

Dokumen Rekreasi Murid MIN 2 Nganjuk

Dokumen koleksi piala MIN 2 Nganjuk

Field, John, *Modal Sosial*, Yogyakarta: Kreasi Wacan Offset, 2010

Giddens, Anthony, *Sociology Fifth Edition*, USA, Polity Press, 2006

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jakarta: UGM Press, 1993

Haralambos and Holdborn, *Sociology: Themes and Perspectives 6th Edition*, London: Harper Collins Publisher, 2004

Harker, Richard, *(Habitus X Modal) + Ranah = Praktik: Pengantar Paling Komprehensif kepada Pemikiran Pierre Bourdieu*, diterjemahkan dari *An Introduction to The Work of Pierre Bourdieu: Practice Theory* oleh Pipit Maizer, Bandung: Jalasutra, 2007

Haryatmoko, *Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa*, Yogyakarta: Kanisius, 2003

Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999

Hasbullah, Jousairi, *Social Capital*, Jakarta: M-R United Press, 2006

Hasnah, Nurhayati, *Representasi Kekerasan Simbolik Pada Tubuh Perempuan Dalam Media Massa Online Khusus Perempuan (Studi Kasus Pada Rubrik Fashion Dan Beauty Website Wolipop)*, Skripsi, Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2015

Hauberer, Julia, *Social Capital Theory, ...*: VS Reseach, 2011

<http://malahayati.ac.id/?p=15827>

<https://rumahfilsafat.com/2012/04/14/sosiologi-kritis-dan-sosiologi-reflektif-pemikiran-pierre-bourdieu/>

Huberman, Milles, Michael and Matthew. B, *Analisis Data Kualitatif*, (terj), Jakarta: UI Press, 1984

Lin, Nan, *Social Capital*, Australia: Cambridge University, 2004

Lytard, Jean-Francois, *Kondisi (Era) Modern*, terj. Novella Panchiano, Jogjakarta: Panta Rhei Books, 2003

Maksum, Ali, *Sosiologi Pendidikan*, Surabaya: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013

- Martono, Nanang, *Kekerasan Simbolik di Sekolah Sebuah Ide Sosiologi Pendidikan Pierre Bourdieu*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012
- Moleong, Lexy, *Metode penelitian Kualitatif*, Jakarta: Remaja Rosda Karya, 2004
- Muhajir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000
- Musarrofa, Ita, *Mekanisme Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Kekerasan Simbolik Pierre Bourdieu*, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 49, No.2, Desember 2015, UIN Sunan Ampel Surabaya
- Nasution, S., *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010
- Nizar, Samsul, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana, 2007
- Riduan, *Metode dan Teknik Penyusunan Tesis*, Bandung: Alfabeta, 2004
- Roekhan, *Kekerasan Simbolik di Media Massa*, Jurnal Bahasa Dan Seni, Tahun 38, Nomor 2, Agustus 2010, Universitas Negeri Malang
- Subhan, Arief, *Lembaga pendidikan islam indonesia abad ke-20*, Jakarta: kencana, 2012
- Sigit, Suhardi, *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial-Bisnis-Manajemen*, Bandung: Lukman Offset, 1999

Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007

Suseno, Farnz Magnis, *Pijar-Pijar Filsafat: dari Gatholoco ke Filsafat Perempuan, dari Adam Muller ke Postmodernisme*, Yogyakarta: Kanisius, 2009

Syaepurohman, Purnama dkk, *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Direktorat Ketenagaan Departemen Pendidikan Nasional

Ulfah, *Kekerasan Simbolik dalam Wacana Pembelajaran*, Jurnal Penelitian Pendidikan INSANI, Volume 14, Nomor 1, Juni 2013, Universitas Tadulako Palu

Wijayanti, Lina, *Kekerasan Simbolik Dalam Iklan Televisi (Studi Semiotika Pesan Iklan Politik Partai Golkar Dan Partai Nasdem Dalam Pemilu DPR 2014)*, Skripsi, Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana, 2017

Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004